



UNIVERSITAS INDONESIA

**KETIMPANGAN PENDAPATAN TENAGA KERJA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

DI KECAMATAN BADAU, KABUPATEN KAPUAS HULU

SKRIPSI

NIKE DIAH AGUSTIN

0806328631

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

DEPARTEMEN GEOGRAFI

DEPOK

2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**KETIMPANGAN PENDAPATAN TENAGA KERJA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT**

DI KECAMATAN BADAU, KABUPATEN KAPUAS HULU

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains

NIKE DIAH AGUSTIN

0806328631

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

DEPARTEMEN GEOGRAFI

DEPOK

2012

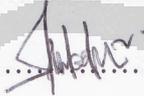
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nike Diah Agustin

NPM : 0806328631

Tanda Tangan

.....

Tanggal : 2 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Nike Diah Agustin
NPM : 0806328631
Program Studi : Geografi
Judul Skripsi : Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Perkebunan
Kelapa Sawit di Kecamatan Badau, Kabupaten
Kapuas Hulu

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Djoko Harmantyo, MS (.....)

Pembimbing 1 : Drs. Hari Kartono, MS (.....)

Pembimbing 2 : Taqyuddin S.Si, M.Hum (.....)

Penguji 1 : Drs. Sobirin, M.Si (.....)

Penguji 2 : Drs. Supriatna, MT (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 2 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sains Departemen Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini penulis tidak akan mampu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Hari Kartono, MS selaku pembimbing I dan Bapak Taquuddin, S.Si, M.Hum selaku pembimbing II yang telah membantu penulis baik waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Drs. Sobirin, M.Si selaku dosen penguji I dan Bapak Drs. Supriatna, MT selaku dosen penguji II serta Dr. Djoko Harmantyo, MS selaku ketua sidang atas koreksi, masukan, dan kritik, serta saran yang membangun bagi penulis dalam menyusun skripsi ini;
3. Seluruh staf dosen dan karyawan Departemen Geografi yang sudah banyak memberikan ilmu, bantuan dan dorongan kepada penulis dari masa perkuliahan hingga saat ini;
4. Seluruh instansi dan dinas-dinas yang terkait, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau, keluarga Bapak Rene di Pontianak, Mas Imam di Sintang, Om Cahya di Putussibau, Ibu Nadiah di Badau . Terimakasih telah memberikan tempat tinggal bagi penulis selama di lapangan;
5. Sahabat-sahabat tersayang di Geografi 2008 Ranie Dwi A, Dwiyanti K, Wika Ristya, Nurintan, dan para bijiers (Sesa, Wenang, Osmar, Riangga, Alvian, Dita, Kelvin) yang selalu menyemangati dan menemani penulis selama 4 tahun kuliah, kalian adalah teman paling menyenangkan dalam hidup penulis. Begitu banyak pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan bersama kalian,

suka duka kita lalui sama-sama;

6. Keluarga Geografi 2008, atas kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa selama kuliah. Kekompakan yang terjaga ini karena peran ketua angkatan kita yang hebat;
7. Sahabat-sahabat penulis dari SD, SMP, dan SMA Trie, Isti, Hanif, Riska, Khisi, Akbar, Adi, dan Acil, yang menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama ini, selalu terhibur ketika bersama kalian;
8. Kakak angkatan dan adik angkatan Geografi yang telah mewarnai hari-hari selama perkuliahan, atas kehangatan pertemanan dan suka duka selama menjadi bagian dari keluarga besar Geografi UI;
9. Teman sekelompok K2N Wanda, Prisil, dan Putra atas semangat, dukungan, dan kekompakan yang diberikan, senang bisa mengenal kalian dan special thanks to Fitri Huda dan Ade yang sudah menemani penulis selama survey lapang, kebaikan kalian tidak akan pernah penulis lupakan;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berjasa membantu penulis dalam menyusun skripsi ini;
11. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta Ibunda dan Ayahanda atas segala dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis, untuk segala limpahan kasih sayang, untuk segala bantuan moral, spiritual, dan materiil. Adik-adikku tersayang Septi dan Lutfi yang selalu menghibur penulis ketika jenuh dan bosan. Mba Mus yang sudah banyak membantu. Semua kerja keras ini penulis persembahkan untuk Ibunda dan Ayahanda tercinta yang banyak berkorban untuk penulis.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nike Diah Agustin
NPM : 0806328631
Program Studi : Geografi
Departemen : Geografi
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit
di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal : 2 Juli 2012
Yang menyatakan



(Nike Diah Agustin)

ABSTRAK

Nama : Nike Diah Agustin
Program Studi : Geografi
Judul Skripsi : Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Perkebunan
Kelapa Sawit di Kecamatan Badau,
Kabupaten Kapuas Hulu

Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau dapat dimanfaatkan sebagai penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kontribusi perkebunan kelapa sawit terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kecamatan Badau. Perkebunan kelapa sawit dapat menyerap banyak jumlah tenaga kerja, dari jumlah tenaga kerja yang semakin besar tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan atau pemasukan suatu wilayah. Daerah penelitian meliputi sembilan desa di Kecamatan Badau dengan unit analisis adalah desa. Metode penelitian adalah dengan analisis deskriptif dengan pendekatan keruangan. Adapun hasil penelitian ini adalah semakin besar pendapatan rata-rata suatu desa maka ketimpangan pendapatan semakin meningkat. Hal ini terlihat dari tahun 2009 hingga tahun 2011 dimana pendapatan rata-rata desa menurun maka ketimpangannya pun menurun dan berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerja, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin menurun indeks ketimpangannya.

Kata Kunci : Perkebunan kelapa sawit, pendapatan tenaga
kerja, ketimpangan pendapatan, dan Kapuas Hulu

xvi + 131 halaman : 33 Tabel, 32 Gambar dan 15 Foto

Daftar Pustaka : 39 (1973 – 2011)

ABSTRACT

Name : Nike Diah Agustin
Study Program : Geography
Title : Labor Income Inequality Oil Palm Plantations
in Badau Sub District, Kapuas Hulu Regency

The establishment of oil palm plantation in Badau Sub District can be utilized as employment in that area. The purpose of this research is to discover the contribution of oil palm plantations on income inequality that occurred in Badau Sub District. Oil palm plantations could absorb a lot of the workforce, from the amount of labor would have greater effect on revenue or income of a region. The Research area include nine rural in the Badau Sub District. The method of this research is a descriptive analysis of the spatial approach. The result of this research is the greater the average income its means income inequality will increase. It has seen from 2009 to 2011 where the average rural income dropped so the inequality income was decreased and inversely proportional to the amount of labor, the greater the amount of labor, the disparities was decreased.

Key word : oil palm plantation, labor income, inequality
Income, and Kapuas Hulu

xvi + 131 pages : 33 Tables, 32 Pictures dan 15 Photos

Bibliography : 39 (1973 – 2011)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR FOTO	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan penelitian.....	3
1.4 Batasan Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pembangunan Wilayah Perbatasan.....	5
2.2 Pertumbuhan Ekonomi	6
2.3 Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah	7
2.4 Indeks Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah atau Indeks Entropi Theil	8
2.5 PDB Harga Berlaku dan Harga Konstan	10
2.6 Pendapatan Regional	12
2.7 Kelapa Sawit.....	13
2.7.1 Peranan Kelapa Sawit Dalam Perekonomian Indonesia.....	14
2.7.2 Proses Produksi Kelapa Sawit	14
2.8 Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan	20

2.9 Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Bukan Angkatan Kerja.....	21
2.9.1 Tenaga Kerja.....	21
2.9.2 Angkatan Kerja	22
2.9.3 Bukan Angkatan Kerja.....	23
2.10 Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit	24
2.11 Hubungan Aksesibilitas dengan Penyerapan Tenaga Kerja.....	25
2.12 Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Daerah Penelitian	28
3.2 Variabel Penelitian.....	28
3.3 Pengumpulan Data.....	29
3.3.1 Data Primer.....	29
3.3.2 Data Sekunder.....	29
3.4 Pengolahan Data.....	30
3.5 Analisis Data.....	33
3.6 Kerangka Pikir Penelitian.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	35
4.1 Administrasi.....	35
4.2 Penggunaan Tanah	38
4.3 Topografi dan Iklim.....	40
4.4 Kependudukan	41
4.4.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
4.4.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur	43
4.4.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	45
4.4.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
4.5 Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Badau	50
4.6 Aksesibilitas	54
4.7 Perekonomi	57
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
5.1 Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit	61

5.1.1 Tenaga Kerja Kantor	64
5.1.2 Tenaga Kerja Lapangan	65
5.2 Hubungan Aksesibilitas Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	68
5.2.1 Jaringan Jalan	69
5.2.2 Jarak	77
5.3 Hubungan Antara Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pendapatan Desa	90
5.4 Indeks Ketimpangan Pendapatan	100
5.4.1 Indeks Ketimpangan Pendapatan Tahun 2009	101
5.4.2 Indeks Ketimpangan Pendapatan Tahun 2010	109
5.4.3 Indeks Ketimpangan Pendapatan Tahun 2011	116
5.5 Perbandingan Pendapatan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pendapatan Per Kapita Penduduk Kecamatan Badau	123
BAB VI KESIMPULAN.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Administrasi Desa, Jumlah Desa, dan Jumlah Dusun Kecamatan Badau Tahun 2011	36
Tabel 4.2	Luas Penggunaan Tanah di Kecamatan Badau Tahun 2010	38
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Menurut Desa Tahun 2011	42
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011	43
Tabel 4.5	Struktur Usia Penduduk Kecamatan Badau Tahun 2011.....	44
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Usia 15- 64 Tahun Berdasarkan Jenis Pekerjaan	47
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Kecamatan Badau Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Jiwa)	48
Tabel 4.8	Persentase Penduduk Kecamatan Badau Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
Tabel 4.9	Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Badau	51
Tabel 4.10	Indeks Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kecamatan Badau	58
Tabel 4.11	PDRB Kecamatan Badau Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Jutaan Rupiah) Kecamatan Badau	59
Tabel 5.1	Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kecamatan Badau	62

Tabel 5.2 Tenaga Kerja Kantor Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Badau.....	64
Tabel 5.3 Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Lapangan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kecamatan Badau.....	66
Tabel 5.4 Hubungan Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jaringan Jalan Yang Dilalui	69
Tabel 5.5 Hubungan Kelas Jarak (Perkebunan Kelapa Sawit dan Permukiman) dengan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2009.....	78
Tabel 5.6 Hubungan Kelas Jarak (Perkebunan Kelapa Sawit dan Permukiman) dengan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2010	82
Tabel 5.7 Hubungan Kelas Jarak (Perkebunan Kelapa Sawit dan Permukiman) dengan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2011.....	86
Tabel 5.8 Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2009	91
Tabel 5.9 Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2010	94
Tabel 5.10 Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2011	96
Tabel 5.11 Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2009.....	102
Tabel 5.12 Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2009	103
Tabel 5.13 Indeks Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2009.....	105

Tabel 5.14 Klasifikasi Kelas Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Indeks Ketimpangan Tahun 2009	106
Tabel 5.15 Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010.....	109
Tabel 5.16 Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2010.....	110
Tabel 5.17 Indeks Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2010.....	112
Tabel 5.18 Klasifikasi Kelas Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Indeks Ketimpangan Tahun 2010	113
Tabel 5.19 Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2011.....	116
Tabel 5.20 Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2011.....	117
Tabel 5.21 Indeks Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2011.....	119
Tabel 5.22 Klasifikasi Kelas Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Indeks Ketimpangan Tahun 2011.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Penduduk dan Tenaga Kerja	24
Gambar 3.1	Kerangka Pikir Penelitian	34
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kecamatan Badau	37
Gambar 4.2	Peta Penggunaan Tanah Kecamatan Badau Tahun 2010	39
Gambar 4.3	Piramida Penduduk Kecamatan Badau	45
Gambar 4.4	Peta Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau.....	53
Gambar 4.5	Peta Aksesibilitas Kecamatan Badau	56
Gambar 5.1	Peta Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	63
Gambar 5.2	Diagram Permintaan Tenaga kerja, Angkatan Kerja yang Bekerja, Angkatan Kerja yang Belum Bekerja dan Angkatan Kerja Kecamatan Badau.....	66
Gambar 5.3	Peta Hubungan Aksesibilitas dengan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2009.....	71
Gambar 5.4	Peta Hubungan Aksesibilitas dengan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2010.....	73
Gambar 5.5	Peta Hubungan Aksesibilitas dengan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2011.....	75
Gambar 5.6	Peta Jarak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Permukiman Tahun 2009	80
Gambar 5.7	Peta Jarak Riil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Permukiman Tahun 2009	81
Gambar 5.8	Peta Jarak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Permukiman Tahun 2010	84
Gambar 5.9	Peta Jarak Riil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Permukiman Tahun 2010	85
Gambar 5.10	Peta Jarak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Permukiman Tahun 2011	88

Gambar 5.11 Peta Jarak Riil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Permukiman Tahun 2011.....	89
Gambar 5.12 Peta Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2009.....	93
Gambar 5.13 Peta Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2010.....	95
Gambar 5.14 Peta Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2011.....	97
Gambar 5.15 Diagram Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit....	99
Gambar 5.16 Diagram Pendapatan Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit...	99
Gambar 5.17 Peta Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2009.....	104
Gambar 5.18 Peta Indeks Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2009..	108
Gambar 5.19 Peta Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2010	111
Gambar 5.20 Peta Indeks Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2010....	115
Gambar 5.21 Peta Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2011.....	118
Gambar 5.22 Peta Indeks Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2011 ..	122
Gambar 5.23 Grafik Pendapatan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pendapatan Per kapita Penduduk Kecamatan Badau Tahun 2009	123

Gambar 5.24 Grafik Pendapatan Tenaga Kerja Perkebunan

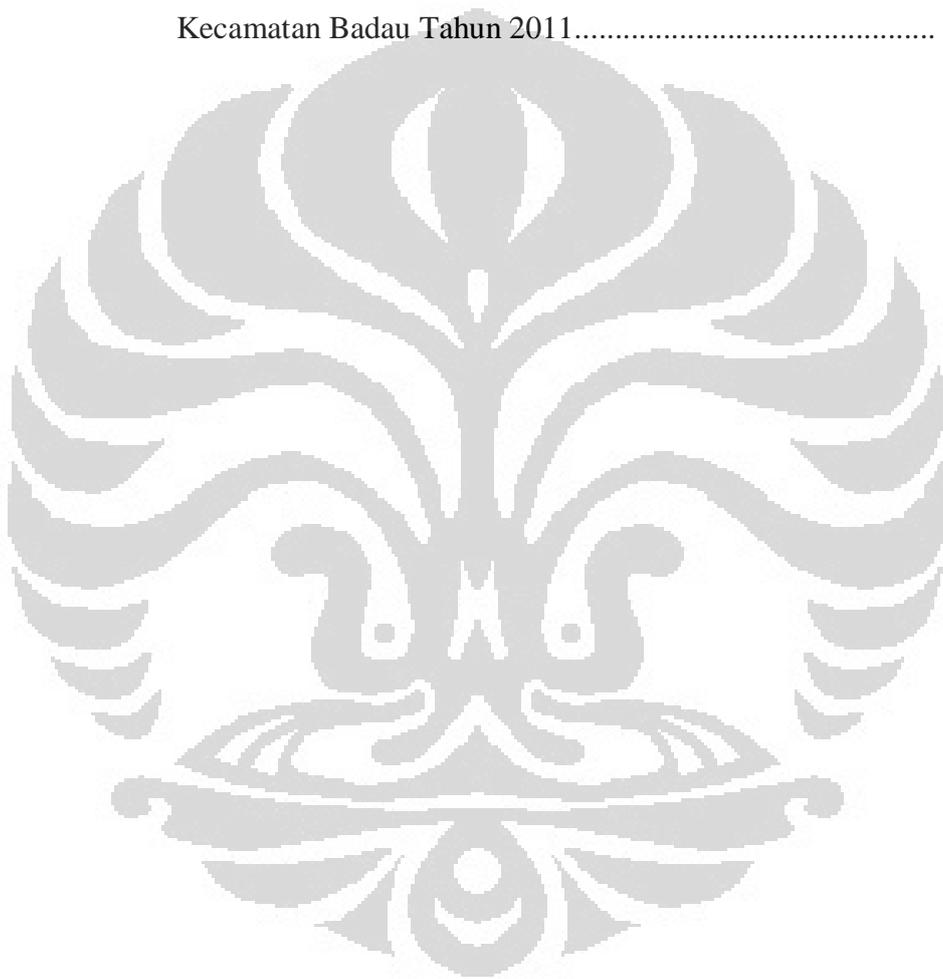
Kelapa Sawit dengan Pendapatan Per kapita Penduduk

Kecamatan Badau Tahun 2010 124

Gambar 5.25 Grafik Pendapatan Tenaga Kerja Perkebunan

Kelapa Sawit dengan Pendapatan Per kapita Penduduk

Kecamatan Badau Tahun 2011..... 125



DAFTAR FOTO

Foto 4.1 Alat yang digunakan untuk pembukaan lahan	51
Foto 4.2 Perkebunan Kelapa Sawit PT Sentra Karya Manunggal.....	51
Foto 4.3 Bibit Kelapa Sawit PT Sentra Karya Manunggal.....	52
Foto 4.4 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Buana Tunas Sejahtera yang dibuat seperti Terasering.....	52
Foto 4.5 Bibit Kelapa Sawit PT. Buana Tunas Sejahtera.....	52
Foto 4.6 Terminal Kecamatan Badau	55
Foto 4.7 Alat Transportasi Umum Darat di Kecamatan Badau	55
Foto 4.8 Alat Transportasi Umum di Danau Sentarum.....	55
Foto 5.1 Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Penduduk Badau.....	67
Foto 5.2 Tenaga Kerja Pemandang	68
Foto 5.3 Transportasi Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit	68
Foto 5.4 Kondisi Jalan Tanah Menuju Desa Janting.....	74
Foto 5.5 Kondisi Jalan Aspal.....	76
Foto 5.6 Kondisi Jalan Diperkeras	76
Foto 5.7 Kondisi Jalan Tanah Kecamatan Badau.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja dengan Kondisi Jalan Yang Dilalui
- Lampiran 2. Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Jarak Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pemukiman Tahun 2009
- Lampiran 3. Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Jarak Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pemukiman Tahun 2010
- Lampiran 4. Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Jarak Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pemukiman Tahun 2011
- Lampiran 5. Interval Kelas Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Indeks Ketimpangan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2009
- Lampiran 6. Interval Kelas Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Indeks Ketimpangan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2010
- Lampiran 7. Interval Kelas Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Indeks Ketimpangan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (2004), Pembangunan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan memprioritaskan empat bidang yaitu Bidang Ideologi dan Politik, Bidang Sosial dan Budaya, Bidang Pertahanan dan Keamanan, dan Bidang Ekonomi. Dalam proses pembangunan di bidang ekonomi, yang perlu dilakukan adalah penguatan ekonomi wilayah perbatasan berbasis ekonomi kerakyatan yang mampu mengolah dan memanfaatkan sumber kekayaan alam yang ada dengan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai adalah terciptanya lapangan pekerjaan, misalnya sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan. Salah satu dari subsektor perkebunan yang menjadi komoditi unggulan adalah perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tanaman tropis dari famili palmae, tanaman ini dikenal sebagai penghasil minyak sayur. Selama 10 tahun terakhir, konsumsi minyak sawit domestik terus meningkat sekitar 5,5 % pertahun.

Pada awal tahun 2005, pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan sepanjang 850 km. Menurut pemerintah, pembangunan perkebunan kelapa sawit ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari setengah juta jiwa dan akan meningkatkan produksi tandan buah segar tiap tahunnya sampai dengan 2,7 juta ton. Proyek ini dipercaya akan menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi di wilayah perbatasan di mana telah terjadi kegiatan ekonomi ilegal, salah satunya *illegal logging*.

Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan memiliki kesamaan suku dengan Negara Malaysia yaitu suku Dayak Iban. Dengan adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini memberikan

keuntungan bagi Indonesia, diantaranya wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dapat dijaga para petani yang menjadi peserta PIR Trans yang dijadikan sebagai penjaga perbatasan, transmigran dari Jawa dapat ditingkatkan sehingga kepadatan penduduk bisa dioptimalkan, meningkatkan kehidupan yang layak bagi penduduk yang ditransmigrasikan dan penduduk yang bermukim di perbatasan yang selama ini terabaikan.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini merupakan suatu bentuk pembangunan ekonomi daerah di wilayah perbatasan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sasaran pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau adalah sebagai salah satu bentuk pembangunan ekonomi dalam konteks regional. Pembangunan ekonomi dalam konteks regional pada dasarnya sama dengan pembangunan nasional secara keseluruhan, karena yang menjadi permasalahannya sama yaitu mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan sebagainya. Pokok masalah tersebut, melalui proses pembangunan dipecahkan dengan menentukan target-target tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan lain-lain. Dalam rangka mengembangkan daerah, dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran, maka daerah akan mengembangkan sektor-sektor perekonomian sesuai dengan keunggulannya. Keunggulan sektor ekonomi daerah, dikarenakan sektor tersebut mempunyai permintaan nasional atau ekspor yang tinggi. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan wilayah.

Ketimpangan wilayah dapat disebabkan karena berbagai faktor seperti penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini, akan dibahas bagaimana

penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit sebagai bentuk pembangunan ekonomi wilayah terhadap ketimpangan wilayah di Kecamatan Badau. Karena penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu hal dari masalah ketimpangan wilayah yang terjadi di Indonesia. Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang pasti timbul dalam pembangunan.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana permintaan dan penyerapan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau ?
2. Bagaimana ketimpangan pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana permintaan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja penduduk Kecamatan Badau yang bekerja di perkebunan kelapa sawit serta untuk mengetahui ketimpangan pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.

1.4 Batasan Penelitian

Yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Perkebunan kelapa sawit adalah suatu area perkebunan yang ditanami kelapa sawit.
2. Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/ perusahaan/ instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.
3. Bekerja adalah suatu kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan.
4. Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang sudah tinggal di Kecamatan Badau sebelum adanya perkebunan kelapa sawit.

5. Pendapatan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah pendapatan penduduk Kecamatan Badau yang bekerja di perkebunan kelapa sawit selama satu tahun.
6. Pendapatan desa subsektor perkebunan kelapa sawit adalah jumlah pendapatan tenaga kerja tiap desa yang bekerja di perkebunan kelapa sawit selama satu tahun.
7. Pendapatan berdasarkan harga konstan adalah perhitungan pendapatan desa subsektor perkebunan kelapa sawit berdasarkan harga konstan. Dalam penelitian ini menggunakan harga beras tahun 2000 sebagai harga konstan.
8. Pendapatan rata-rata tenaga kerja adalah pendapatan desa berdasarkan harga konstan dibagi dengan jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di desa tersebut.
9. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain.
10. Jarak Riil adalah jarak yang ditempuh atau dilalui oleh tenaga kerja perkebunan kelapa sawit untuk mencapai lokasi perkebunan kelapa sawit.
11. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.
12. Regional dalam aspek ekonomi adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah administrasi tertentu seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dsb. (Lincoln, 1997). Dalam penelitian ini regional yang dimaksud desa.
13. Ketimpangan pendapatan adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi di suatu wilayah. Dalam penelitian ini menggunakan variabel tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dan pendapatan rata-rata dari tenaga kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Wilayah Perbatasan

Kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar, memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kawasan perbatasan merupakan kawasan yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Potensi yang dimiliki oleh kawasan perbatasan bernilai ekonomis yang sangat besar, terutama potensi sumberdaya alam yang terbentang di sepanjang dan di sekitar perbatasan. Namun demikian, hingga saat ini kondisi perekonomian sebagian besar wilayah di kawasan perbatasan tersebut masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain.

Di beberapa kawasan terjadi kesenjangan pembangunan kawasan perbatasan dengan negara tetangga. Kondisi ini pada umumnya disebabkan oleh masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi seperti sarana dan prasarana perhubungan, telekomunikasi, permukiman, perdagangan, listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan perbatasan tersebut menyebabkan minimnya kegiatan investasi, rendahnya optimalisasi pemanfaatan SDA, rendahnya penciptaan lapangan pekerjaan, sulit berkembangnya pusat pertumbuhan, keterisolasian wilayah, ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan sosial ekonomi dari negara tetangga, tingginya biaya hidup, serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu komitmen dan kebijakan pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, telah ditetapkan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan yang dilaksanakan

untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu: (1) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional; dan (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya, serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. (Hadi, 2007)

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. (Sukirno, 1985). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output nasional atau dikenal dengan pendapatan nasional dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang dari waktu atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangannya sendiri. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita atau pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan total atau *output* total (PDB) dibagi jumlah penduduknya. (Boediono, 1988). Sedangkan teori ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor- faktor apa yang menentukan kenaikan pendapatan per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Faktor- faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh empat macam faktor seperti faktor ekonomi berupa sumberdaya alam atau tanah, faktor sosial, faktor manusia,

dan faktor politik atau administratif. Faktor manusia atau sumberdaya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PDRB per kapita yang begitu besar rupanya berkaitan erat dengan pengembangan faktor manusia sebagaimana terlihat dalam efisiensi atau produktivitas yang melonjak dikalangan tenaga buruh. (Jhingan, 1999).

2.3 Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah

Menurut Kusmantoro (2009) perbedaan-perbedaan sumberdaya yang dimiliki dari masing-masing daerah mempengaruhi nilai pendapatan yang dimiliki dari masing-masing daerah tersebut sehingga menyebabkan tingkat pertumbuhan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda. Sebagai akibatnya akan timbul perbedaan kesejahteraan di berbagai daerah. Perbedaan kesejahteraan tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu terdapat perbedaan kesejahteraan yang tidak begitu nyata atau tidak mencolok di kedua atau berbagai daerah. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa dalam suatu wilayah pendapatan masing-masing daerah atau tingkat kesejahteraan antar daerah sangat berbeda sekali. Dengan adanya perbedaan tingkat pertumbuhan antara daerah akan mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, sehingga apabila hal ini tidak diperhatikan akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu wilayah/negara.

Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain pasti terjadi di setiap wilayah. Hal ini terjadi karena perbedaan sumberdaya yang dimiliki antar daerah. Namun yang terpenting adalah adanya upaya untuk mengurangi ketimpangan antara daerah yang satu dengan yang lain dalam suatu wilayah. (Ardani, 1992)

Menurut Chrisyanto (2006) seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memungkinkan pengembangan sektor industri dan jasa, persentase sumbangan produksi pertanian dalam perekonomian makin menurun. Akan tetapi sektor pertanian masih tetap menyerap tenaga kerja tambahan cukup besar dibanding sektor lainnya. Menurut Field (dalam Chrisyanto, 2006),

bahwa daerah-daerah dalam suatu Negara tidak memiliki kapasitas yang sebanding untuk tumbuh yang bersifat prinsipil antara satu daerah dengan daerah lain yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah. Ketika pembangunan mengambil bentuk kawasan, hambatan-hambatan geografi kadang kala terlampau besar, sehingga efek pertumbuhan pembangunan dari daerah yang bersangkutan tidak akan menyebar ke kawasan lain. Semakin lama kekuatan pasar seperti pasar tenaga kerja akan menemukan kiat sendiri untuk mengoreksi ketimpangan yang ada.

2.4 Indeks Ketimpangan Ekonomi atau Indeks Entropi Theil

Indeks Entropi Theil merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui adanya ketimpangan ekonomi dalam suatu wilayah. Dimana Indeks Entropi Theil ini dapat diurai menjadi dua sub indikasi yaitu ketimpangan ekonomi dalam wilayah dan ketimpangan antarwilayah. Menurut Kusumantoro (2009) bahwa konsep Entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan Indeks Entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional dan distribusi Produk Domestik Bruto dunia.

Menurut Kuncoro (2004) kelemahan utama indeks lain yang mengukur konsentrasi/ dispersi secara spasial adalah bahwa mereka hanya menyajikan satu nilai tunggal pada suatu titik waktu, tidak seperti indeks-indeks yang lain, indeks Entropi Theil memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu dan menyediakan secara rinci dalam sub-unit geografis yang lebih kecil. Indeks ini pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu; sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan spasial, sebagai contoh kesenjangan antar daerah dalam suatu negara dan antar sub-unit daerah dalam suatu kawasan.

Indeks Entropi Theil menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan indeks konsentrasi spasial yang lain. Keunggulan utama indeks ini

adalah bahwa pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi (ataupun dispersi) distribusi spasial pada sejumlah daerah dan sub-daerah dalam suatu negara. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa analisis dengan menggunakan indeks entropi telah terbukti amat berguna dalam analisis perubahan pola lokasi industri (Garrison & Paulson, 1973) dan suburbanisasi tenaga kerja di kawasan metropolitan (Carlino, 1998).

Untuk mengetahui ketimpangan antar daerah digunakan teknik analisis untuk menghitung ketimpangan atau disparitas pembangunan/pendapatan regional dengan menggunakan indeks Entropi Theil. Indeks ketimpangan regional Entropi Theil tersebut dapat dibagi atau diurai menjadi dua subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional (Ying, 2000). Dengan menggunakan alat analisis Indeks Entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Badau karena pengaruh perkebunan kelapa sawit. Rumus dari indeks Entropi Theil adalah sebagai berikut :

$$I(y) = \sum (y_j / Y) \times \log [(y_j / Y) / (x_j / X)]$$

Rumus indeks Entropi Theil tersebut sering digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi regional, ketimpangan sektor manufaktur regional, dan ketimpangan dalam distribusi pengeluaran rumah tangga.

Berikut adalah rumus Indeks Entropi Theil yang diterapkan dalam mengukur indeks ketimpangan ekonomi regional :

$$I(y) = \sum (y_j / Y) \times \log [(y_j / Y) / (x_j / X)]$$

Keterangan :

$I(y)$ = Indeks Entropi Theil

y_j = PDRB Per kapita Kabupaten/ Kota j

Y = Rata-rata PDRB Per kapita Provinsi

x_j = Jumlah penduduk Kabupaten/ Kota j

X = Jumlah penduduk Provinsi

(Ying, 2000).

Berikut penerapan rumus indeks Entropi Theil untuk mengukur ketimpangan sektor manufaktur (pola konsentrasi) regional dengan rumus:

$$I(y) = \sum y_i \log \frac{y_i}{N}$$

Keterangan :

$I(y)$ = Indeks ketimpangan regional untuk seluruh Indonesia

y_i = Pangsa penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur provinsi I terhadap Indonesia

N = Jumlah provinsi di Indonesia

(Kuncoro, 2004)

Berikut penerapan rumus indeks Entropi Theil dalam mengukur ketimpangan distribusi pengeluaran rumah tangga :

$$I(y) = \sum (y_{ij}/ Y) x \log [(y_{ij}/ Y)/ (n_{ij}/ X)]$$

Keterangan :

y_{ij} = total pengeluaran rumah tangga di kelas j dalam grup i

Y = total pengeluaran rumah tangga

n_j = jumlah rumah tangga kelas j dalam grup i

n = jumlah seluruh rumah tangga

(Akita, dkk, 1999)

2.5 PDB Harga Berlaku dan Harga Konstan

Nilai PDB suatu periode tertentu sebenarnya merupakan hasil perkalian antara harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan. PDB 2007 adalah hasil perkalian antara harga barang tahun 2007 dengan jumlah barang yang diproduksi tahun 2007. Misalnya dalam perekonomian yang hanya memproduksi satu jenis produk, yaitu baju. Selama tahun 2007 diproduksi sebanyak 1.000 potong baju. Bila harga baju per potong Rp 120,00 maka PDB 2007 besarnya adalah Rp 120.000,00. Jika PDB tahun 2006 nilainya Rp 100.000, dapatkah diambil kesimpulan bahwa perekonomian tahun 2007 lebih baik dibanding tahun 2006, karena nilai PDB 2007 lebih besar daripada PDB tahun 2006 ? atau dapatkah dikatakan telah

terjadi pertumbuhan *output* sebesar 20% per tahun? Dalam hal ini kita harus berhati-hati! Nilai PDB yang lebih besar tidaklah berarti jumlah *output* otomatis lebih besar. Perekonomian 2007 dikatakan lebih baik dibandingkan perekonomian 2006, bila jumlah *output* yang dihasilkan di tahun 2007 lebih banyak dibandingkan tahun 2006.

Seandainya harga sepotong baju pada tahun 2006 adalah Rp 80,00 maka jumlah pakaian yang diproduksi pada tahun 2006 adalah (Rp 100.000,00 : Rp 80,00) unit, atau sama dengan 1.250 unit. Ternyata, walaupun nilai PDB 2007 lebih besar daripada nilai PDB 2006, namun *output*nya lebih sedikit. Menggelembungnya nilai PDB 2007 lebih disebabkan oleh naiknya harga baju selama tahun 2007 dari Rp 80,00 menjadi Rp 120,00 per potong. Kenaikan harga sebesar 50%.

Contoh di atas menunjukkan bahwa perhitungan PDB dengan menggunakan harga berlaku dapat memberi hasil yang menyesatkan, karena pengaruh inflasi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat, maka perhitungan PDB sering menggunakan perhitungan berdasarkan harga konstan. Hasil perhitungan ini menghasilkan nilai PDB atas dasar harga konstan. Yang dimaksud dengan harga konstan adalah harga yang dianggap tidak berubah.

Untuk memperoleh PDB harga konstan, kita harus menentukan tahun dasar (*based year*), yang merupakan tahun dimana perekonomian berada dalam kondisi baik/ stabil. Harga barang pada tahun tersebut kita gunakan sebagai harga konstan. Dalam kasus di atas, bila kondisi tahun 2006 dianggap sebagai kondisi yang relatif baik, maka harga baju tahun 2006 digunakan sebagai harga dasar. Dengan demikian nilai PDB 2007 berdasarkan harga konstan 2006 adalah :

$$\begin{aligned} \text{PDB}_{2007} &= Q_{2007} \times P_{2006} \\ &= 1.000 \times \text{Rp } 80,00 = \text{Rp } 80.000,00 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, dengan menghilangkan pengaruh inflasi karena menggunakan harga konstan, terlihat bahwa *output* 2007 ternyata lebih sedikit daripada *output* 2006. Nilai PDB 2007 ini disebut sebagai PDB riil (*riel GDP*). Sedangkan PDB 2007 sebesar Rp 120.000,00 (yang dihitung

atas dasar harga berlaku) disebut sebagai PDB nominal. (Rahardja dan Manurung, 2008).

2.6 Pendapatan Regional

Menurut Tarigan (2005), pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan regional adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB tidak lepas dari nilai-nilai PDRB per sektor yang menjadi pembentuk PDRB secara umum. Sama halnya dengan pendapatan regional secara umum tidak lepas dari pendapatan regional tiap sektor. Nilai PDRB subsektor perkebunan atau nilai pendapatan regional subsektor perkebunan bila dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang mengusahakan tanaman perkebunan, maka diperoleh sumbangan pendapatan per kapita bagi tenaga kerja yang mengusahakan tanaman perkebunan. (Dinas Perkebunan Jawa Timur, 2011).

Angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Kenaikan/ penurunan dapat dibedakan menjadi dua faktor berikut :

- a. Kenaikan/ penurunan riil, yaitu kenaikan atau penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat, misalnya mampu membeli barang yang sama kualitasnya dalam jumlah yang lebih banyak.
- b. Kenaikan/ penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan inflasi (menurunnya nilai beli uang) maka walaupun pendapatan meningkat tetapi jumlah barang yang mampu dibeli belum tentu meningkat. Perlu dilihat mana yang meningkatnya lebih tajam, tingkat pendapatan atau tingkat harga.

Oleh karena itu, untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil), faktor inflasi harus dikeluarkan terlebih dahulu. Pendapatan regional yang didalamnya masih ada unsur inflasi dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku. Sedangkan pendapatan regional dengan meniadakan faktor inflasi dinamakan pendapatan regional atas dasar harga konstan.

Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar untuk penentuan harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dari kenaikan harga konstan. (Tarigan, 2005).

2.7 Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq.*) merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting di sektor pertanian umumnya, dan sektor perkebunan khususnya. Hal ini disebabkan dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektarnya di dunia (Balai Informasi Pertanian, 1990). Sedangkan Menurut Departemen Pertanian (1997) Kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq.*) adalah tanaman keras yang tergolong famili palmae yang merupakan salah satu penghasil minyak nabati yang bermanfaat luas dan memiliki keunggulan dibandingkan minyak nabati lainnya. Minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit banyak dipergunakan sebagai bahan baku untuk industri margarin, makanan berlemak, dan sabun. Bahkan saat ini diarahkan sebagai bahan baku minyak bakar.

Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh di daerah yang terletak antara garis lintang 12° LU dan 12° LS dengan ketinggian tempat mulai dari garis pantai sampai dengan 400 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya menurut Mangoensoekarjo dan Semangun (2005) menambahkan bahwa pada ketinggian lebih dari 500 mdpl kelapa sawit dapat tumbuh dan berproduksi namun produksinya rendah. Fluktuasi iklim dan curah hujan merupakan penyebab adanya fluktuasi produksi yang terjadi pada semua kelompok umur tanaman.

Dalam segi iklim, tanaman ini dapat tumbuh optimal di suhu 24⁰C – 28⁰C. Hal ini mengakibatkan *supply* kelapa sawit dunia saat ini sangat terbatas dan diperkirakan hanya 2% dari belahan lahan di dunia (Departemen Pertanian, 1986).

2.7.1 Peranan Kelapa Sawit Dalam Perekonomian Indonesia

Kelapa sawit merupakan salah satu budidaya perkebunan yang penting, bukan saja sebagai komoditi ekspor, tetapi telah menjadi substitusi minyak kelapa konsumsi dalam negeri yang sangat potensial. Di Indonesia, kelapa sawit berperan dalam berbagai hal, diantaranya :

1. Minyak kelapa sawit merupakan bahan baku utama minyak goreng, sehingga pasokan yang terus menerus ikut menjaga kestabilan harga dari minyak goreng tersebut. Hal ini sangat penting karena minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga harganya harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Sebagai salah satu komoditas pertanian andalan ekspor non migas, komoditi ini mempunyai prospek yang baik sebagai sumber dalam perolehan devisa maupun pajak.
3. Dalam proses produksi maupun pengolahan juga mampu menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2005).

2.7.2 Proses Produksi Kelapa Sawit

Terdapat lima (5) proses dalam memproduksi kelapa sawit, yaitu :

a. *Pembukaan Lahan (Land Clearing)*

Perkebunan kelapa sawit dapat dibangun di daerah bekas hutan, daerah bekas alang-alang, atau bekas perkebunan. Daerah-daerah tersebut memiliki topografi yang berbeda-beda. Namun, yang perlu diperhatikan dalam permukaan areal perkebunan adalah tetap terjaganya lapisan olah tanah. Selain itu, harus memperhatikan urutan pekerjaan, alat, dan teknik pelaksanaannya. Sebelum melakukan pembukaan lahan terlebih dahulu dilakukan identifikasi vegetasi yang ada pada lahan tersebut. Dari data yang ada maka dapat ditentukan apakah pembukaan lahan dilakukan

secara manual, manual – mekanis atau secara mekanis saja. Pembukaan areal perkebunan kelapa sawit pada daerah alang-alang dapat dilakukan dengan cara mekanis dan khemis, secara mekanis dilakukan dengan cara membajak dan menggaru, secara khemis dilakukan dengan menyemprot alang-alang dengan racun antara lain Dalapon atau Glyphosate. Pembukaan kelapa sawit juga bisa dengan cara konversi yaitu membuka areal perkebunan dari bekas perkebunan lain.

Terdapat dua (2) teknik dalam pembukaan lahan, yaitu :

1. Teknik *Slash and Burn*

Teknik *Slash and Burn* merupakan metode yang sering digunakan dan diaplikasikan dalam pembukaan lahan hutan (*Forest Land Clearing*) untuk dijadikan penggunaan lahan lain selain hutan. Menurut Van Noordwijk, dkk (2001) penggunaan metode *slash and Burn* sangat umum digunakan dalam sistem perladangan berpindah dan untuk mengkonversi hutan alam ke tanaman perkebunan, seperti karet dan kelapa sawit. Pola umum pembukaan lahan dengan teknik *Slash and Burn* diawali dengan penebangan dan penebasan seluruh vegetasi dikeringkan secara alami, setelah kering baru dilanjutkan dengan pembakaran. Pada masyarakat tradisional dalam praktek perladangan berpindah, penebangan vegetasi dilakukan secara manual dengan alat utama berupa kampak dan parang, sehingga prestasi kerjanya jauh lebih rendah dibandingkan secara mekanis. Pengeringan vegetasi yang sudah ditebang dan ditebas tersebut hanya mengandalkan musim kemarau, sehingga pembukaan lahan harus memperhatikan kondisi cuaca, karena cuaca merupakan faktor yang sangat menentukan. Pembakaran dilakukan setelah vegetasi dianggap sudah kering. Setelah semua biomassa tersebut terbakar barulah lahan dapat digunakan baik untuk pemukiman maupun lahan produksi, seperti pertanian, perkebunan, hutan tanaman industri dan sebagainya.

2. Teknik Tanpa Bakar

Pembukaan lahan dengan teknik *Slash and Burn* memiliki dampak yang bersifat global apalagi jika dilakukan dalam skala yang luas. Akhirnya dilakukan pencarian alternatif pengganti dengan teknik tanpa

bakar. Menurut Van Noordwijk, dkk (1995) mengusulkan teknik *Slash and Mulch*, dimana vegetasi yang ditebang tidak dibakar, namun ditumpuk dan dibiarkan terdekomposisi secara alami dan berfungsi sebagai mulsa. Menurut Taryoto dkk, dalam Onrizal (2005) Teknik ini juga hampir sama dengan teknik yang dikemukakan oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman, yaitu teknik *cutting-chipping-decomposition* (CCD) *process*. Penerapan teknik tanpa bakar dalam pembukaan lahan hutan untuk berbagai tujuan mengandung dua kegiatan utama, yaitu penebangan, dan penumpukkan. Penebangan bisa dilakukan secara manual atau secara mekanis tergantung kondisi tegakan pada lahan yang akan dibuka. Sedangkan penumpukkan sangat mengandalkan cara mekanis. Penumpukkan secara mekanis bertujuan untuk memastikan agar pencabutan tunggul dapat dilaksanakan lebih cepat dan lebih sempurna dibandingkan cara manual. Apabila pencabutan tunggul tidak sempurna, maka tunas akan cepat muncul dari tunggul-tunggul tersebut. Penumpukkan yang segera dilaksanakan setelah penebangan lebih disukai terutama bila daun-daun belum lepas dari tangkainya. Cara mekanis tersebut memberikan keuntungan tambahan karena volume bahan organik meningkat (Majid, 1997).

b. Pembibitan

Pembibitan merupakan awal kegiatan lapangan yang harus dimulai paling lambat satu tahun sebelum penanaman di lapangan. Standar yang biasa dilakukan, kapasitas pembibitan 1 ha kelapa sawit dapat menyediakan bibit tanaman untuk kebun seluas 71 ha. Lokasi pembibitan harus mendapat perhatian, terutama hal-hal sebagai berikut:

- dekat dengan sumber air
- bebas genangan air atau banjir
- dekat dari pengawasan, mudah dikunjungi
- tidak jauh dari areal yang akan ditanami
- tidak terlalu jauh dengan sumber tanah (*top soil*) untuk mengisi polibag.

Untuk memperoleh bibit yang berasal dari biji dapat dilakukan dengan mengusahakan sendiri atau memesan ke produsen resmi bibit kelapa sawit

yang telah ditunjuk pemerintah. Kegiatan mengusahakan bibit kelapa sawit dimulai dengan melakukan seleksi biji, mencembahkan, menyemai, dan membibitkannya.

Pada dasarnya dikenal dua sistem pembibitan yaitu sistem pembibitan ganda (*double stage system*) dan sistem pembibitan tunggal (*single stage system*). Pada penerapan sistem tahap ganda, penanaman bibit dilakukan sebanyak dua kali. Tahap pertama disebut pembibitan pendahuluan, yaitu kecambah ditanam dengan menggunakan plastik polibag kecil sampai bibit berumur 3 bulan, kemudian tahap kedua bibit tersebut ditanam ke pembibitan utama yang menggunakan plastik polibag besar selama 9 bulan. Pada sistem pembibitan tahap tunggal, bibit langsung ditanam di dalam plastik polibag besar hingga berumur 12 bulan tanpa harus ditanam di dalam plastik polibag kecil. Pada prinsipnya sistem manapun yang dipilih tujuannya sama, yaitu untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dengan daya tahan tinggi dan kemampuan adaptasinya yang besar sehingga faktor kematian bibit di pembibitan dan setelah di lapangan dapat ditekan.

Pekerjaan yang dilakukan pada pembibitan ini meliputi:

- 1) Pembuatan pembibitan awal (0 – 3 bulan), meliputi pekerjaan : persiapan lahan dan perataan lahan, pengadaan alat dan bahan, pembuatan naungan, pembuatan jaringan irigasi dan penanaman.
- 2) Pembuatan pembibitan utama (3 – 12 bulan), meliputi pekerjaan : persiapan lahan dan perataan lahan, pengadaan alat dan bahan, pemindahan tanaman dari plastik kecil ke plastik besar, pengaturan jarak, dll.
- 3) Pemeliharaan tanaman meliputi : pemupukan, penyiraman, pengendalian hama penyakit, penyiangan gulma, dan seleksi bibit.

c. *Penanaman*

Tahapan pekerjaan penanaman adalah sebagai berikut :

- 1) Pembuatan Lubang Tanam

Pembuatan lubang tanam dapat dilakukan satu minggu sebelum penanaman. Pembuatan lubang tanam lebih satu minggu akan

memungkinkan tertimbunnya kembali sebagian lubang yang sudah digali dengan tanah yang berada di sekitar galian lubang itu sendiri. Hal ini dapat mengurangi produktivitas tenaga kerja penanaman bibit, karena tenaga kerja harus mengulang kembali penggalian lubang yang telah tertimbun. Begitu pula sebaliknya, penggalian lubang tanam yang terlalu cepat atau kurang dari satu minggu juga tidak dianjurkan karena semakin kecil persiapan untuk mengantur ukuran dan posisi lubang dengan benar. Pembuatan lubang tanam berbeda untuk tanah mineral dan tanah gambut.

2) Penyeleksian bibit tanaman

Bibit tanaman terlebih dahulu diseleksi sebelum dipindahkan terutama dari segi umur dan tinggi bibit. Penyeleksian bibit dimaksudkan agar bibit yang akan ditanam merupakan bibit yang tahan terhadap hama dan penyakit, serta memiliki produktivitas yang tinggi. Umur bibit yang akan ditanam di lapangan tidak sama di semua tempat. Hal ini disebabkan oleh iklim yang mempengaruhinya. Pindahan bibit pada umur yang tidak tepat dapat menyebabkan kematian. Bibit dengan umur 12 - 14 bulan adalah yang terbaik untuk dipindahkan. Bibit yang berumur kurang dari 6 bulan tidak tahan terhadap hama dan penyakit. Sebaliknya, jika melebihi akan menambah biaya penanaman dan waktu tanam. Walaupun umurnya sama, tinggi bibit di pembibitan tidak seragam. Tinggi bibit yang dianjurkan berkisar 70 - 180 cm. Bibit yang tingginya kurang dari ukuran yang dianjurkan akan menurunkan produksi, sedangkan yang terlalu tinggi, produksinya tidak lebih tinggi dibandingkan tanaman yang berasal dari bibit yang dianjurkan.

d. Pemeliharaan Tanaman

Pada tanaman kelapa sawit dibedakan menjadi dua fase, yaitu tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM). Pada masa TBM merupakan masa pemeliharaan yang banyak memerlukan tenaga dan biaya, karena pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari pembukaan lahan dan persiapan tanaman, selain itu pada masa ini sangat menentukan keberhasilan pada masa TM. Pekerjaan-pekerjaan dalam pemeliharaan tanaman TBM adalah sebagai berikut:

- 1) Konsolidasi,
- 2) Pemeliharaan jalan, benteng, teras, parit dan lain-lain,
- 3) Penyulaman,
- 4) Pengendalian gulma,
- 5) Pemupukan
- 6) Pemeliharaan tanaman penutup tanah,
- 7) Kastrasi/ablasi
- 8) Penyerbukan (polinasi),
- 9) Pengendalian hama dan penyakit.

Pemeliharaan kelapa sawit pada TM pada dasarnya hampir sama dengan pemeliharaan TBM. Kegiatan pada TM meliputi pemeliharaan jalan, teras tanggul, pemangkasan pelepah daun, konsolidasi dan inventarisasi, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit serta pemupukan.

e. Panen dan Produksi

1. Umur Panen

Kelapa sawit berbuah setelah berumur 2,5 tahun dan buahnya masak 5,5 bulan setelah penyerbukan. Kelapa sawit dapat dipanen jika tanaman berumur 31 bulan, sedikitnya 60 % buah telah matang panen, dari 5 pohon terdapat 1 tandan buah matang panen. Satu tandan beratnya berkisar 10 kg lebih.

2. Cara Panen

- a) Tandan matang dipanen semuanya dengan kriteria 25 - 75 % buah luar memberondol atau
- b) Kurang matang dengan 12,5 - 25 % buah luar memberondol
- c) Potong pelepah daun yang menyangga buah
- d) Tandan dipotong
- e) Bertanda dibekas potongan dengan nama atau tanggal panen
- f) Tumpuk pelepah daun yang dipotong secara teratur di gawangan dengan cara ditelungkupkan.

3. Periode Panen

Panen dilakukan 5 hari dalam seminggu, 2 hari untuk pemeliharaan alat. Tingkat produksi dipengaruhi kualitas tanaman, kesuburan tanah, keadaan iklim, umur tanaman, pemeliharaan tanaman dan serangan hama - penyakit. Contoh kapasitas produksi kelapa sawit jenis dura:

1. Umur tanaman 4 tahun hasil minyak = 500 kg/ha, hasil inti = 100 kg/ha
2. Umur tanaman 6 tahun hasil minyak = 1.000 kg/ha, hasil inti = 200 kg/ha
3. Umur tanaman 8 tahun hasil minyak = 1.600 kg/ha, hasil inti = 320 kg/ha
4. Umur tanaman 10 tahun hasil minyak= 2000 kg/ha, hasil inti = 400 kg/ha
5. Umur tanaman 12 tahun hasil minyak = 2250 kg/ha, hasil inti = 450 kg/ha.

Pada dasarnya, ada dua macam hasil olahan utama TBS di pabrik yaitu minyak sawit yang merupakan hasil pengolahan daging buah dan minyak inti sawit yang dihasilkan dari ekstraksi inti sawit. Secara ringkas, tahap-tahap proses pengolahan TBS sampai dihasilkan minyak diuraikan sebagai berikut:

1. Pengangkutan TBS ke Pabrik
2. Perebusan TBS
3. Perontokan dan Pelumatan Buah
4. Pemerasan atau Ekstraksi Minyak Sawit
5. Pemurnian dan Penjernihan Minyak Sawit
6. Pengeringan dan Pemecahan Kulit
7. Pemisahan Inti Sawit dari Tempurung

2.8 Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan

Menurut Sensus Penduduk (2000), yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/ instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan usaha/ pekerjaan ini dibagi dalam 10 golongan, yaitu:

- Sektor Pertanian yang dikategorikan lagi menjadi subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor pertanian lainnya.
- Sektor Pertambangan dan penggalian
- Sektor industri pengolahan
- Listrik, gas, dan air
- Bangunan
- Perdagangan, rumah makan dan hotel
- Angkutan, penyimpanan, dan komunikasi
- Keuangan, asuransi, dan perdagangan benda tak bergerak
- Jasa-jasa kemasyarakatan, sosial, dan pribadi
- Kegiatan yang tidak atau belum jelas

Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang atau pernah dilakukan oleh orang-orang yang termasuk golongan bekerja atau orang-orang yang mencari pekerjaan dan pernah bekerja.

Jenis pekerjaan dibagi dalam 8 golongan, yaitu :

- Tenaga profesional, teknisi, dan tenaga lainnya
- Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan
- Tenaga administrasi, tenaga tata usaha dan tenaga yang berhubungan dengan tenaga itu.
- Tenaga penjualan
- Tenaga usaha jasa
- Tenaga usaha pertanian, dsb
- Tenaga produksi dan sejenisnya, dan operator alat-alat pengangkutan
- Lain-lainnya (termasuk ABRI).

2.9 Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Bukan Angkatan Kerja

2.9.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yaitu penduduk yang berada pada usia 15-64 tahun, tetapi kebiasaan yang dipakai di Indonesia adalah seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (berdasarkan hasil sensus

penduduk tahun 1971 dan 1980). Jadi, tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

2.9.2 Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Secara demografis besarnya angkatan kerja tergantung dari partisipasi angkatan kerja (*Labour Force Participation Rate*), yaitu berapa persen dari tenaga kerja yang menjadi angkatan kerja.

Kelompok angkatan kerja yang digolongkan bekerja adalah :

- a. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan dan keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit dua hari.
- b. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari tetapi mereka adalah :
 - Pekerja tetap, pegawai-pegawai pemerintah atau swasta yang tidak sedang masuk kerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, dan sebagainya.
 - Petani- petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya.
 - Orang-orang yang bekerja dalam bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, dan sebagainya.

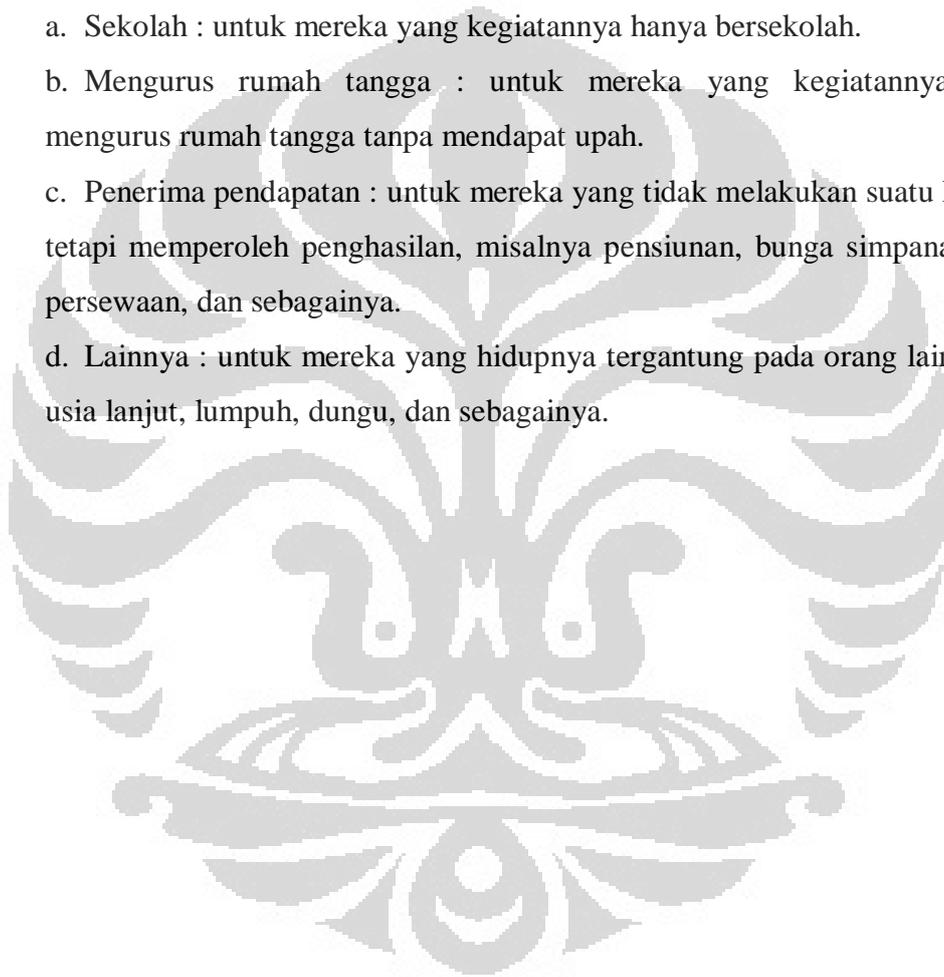
Angkatan kerja yang digolongkan mencari pekerjaan adalah :

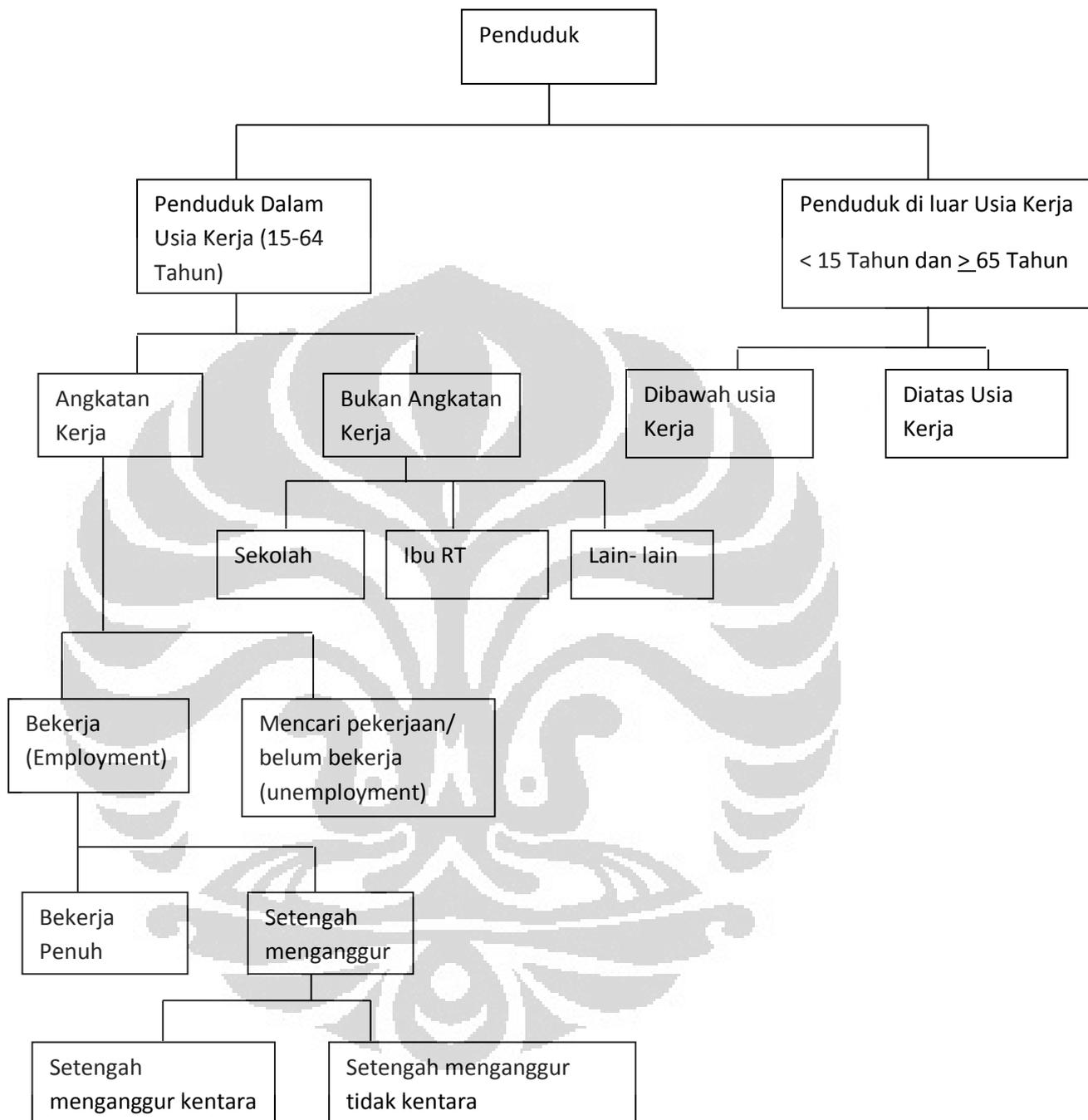
- a. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang bekerja, pada saat pencacahan sedang menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan.
- c. Mereka yang dibebastugaskan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

2.9.3 Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya dan tidak melakukan sesuatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja contohnya adalah :

- a. Sekolah : untuk mereka yang kegiatannya hanya bersekolah.
- b. Mengurus rumah tangga : untuk mereka yang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah.
- c. Penerima pendapatan : untuk mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan tetapi memperoleh penghasilan, misalnya pensiunan, bunga simpanan, hasil persewaan, dan sebagainya.
- d. Lainnya : untuk mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain karena usia lanjut, lumpuh, dungu, dan sebagainya.





Gambar 2.1 Bagan Penduduk dan Tenaga Kerja

[Sumber : Lembaga Demografi FE UI]

2.10 Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit

Untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit membutuhkan tenaga kerja cukup banyak. Secara normatif standar kebutuhan tenaga kerja untuk

pengembangan kelapa sawit dihitung sejak pembukaan lahan, penanaman tanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Kebutuhan tenaga kerja tersebut tiap tahun berbeda-beda. Pada awalnya relatif sedikit kemudian semakin lama semakin bertambah dan kemudian sampai saat tertentu menurun kembali, dan kemudian stabil. Secara normatif standar kebutuhan tenaga kerja untuk pengembangan kebun kelapa sawit per hektar seperti Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Norma Standar Kebutuhan Tenaga Kerja dalam Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Per Hektar

No.	Pekerjaan	HOK	Keterangan
1	Pembukaan lahan	29	<ul style="list-style-type: none"> - Asumsi produksi TBS 25.000 Kg/ tahun - TBM = Tanaman Belum Menghasilkan - Rata-rata kebutuhan buruh tani berdasarkan jenis pekerjaan sejak pembukaan lahan sampai pasca panen 0,01 orang/ Ha
2	Penanaman tanaman penutup tanah	28	
3	Penanaman kelapa sawit	39	
4	Pemeliharaan TBM 1	39	
5	Pemeliharaan TBM 2	39	
6	Pemeliharaan TBM 3	39	
7	Pembuatan jalan dan pengeras jalan	13	
8	Perawatan tanaman menghasilkan	30	
9	Panen dan pasca panen	24	
	Jumlah	280	

[Sumber : Lalang Buana 2002 dalam Pandiadi, dkk, 2009]

2.11 Hubungan Aksesibilitas dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melalui transportasi. Menurut Bintarto (1989) Salah satu variabel yang dapat dinyatakan apakah tingkat aksesibilitas itu tinggi atau rendah dapat dilihat dari banyaknya sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut. Semakin banyak sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut

maka semakin mudah aksesibilitas yang didapat begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat aksesibilitas yang didapat maka semakin sulit daerah itu dijangkau dari daerah lainnya. Tingkat aksesibilitas wilayah juga bisa diukur berdasarkan pada beberapa variabel yaitu ketersediaan jaringan jalan, jumlah alat transportasi, panjang, lebar jalan, kualitas jalan, dan jarak.

Adanya aksesibilitas ini diharapkan dapat mengatasi beberapa hambatan mobilitas, baik berhubungan dengan mobilitas fisik, misalnya mengakses jalan raya, pertokoan, gedung perkantoran, sekolah, pusat kebudayaan, lokasi industri dan rekreasi baik aktivitas non fisik seperti kesempatan untuk bekerja, memperoleh pendidikan, mengakses informasi, mendapat perlindungan dan jaminan hukum.

2.12 Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sutarno dan Kucoro, Mudrajat. 2003. Dalam penelitian Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 1993- 2000. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan perbedaan tingkat pembangunan yang membawa pada ketimpangan ekonomi antar daerah. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah telah terjadi peningkatan ketimpangan pada periode 1993- 2000 baik dengan analisis Indeks Williamson maupun Indeks Entropi Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. Variabel yang digunakan adalah PDRB dan jumlah penduduk.
2. Suharto. 2002. Dalam penelitian Disparitas dan Pola Spesialisasi Tenaga Kerja Industri Regional 1993-1996 dan Prospek Pelaksanaan Otonomi. Dalam rangka mengembangkan daerah dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka daerah akan mengembangkan sektor-sektor perekonomian sesuai keunggulannya,

salah satunya sektor industri untuk melihat ketimpangan digunakan metode analisis Indeks Ketimpangan regional (indeks Entropi Theil), Indeks Spesialisasi Regional dan Koefisien Gini. Kesimpulan yang didapat adalah mengacu pada kinerja pembangunan orde baru yang sentralistis, logikanya menghasilkan dampak pemerataan yang baik meskipun spesialisasi menjadi berkurang. Tetapi pada kenyataan menunjukkan bahwa spesialisasi tidak baik sekaligus pemerataan juga tidak baik. Oleh sebab itu era otonomi daerah yang sangat menekankan pembangunan desentralistis yang logikanya menghasilkan pembangunan yang efisien (spesialisasi tinggi) dapat saja tidak menghasilkan apa yang diinginkan apabila segala prasyarat yang diperlukan tidak ada. Variabel yang digunakan adalah tenaga kerja dan perusahaan manufaktur sedang dan menengah.

3. Mulyanto Sudarmono. 2006. Dalam penelitian Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar daerah di Wilayah Pembangunan 1 Jawa Tengah. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP), pengurangan kesenjangan pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Kesimpulan yang di dapat adalah Terjadinya kecenderungan peningkatan nilai indeks Enthropi Theil maupun nilai Indeks Williamson mengandung arti bahwa ketimpangan yang terjadi di wilayah pembangunan I Jawa Tengah semakin membesar atau semakin tidak merata. Kota Semarang masih mendominasi nilai PDRB dan nilai pendapatan per kapita, sementara kelima daerah yang lain jauh lebih rendah. Variabel yang digunakan adalah Pendapatan per kapita dan jumlah penduduk.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang terdiri dari sembilan desa. Desa-desa tersebut adalah Desa Badau, Desa Janting, Desa Semuntik, Desa Kekurak, Desa Pulau Majang, Desa Seriang, Desa Tinting Seligi, Desa Sebindang, dan Desa Tajum.

3.2 Variabel Penelitian

Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Kecamatan Badau terdiri dari alang-alang, hutan belukar, hutan lebat, kebun campuran, perkebunan besar, perkebunan rakyat, permukiman, sawah, semak, sungai/ danau, dan tegalan.

Variabel penggunaan tanah di dalam wilayah penelitian difokuskan pada penggunaan tanah perkebunan kelapa sawit.

2. Penduduk

Dalam penelitian ini penduduk yang diteliti adalah penduduk yang sudah tinggal di Kecamatan Badau sebelum adanya perkebunan kelapa sawit adalah penduduk yang berada dalam angkatan kerja yaitu berusia 15- 64 tahun yang bekerja di perkebunan kelapa sawit.

3. Aksesibilitas

Dalam penelitian ini yang menjadi faktor pengukur dari aksesibilitas adalah jaringan jalan dan jarak. Jaringan jalan yang dimaksud adalah kondisi jalan yang terdapat di Kecamatan Badau yaitu jalan aspal, jalan diperkeras, dan jalan tanah. Sedangkan jarak yang dimaksud adalah jarak riil yaitu jarak yang dilalui tenaga kerja untuk menuju lokasi perkebunan kelapa sawit.

4. Pendapatan rata-rata tenaga kerja subsektor perkebunan kelapa sawit adalah pendapatan desa dari subsektor perkebunan kelapa sawit berdasarkan harga konstan dibagi jumlah tenaga kerja di desa tersebut.

3.3 Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil pengamatan di lapangan didapat dari survei lapang berupa wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder didapat dari studi literatur dan instansi terkait.

3.3.1 Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan pada saat survey lapang. Kegiatan yang dilakukan pada proses survei lapang, yaitu :

1. Melakukan wawancara terhadap informan dan responden

Metode yang digunakan dalam wawancara adalah metode pengambilan populasi daerah (area), pengambilan populasi dilakukan dengan melihat penggunaan tanah permukiman. Dari informan diperoleh data tentang asal desa tenaga kerja perkebunan kelapa sawit. Informan terdiri atas Camat Badau, staf perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau, dan sebagian tenaga kerja perkebunan kelapa sawit yang merupakan penduduk Kecamatan Badau.

2. Pengamatan langsung

Pengamatan langsung merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan sendiri oleh peneliti seperti foto perkebunan kelapa sawit, foto tenaga kerja dan jaringan jalan yang dilalui oleh tenaga kerja perkebunan kelapa sawit.

3.3.2 Data Sekunder

Jenis data sekunder yang termasuk kedalam penelitian adalah jenis data yang diperoleh dari lembaga institusi pemerintah dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data- data tersebut adalah :

1. Data penduduk Kecamatan Badau per desa berdasarkan umur dan jenis kelamin, sehingga dapat terlihat penduduk yang termasuk usia produktif dan bukan usia produktif. Di dapat dari Data Monografi Kecamatan Badau Tahun 2009, 2010, dan 2011.
2. Data tenaga kerja perkebunan kelapa sawit untuk mengetahui jumlah penduduk Kecamatan Badau yang bekerja di Perkebunan kelapa sawit Kecamatan Badau Tahun 2009, 2010, dan 2011.
3. Data statistik berupa Kecamatan Badau dalam angka tahun 2009, 2010, dan 2011 yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Peta- peta yang digunakan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun jenis peta yang diperlukan penulis yaitu peta administrasi Kecamatan Badau, Peta Penggunaan Tanah Kecamatan Badau, dan Peta Jaringan Jalan dan Jaringan Sungai Kecamatan Badau.

3.4 Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah menggunakan *software* Arc GIS 9.3 untuk menghasilkan peta-peta yang dibutuhkan. Dalam mengolah data dilakukan beberapa tahap yaitu :

1. Mengklasifikasikan tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit berdasarkan desa dan jenis pekerjaannya (tenaga kerja lapangan atau kantor).
2. Membuat peta kerja untuk menentukan lokasi persebaran tenaga kerja
 - a. Membuat peta administrasi wilayah penelitian
 - b. Membuat peta wilayah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit dengan memindahkan koordinat lokasi yang didapat melalui survei lapang dari GPS ke dalam komputer (*plotting*).

3. Membuat peta variabel penelitian
 - a. Pembuatan peta jarak yang dibagi menjadi tiga kelas. Jarak ditentukan dari lokasi perkebunan kelapa sawit ke lokasi pemukiman tenaga kerja dengan menarik garis lurus dari lokasi perkebunan kelapa sawit ke pemukiman tenaga kerja. Tetapi dalam menganalisis menggunakan jarak riil yaitu jarak yang diukur dengan mengukur jalan yang biasa dilalui tenaga kerja perkebunan kelapa sawit menuju lokasi perkebunan kelapa sawit. Interval tiap tingkat jarak diperoleh dari rumus berikut :

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Jarak terjauh} - \text{Jarak terdekat}}{\text{Jumlah kelas yang diinginkan}}$$
 - b. Pembuatan peta jaringan jalan. Peta jaringan jalan ini digunakan untuk mengetahui kondisi jalan yang dilalui oleh tenaga kerja perkebunan kelapa sawit Kecamatan Badau.
 - c. Pembuatan peta pendapatan desa dari subsektor perkebunan kelapa sawit. Pendapatan desa didapat dengan cara menjumlah pendapatan personal (tenaga kerja) yang bekerja di perkebunan kelapa sawit selama satu tahun di desa tersebut..
4. Pembuatan peta pendapatan rata-rata tenaga kerja subsektor perkebunan kelapa sawit.
5. Menghitung ketimpangan wilayah (desa) dengan menggunakan rumus Indeks Entropi Theil

$$I(y) = \sum (y_j / Y) \times \log [(y_j / Y) / (x_j / X)]$$

$I(y)$ = Indeks Entropi Theil

y_j = Pendapatan rata-rata tenaga kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Desa j

Y = Rata-rata y_j

x_j = Jumlah tenaga kerja subsektor perkebunan kelapa sawit Desa j

X = Jumlah tenaga kerja subsektor perkebunan kelapa sawit Kecamatan

- Untuk menghitung pendapatan desa subsektor perkebunan kelapa sawit dengan menjumlah pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di desa tersebut
- Untuk menghitung pendapatan desa subsektor perkebunan kelapa sawit berdasarkan harga konstan, dengan cara :

$$\text{Pendapatan(tahun } t) = \text{Quantities (tahun } t) \times \text{Price (tahun 2000)}$$

(Rahardja dan Manurung, 2008). Dalam penelitian ini menggunakan harga beras sebagai harga konstan karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang selalu dibeli oleh masyarakat atau penduduk di Indonesia dan Tahun 2000 digunakan sebagai tahun dasar karena perekonomian Indonesia pada tahun 2000 berada dalam keadaan baik dan stabil.

- Setelah didapat pendapatan subsektor perkebunan kelapa sawit tiap desa berdasarkan harga konstan, dapat dihitung pendapatan rata-rata tenaga kerja subsektor perkebunan kelapa sawit (y_j) dengan rumus :

$$y_j = \frac{\text{pendapatan atas dasar harga konstan subsektor perkebunan kelapa sawit desa } j}{\text{jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit desa } j}$$

- Kemudian untuk menghitung rata-rata dari pendapatan rata-rata tenaga kerja subsektor perkebunan kelapa sawit (y_j) subsektor perkebunan kelapa sawit kecamatan dengan rumus :

$$Y = \frac{\sum y_j}{\text{Jumlah desa}}$$

6. Membuat peta hasil berupa peta ketimpangan pendapatan tenaga kerja subsektor perkebunan kelapa sawit tiap tahun (Tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011).

3.5 Analisis Data

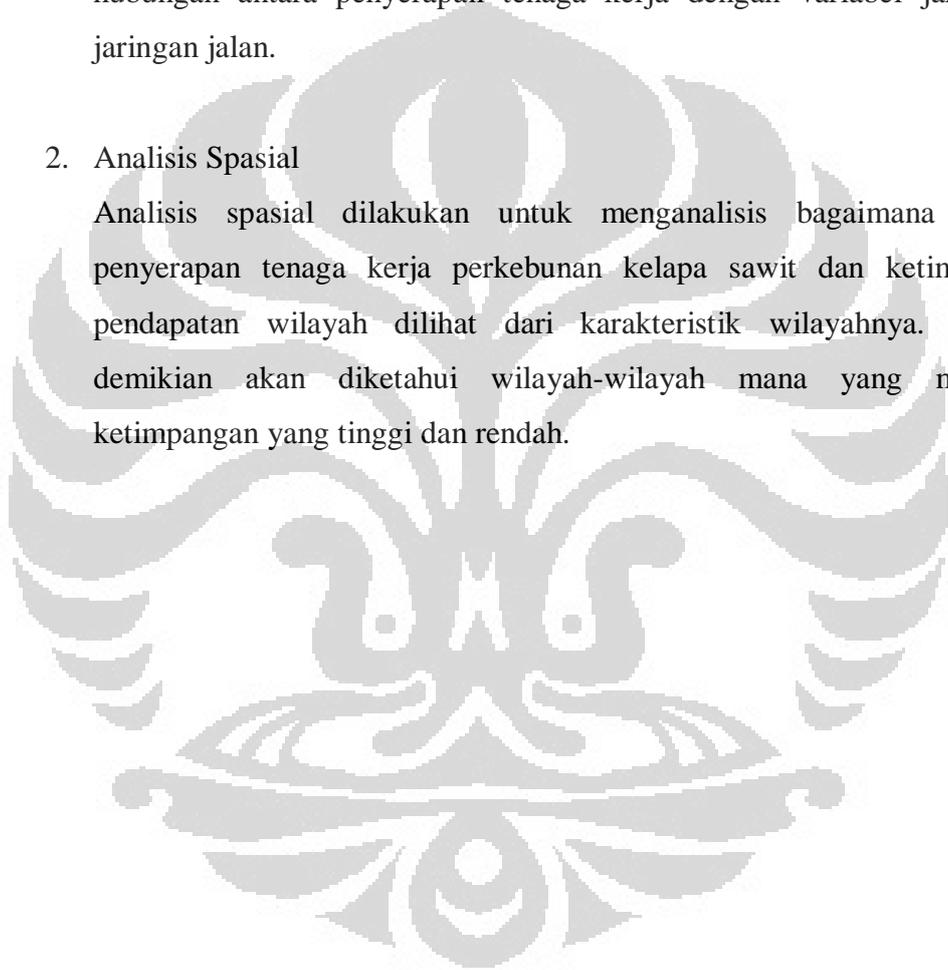
Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini, terdapat dua cara dalam melakukan analisis ini yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif

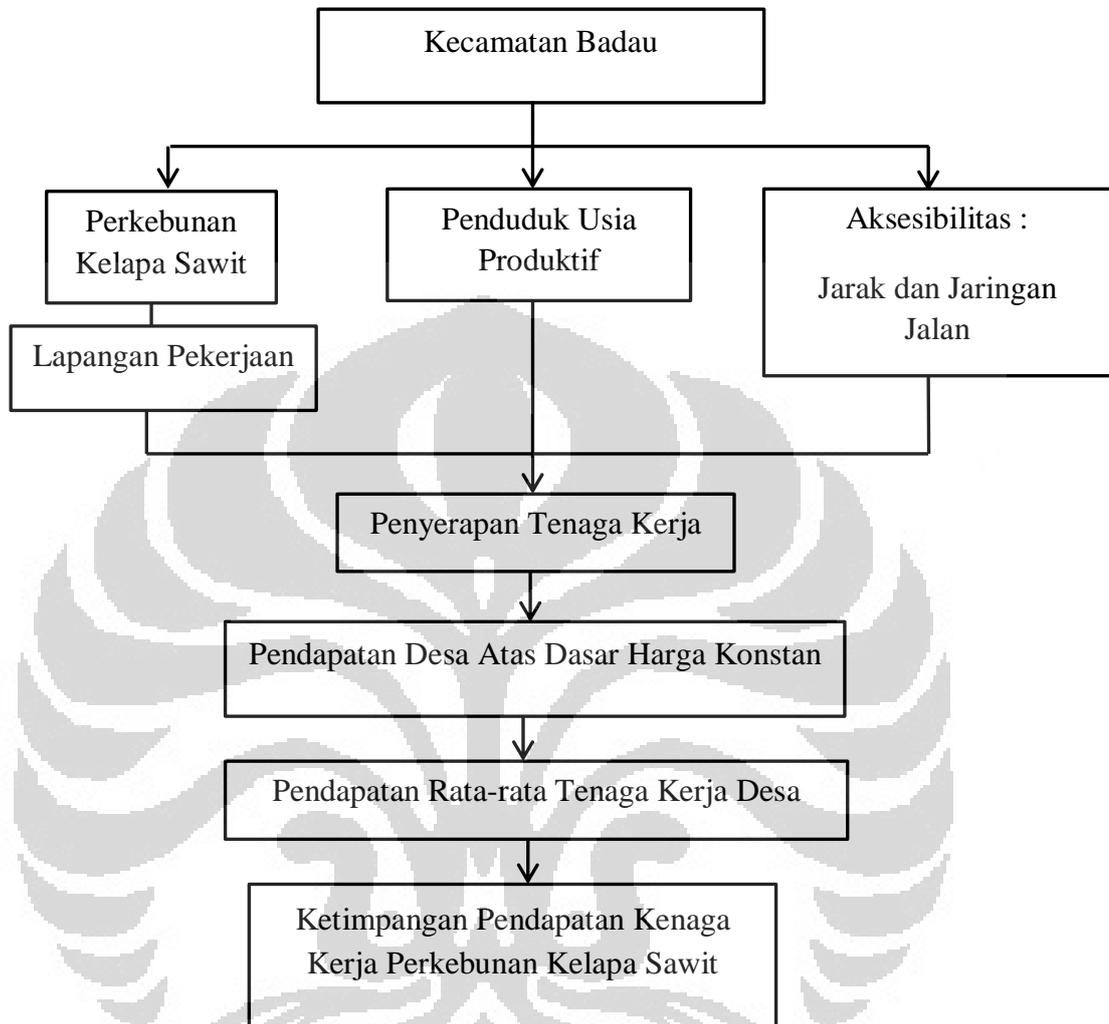
Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menghubungkan dari beberapa variabel yang digunakan dan kemudian dapat diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini, digunakan untuk mengetahui hubungan antara penyerapan tenaga kerja dengan variabel jarak dan jaringan jalan.

2. Analisis Spasial

Analisis spasial dilakukan untuk menganalisis bagaimana bentuk penyerapan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit dan ketimpangan pendapatan wilayah dilihat dari karakteristik wilayahnya. Dengan demikian akan diketahui wilayah-wilayah mana yang memiliki ketimpangan yang tinggi dan rendah.



3.6 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian

Variabel yang diteliti di Kecamatan Badau ini antara lain terdiri dari perkebunan kelapa sawit, penduduk usia produktif, dan aksesibilitas. Aksesibilitas dalam penelitian dibatasi pada dua faktor yaitu jarak dan jaringan jalan. Adanya perkebunan kelapa sawit mempengaruhi lapangan pekerjaan yang ada di Kecamatan Badau, oleh karena itu akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang terserap. Jumlah tenaga kerja yang terserap akan mempengaruhi pendapatan desa dari subsektor perkebunan kelapa sawit. Pendapatan desa yang berbeda-beda akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan wilayah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Administrasi

Kecamatan Badau merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 700 Km² atau setara dengan 2,35% dari luas Kabupaten Kapuas Hulu yang secara keseluruhan mencapai 29.842 Km². Secara geografis terletak diantara 0⁰ 51' 20" LU – 1⁰ 8' 40" LU dan 111⁰ 48' 0" BT – 112⁰ 5' 40" BT. Kecamatan Badau secara administratif memiliki batas-batas sebagai berikut :

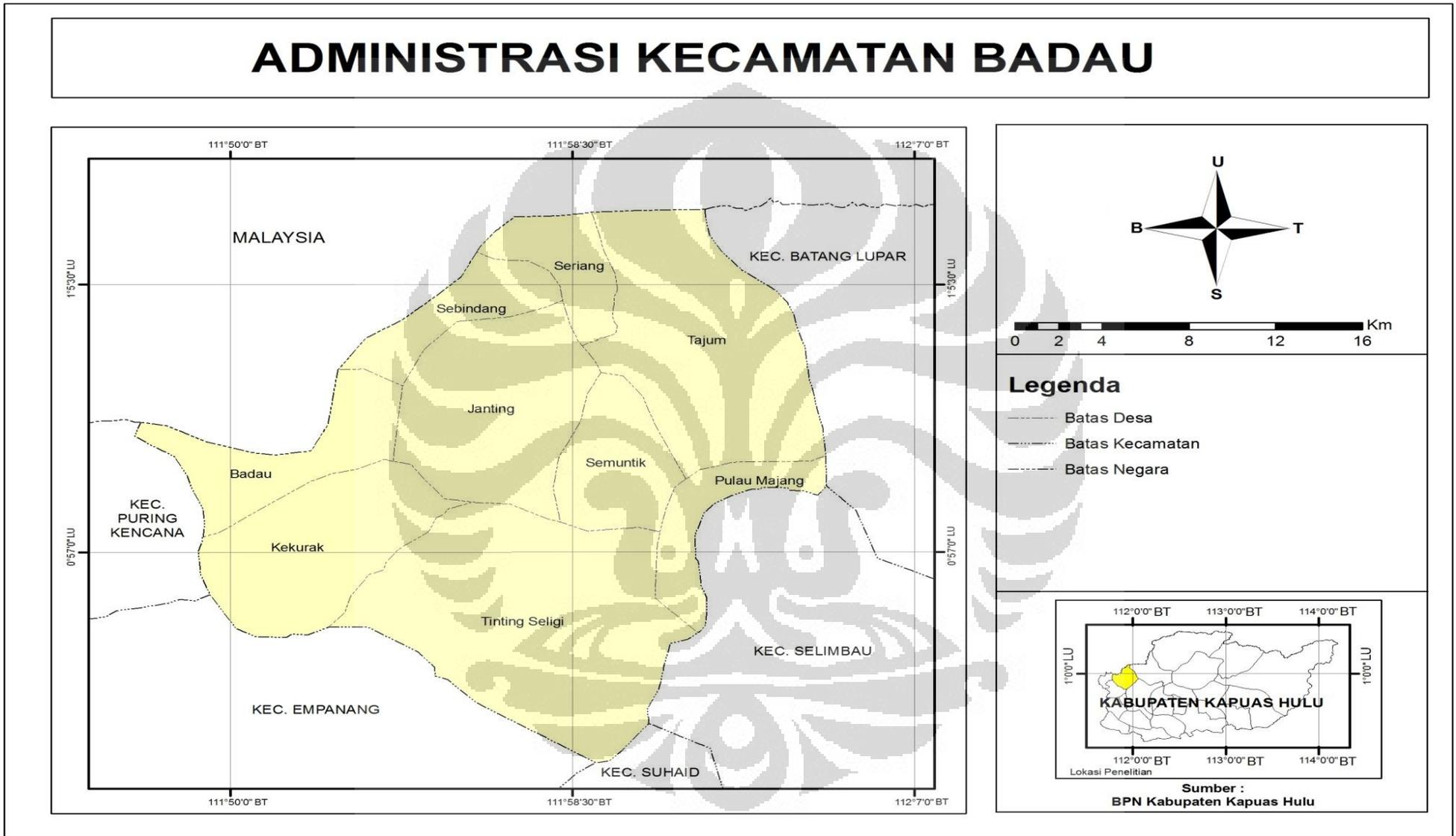
1. Utara : Negara Malaysia
2. Barat : Kecamatan Empanang dan Puring Kencana, Provinsi Kalimantan Barat
3. Selatan : Kecamatan Suhaid dan Kecamatan Selimbau, Provinsi Kalimantan Barat
4. Timur : Kecamatan Batang Lupar, Provinsi Kalimantan Barat

Secara administratif Kecamatan Badau dibagi menjadi sembilan Desa dan dua puluh Dusun. Dari sembilan desa yang terdapat di Kecamatan Badau, Desa Tinting Seligi merupakan desa yang paling luas diantara desa lain dengan luas sebesar 118,61 Km² sedangkan desa yang memiliki luas paling kecil adalah Desa Seriang dengan luas sebesar 63,65 Km². Untuk lebih lengkap mengenai desa dan dusun serta luas tiap desa dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Desa, Jumlah Desa, dan Jumlah Dusun
Kecamatan Badau Tahun 2011

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Dusun
1.	Badau	67,08	1. Badau 1
			2. Badau 2
2.	Janting	114,17	1. Bunut Lalau
			2. Berangan
3.	Semuntik	58,83	1. Semuntik
			2. Pesayah
4.	Kekurak	98,70	1. Kekurak
			2. Perumbang
5.	Pulau Majang	35,91	1. Majang
			2. Raden Sura
6.	Seriang	31,36	1. Seriang Hilir
			2. Seriang Hulu
7.	Tinting Seligi	118,61	1. Sungai Telian
			2. Sungai Tembaga
			3. Empaik
8.	Sebindang	63,65	1. Mentari
			2. Sebindang
9.	Tajum	116,69	1. Tangit II
			2. Tangit IV
			3. Tangit I
Kecamatan Badau		700,00	20 Dusun

[Sumber : Data Monografi Kecamatan Badau Tahun 2011]



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Badau

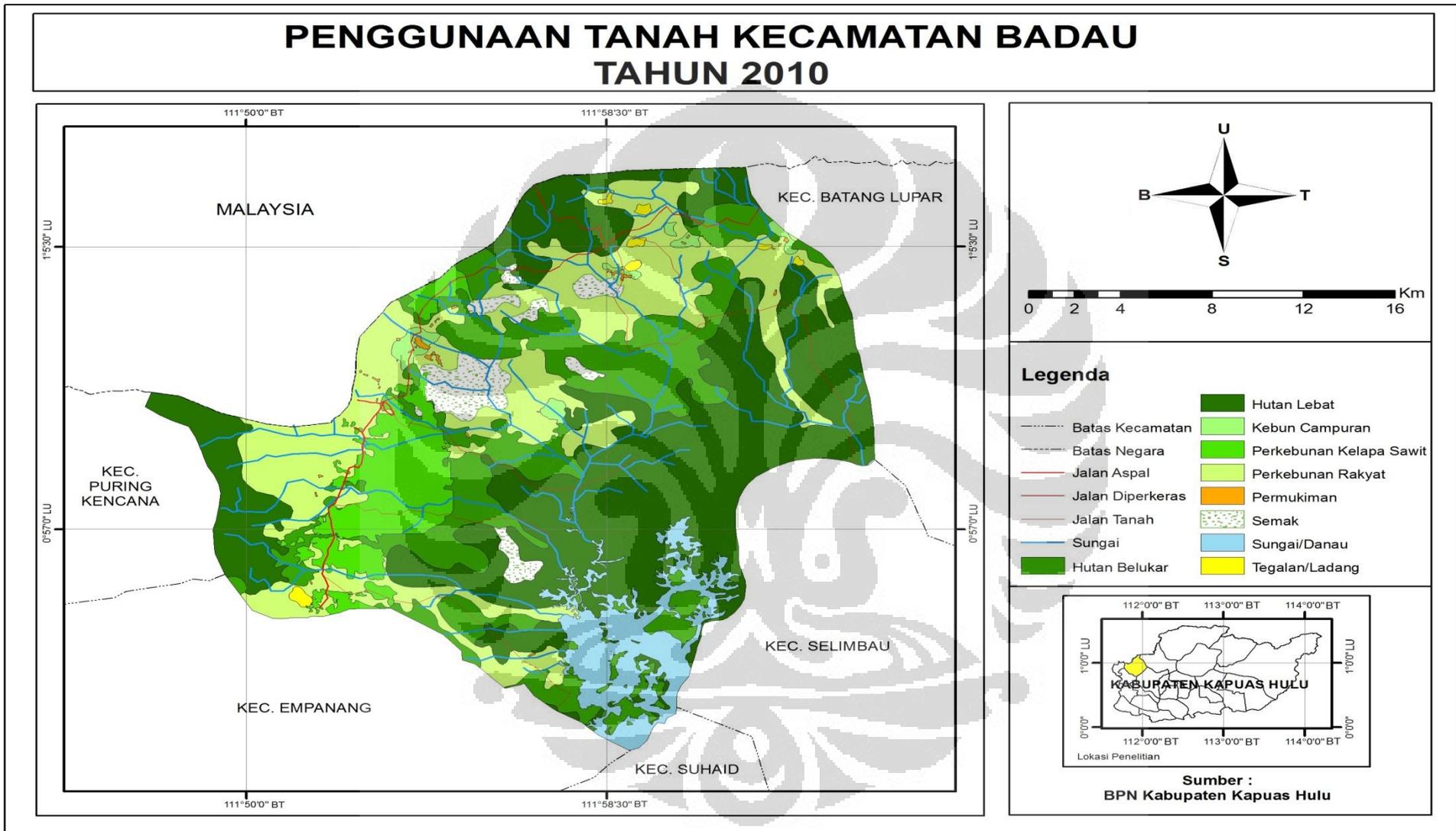
4.2 Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Kecamatan Badau Masih di dominasi oleh Hutan Lebat seluas 22.648,969 Hektar atau sekitar 32,36 % dari total luas Kecamatan Badau. Sedangkan penggunaan tanah pemukiman hanya mencapai 0,14% dari total luas Kecamatan Badau yang juga merupakan penggunaan tanah terkecil dari penggunaan tanah lainnya. Untuk penggunaan tanah perkebunan terbagi menjadi perkebunan kelapa sawit yang merupakan dan perkebunan rakyat. Perkebunan kelapa sawit mencapai luas 4266,740 Hektar atau sekitar 6,09 % dari total luas Kecamatan Badau. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.2. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu 2011- 2030, kawasan peruntukkan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau akan mencapai luas 20.800 Hektar dan perkebunan karet mencapai 5.282 Hektar.

Tabel 4.2 Luas Penggunaan Tanah di Kecamatan Badau Tahun 2010

No.	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Hutan Belukar	10.868,832	15,53
2.	Hutan Lebat	22.648,969	32,36
3.	Perkebunan Kelapa Sawit	4266,740	6,09
4.	Perkebunan Rakyat	13.232,358	18,90
5.	Permukiman	101,226	0,14
6.	Sungai/ Danau	3.618,274	5,17
7.	Lainnya	15.263,601	21,81
	Jumlah	70.000,000	100

[Sumber : BPN Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010]



Gambar 4.2 Peta Penggunaan Tanah Kecamatan Badau Tahun 2010

4.3 Topografi dan Iklim

Kecamatan Badau terletak di bagian Utara dari Kabupaten Kapuas Hulu dan berbatas langsung dengan Negara Malaysia. Rata-rata ketinggian Kecamatan Badau berada pada ketinggian 33 – 250 meter diatas permukaan laut dan kelerangan 0-15 % dengan kondisi topografi Kecamatan Badau berupa datar sampai bergelombang sekitar 20% dari luas total wilayah Kecamatan Badau, berombak sampai berbukit sekitar 75% dari luas total wilayah Kecamatan Badau, dan 5% berbukit sampai bergunung.

Wilayah Kecamatan Badau bagian selatan memiliki potensi objek perairan Danau Sentarum yang merupakan salah satu Taman Nasional di Indonesia. Taman Nasional Danau Sentarum merupakan perwakilan ekosistem lahan basah danau, hutan, rawa air tawar dan hutan hujan tropik di Kalimantan. Danau Sentarum sebagai danau musiman yang berada di taman nasional ini terletak pada sebelah cekungan Sungai Kapuas, yaitu sekitar 700 km dari muara yang menuju Laut Cina Selatan. Dibatasi oleh bukit- bukit dan dataran tinggi yang mengelilinginya, Danau Sentarum merupakan daerah tangkapan air dan sekaligus sebagai pengatur tata air bagi Daerah Sungai Kapuas. Dengan demikian, daerah- daerah yang terletak di hilir Sungai Kapuas sangat tergantung pada fluktuasi jumlah air yang tertampung di danau tersebut. Selain memiliki Taman Nasional Danau Sentarum, Kecamatan Badau juga dialiri 22 sungai dan 5 buah air terjun dengan ketinggian air terjun tidak lebih dari 10 m. (Data Monografi Kecamatan Badau, 2011).

Variasi curah hujan antara 1200 mm/tahun – 1500 mm/ tahun. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli sampai September dengan tingkat curah hujan terendah 115 mm/bulan pada bulan Juli dan musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai Juni dengan curah hujan rata-rata 394 mm/ bulan

dengan tingkat hujan tertinggi 653 mm/bulan pada bulan Desember. Suhu maksimum di Kecamatan Badau adalah 35°C dan suhu minimumnya adalah 25°C .

4.4 Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Badau dari tahun ketahun semakin meningkat seperti dari tahun 2009, 2010 dan tahun 2011 dimana jumlah penduduk Kecamatan Badau tahun 2009 berjumlah 5203 jiwa dan meningkat di tahun 2010 menjadi 6270 kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 7390 jiwa. Berdasarkan data monografi Kecamatan Badau tahun 2011 pada Tabel 4.3 jumlah penduduk Kecamatan Badau terbanyak berada pada Desa Badau dengan jumlah penduduk 2736 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada pada Desa Semuntik dengan jumlah penduduk 340 jiwa. Tetapi jika dilihat kepadatannya, penduduk paling tinggi tingkat kepadatannya berada pada Desa Badau yaitu sebesar $40,77\text{ Jiwa}/\text{Km}^2$ yang berarti setiap 1 Km^2 wilayah di Desa Badau terdapat rata-rata 41 jiwa penduduk, hal ini dikarenakan Desa Badau merupakan ibukota Kecamatan Badau dan merupakan pusat aktivitas dari berbagai macam kegiatan seperti perdagangan, jasa, dan pemerintahan. Sedangkan paling rendah tingkat kepadatannya berada pada Desa Janting sebesar $4,42\text{ Jiwa}/\text{Km}^2$ yang berarti setiap 1 Km^2 wilayah di Desa Janting terdapat rata-rata 4 jiwa penduduk.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Desa Tahun 2011

Desa	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km²)
Badau	67,08	2735	41
Janting	114,17	505	4
Kekurak	98,70	479	5
Pulau Majang	35,91	861	24
Sebindang	63,65	636	10
Semuntik	53,83	339	6
Seriang	31,36	416	13
Tajum	116,69	846	7
Tinting Seligi	118,61	573	5
Jumlah Total	700,00	7390	11

[Sumber : Data Monografi Kecamatan Badau Tahun 2011]

4.4.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada Tabel 4.4 dibawah jumlah penduduk laki-laki hampir seimbang dengan jumlah penduduk perempuan, keseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tersebut juga terlihat di tiap-tiap desa.

Tabel. 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011

Desa	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Badau	1465	1270	2735
Janting	265	240	505
Kekurak	258	221	479
Pulau Majang	454	407	861
Sebindang	326	310	636
Semuntik	171	168	339
Seriang	219	197	416
Tajum	444	402	846
Tinting Seligi	294	279	573
Jumlah Total	3896	3494	7390

[Sumber : Data Monografi Kecamatan Badau tahun 2011]

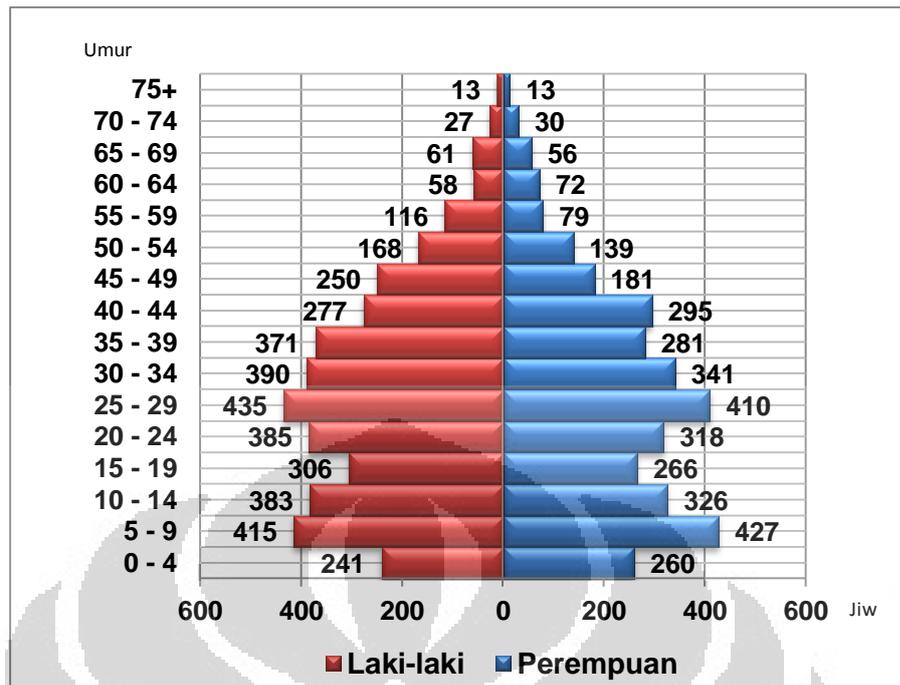
4.4.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Pada Tabel 4.5 Terlihat bahwa penduduk pada usia produktif 25 – 29 tahun merupakan penduduk dengan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 845 jiwa kemudian usia di atasnya yaitu 30-34 menduduki peringkat kedua terbanyak yaitu sebesar 731 jiwa sedangkan usia ≥ 75 tahun merupakan usia yang penduduknya sangat sedikit yaitu sebanyak 26 jiwa. Sedangkan jika dilihat pada Gambar 4.3 terlihat bahwa piramida penduduk Kecamatan Badau termasuk kedalam jenis piramida *Constrictive*, karena sebagian besar penduduk berada pada usia dewasa atau tua dan tingkat kelahiran rendah jika dilihat pada bagian dasar piramida. (Lembaga Demografi,2004).

Tabel 4.5 Struktur Usia Penduduk Kecamatan Badau Tahun 2011

Struktur Usia	Nama Desa									Jumlah
	Badau	Janting	Semuntik	Kekurak	Pulau Majang	Seriang	Tinting Seligi	Sebindang	Tajum	
0 - 4	185	28	24	35	68	36	27	37	61	501
5 - 9	308	60	38	60	104	44	68	75	85	842
10 - 14	304	52	28	43	72	33	53	58	66	709
15 - 19	244	32	28	27	63	28	26	60	64	572
20 - 24	271	47	32	41	104	22	41	57	88	703
25 - 29	317	40	42	46	97	50	63	72	118	845
30 - 34	268	54	30	32	76	52	59	59	101	731
35 - 39	236	49	32	50	66	32	61	57	69	652
40 - 44	212	30	29	52	65	34	45	72	33	572
45 - 49	140	26	20	39	51	23	45	30	57	431
50 - 54	108	31	9	19	44	12	22	19	43	307
55 - 59	64	13	7	12	21	16	15	22	25	195
60 - 64	26	17	8	9	16	15	17	9	13	130
65 - 69	33	18	5	8	6	10	19	6	12	117
70 - 74	12	5	4	6	6	4	10	2	8	57
≥75	7	3	3	0	2	5	2	1	3	26
Total	2735	505	339	479	861	416	573	636	846	7390

[Sumber : Data Monografi Kecamatan Badau Tahun 2011]



Gambar 4.3 Piramida Penduduk Kecamatan Badau

[Sumber : Data Monografi Kecamatan Badau Tahun 2011]

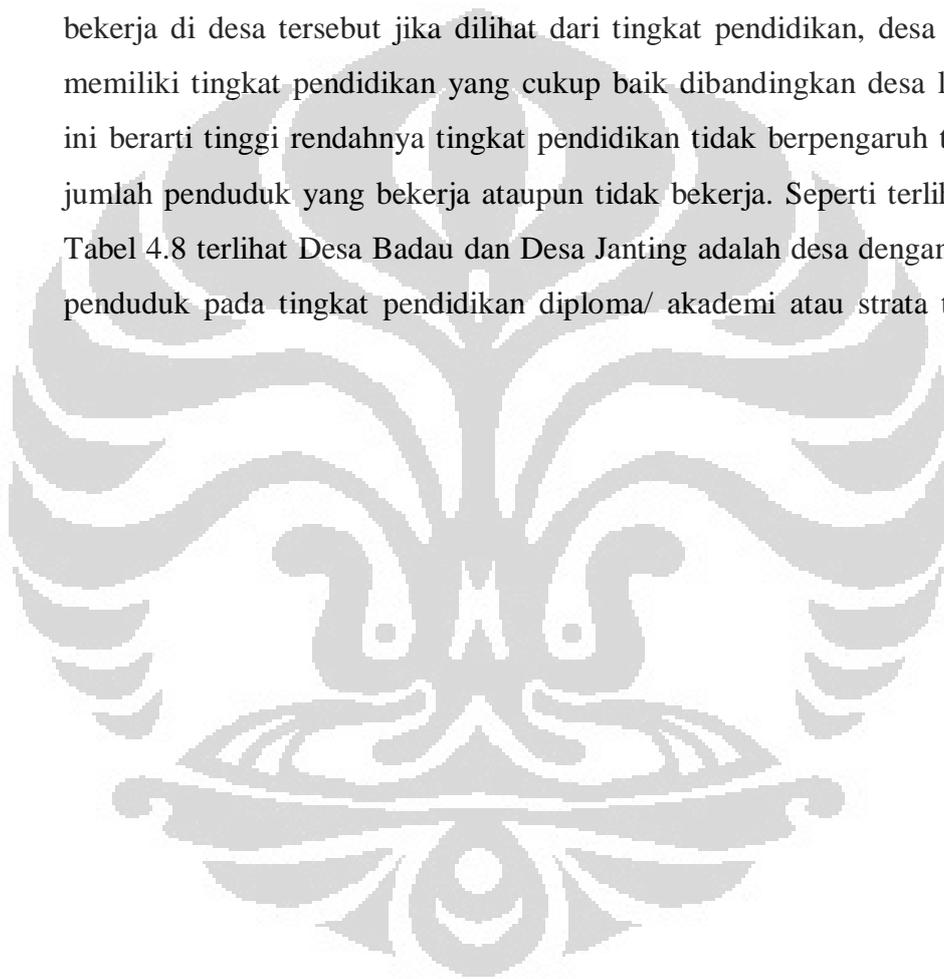
4.4.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Dilihat dari total jumlah penduduk di Kecamatan Badau usia 15- 64 tahun yang berjumlah 5184 jiwa, sebesar 34,18% bekerja sebagai wiraswasta yaitu sejumlah 1772 jiwa dan sebesar 1,33% sebagai nelayan yaitu sejumlah 69 jiwa. Wiraswasta merupakan jenis pekerjaan yang paling mendominasi diantara pekerjaan lain sedangkan nelayan merupakan pekerjaan yang paling sedikit dilakukan oleh penduduk Kecamatan Badau dan hanya penduduk dari Desa Pulau Majang saja yang bekerja sebagai nelayan, dikarenakan Desa Pulau Majang berada di sekitar Taman Nasional Danau Sentarum.

Dapat dilihat dalam Tabel 4.6 mengenai jumlah penduduk usia 15-64 tahun berdasarkan jenis pekerjaannya untuk tiap-tiap desa. Dari tabel tersebut terlihat jumlah angkatan kerja yang berjumlah 2971 jiwa dan bukan angkatan kerja yang berjumlah 2213 jiwa, yang termasuk ke dalam bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun tetapi tidak

bekerja atau tidak sedang mencari pekerjaan seperti mengurus rumah tangga dan sekolah (pelajar) yang masing-masing berjumlah 1606 jiwa dan 607 jiwa. Terlihat juga dalam Tabel 4.6 angkatan kerja yang masih menganggur atau tidak bekerja yaitu sejumlah 96 jiwa.

Jumlah angkatan kerja yang belum atau tidak bekerja terbesar berada di Desa Seriang yaitu sebanyak 37 jiwa kemudian disusul oleh Desa Badau sebanyak 22 jiwa. Jumlah angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja di desa tersebut jika dilihat dari tingkat pendidikan, desa tersebut memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik dibandingkan desa lain. Hal ini berarti tinggi rendahnya tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang bekerja ataupun tidak bekerja. Seperti terlihat pada Tabel 4.8 terlihat Desa Badau dan Desa Janting adalah desa dengan jumlah penduduk pada tingkat pendidikan diploma/ akademi atau strata terbesar.



Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Usia 15- 64 Tahun Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Desa									Total
	Badau	Janting	Semuntik	Kekurak	Pulau Majang	Seriang	Tinting Seligi	Sebidang	Tajum	
Belum / Tidak Bekerja	22	5	1	1	16	37	0	13	1	96
Mengurus Rumah Tangga	595	74	90	128	223	96	100	142	158	1606
Pelajar / Mahasiswa	271	28	19	19	42	83	20	55	70	607
Buruh Perkebunan Kelapa Sawit	45	134	37	51	3	20	114	57	23	482
Nelayan / Perikanan	0	0	0	0	69	0	0	0	0	69
Wiraswasta	878	88	88	118	236	0	80	175	109	1772
Pekerjaan Lainnya	105	10	2	10	21	52	80	15	255	552
Total	1916	339	237	327	610	288	394	457	616	5184

[Sumber : Data Monografi Kecamatan Badau Tahun 2011]

4.4.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk Kecamatan Badau memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah, hal ini terlihat dari pendidikannya yang didominasi oleh penduduk yang berpendidikan hanya tamat SD, tidak tamat SD, dan tidak sekolah yang mencapai 5409 jiwa dari total 7.390 jiwa penduduk Kecamatan Badau,. Sedangkan pendidikan tertingginya hanya diploma/ strata yang berjumlah 165 jiwa dari total penduduk Kecamatan Badau yang berjumlah 7.390 jiwa. Berikut ini dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 4.7 mengenai tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Badau per desa.

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Kecamatan Badau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Jiwa)

Desa	Tingkat Pendidikan						Total
	Tidak Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma/ Akademi/ Strata 1	
Badau	419	507	796	473	452	88	2735
Janting	127	177	103	45	45	8	505
Semuntik	100	120	100	16	3	0	339
Kekurak	119	164	134	40	19	3	479
Pulau Majang	164	144	397	90	59	7	861
Seriang	75	109	110	61	44	17	416
Tinting Seligi	96	200	156	61	41	19	573
Sebindang	145	151	160	93	75	12	636
Tajum	181	274	217	110	53	11	846
Total	1426	1846	2173	989	791	165	7390

[Sumber : Data Monografi Kecamatan Badau Tahun 2011]

Tabel 4.8 Persentase Penduduk Kecamatan Badau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Desa	Tingkat Pendidikan					
	Tidak Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma/ Akademi/ Strata 1
Badau	15,32	18,54	29,1	17,29	16,53	3,22
Janting	25,15	35,05	20,4	8,91	8,91	1,58
Semuntik	29,5	35,4	29,5	4,72	0,88	0
Kekurak	24,84	34,24	27,97	8,35	3,97	0,63
Pulau Majang	19,05	16,73	46,11	10,45	6,85	0,81
Seriang	18,03	26,2	26,44	14,66	10,58	4,09
Tinting Seligi	16,75	34,9	27,22	10,65	7,16	3,32
Sebindang	22,8	23,74	25,16	14,62	11,79	1,89
Tajum	21,39	32,39	25,65	13	6,27	1,3
Total	19,3	24,98	29,41	13,38	10,7	2,23

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Terlihat bagaimana persentase tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Badau pada Tabel 4.8 dimana jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD/ Sederajat adalah yang terbesar di kecamatan ini kemudian disusul oleh tingkat pendidikan tidak tamat SD, lalu tidak sekolah, dan persentase jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan diploma/ akademi/ strata 1 adalah yang terendah. Hal ini menunjukkan bagaimana rendahnya tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Badau. Berbagai faktor menyebabkan rendahnya pendidikan di kecamatan ini salah satunya adalah kurangnya fasilitas pendidikan di kecamatan seperti jumlah sekolah yang hanya berjumlah 18 sekolah mulai dari taman kanan-kanak (TK) sampai SMA dan sedikitnya jumlah tenaga pengajar yang hanya berjumlah 64 guru.

4.5 Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Badau

Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau sebenarnya mulai ada pada tahun 1990, perusahaannya adalah PT Plantana Rasindo dan PT Rokan Group tetapi tidak berkelanjutan operasinya dan akhirnya hanya mengambil kayu saja di areal kerja yang kemudian kayu-kayu tersebut dijual ke daerah lain di luar Kecamatan Badau.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 250 Tahun 2007, No.109 Tahun 2007, dan No. 249 Tahun 2007 bahwa PT Khatulistiwa Agro Abadi dan PT Sinar Mas dengan anak perusahaannya yaitu PT Buana Tunas Sejahtera dan PT Sentra Karya Manunggal mendapat Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Kapuas Hulu Drs. H. Abang Tambul Husin untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan izin luas perkebunan kelapa sawit untuk PT Khatulistiwa Agro Abadi seluas ± 17.000 Ha yang terletak di Kecamatan Badau dan Kecamatan Batang Lupar, PT Buana Tunas Sejahtera seluas ± 16.000 Ha untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau, dan PT Sentra Karya Manunggal seluas ± 20.000 Ha untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau dan Kecamatan Empanang.

Tahun 2008 merupakan tahun sosialisasi masuknya perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau oleh PT Buana Tunas Sejahtera dan PT Sentra Karya Manunggal dan mulai melakukan penanaman tahun 2009, kemudian tahun 2011 sosialisasi dilakukan oleh PT Khatulistiwa Agro Abadi tetapi belum melakukan pembukaan lahan maupun penanaman. Dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan Gambar 4.4 mengenai perkembangan luas perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau mulai tahun 2009- 2011. Terlihat bahwa PT Buana Tunas Sejahtera adalah perusahaan yang telah membuka lahan dan mulai melakukan penanaman paling luas di Kecamatan Badau.

Proses pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau adalah dengan teknik tanpa dibakar dengan menggunakan alat buldozer dan ekskavator. Buldozer digunakan untuk pembukaan lahan dengan kondisi lahan dan tanaman yang mudah untuk ditebang, sedangkan ekskavator digunakan untuk pembukaan lahan dengan

kondisi lahan berupa rawa. Pohon atau tanaman yang telah ditebang akan ditumpuk dan dibiarkan agar terdekomposisi secara alami disekitar lokasi perkebunan kelapa sawit.



Foto 4.1 Alat yang Digunakan untuk Pembukaan Lahan

[Sumber : Dokumentasi Survey Lapang 201, Ade]

Tabel. 4.9 Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Badau

Nama Perusahaan	Luas Tahun 2009 (Ha)	Luas Tahun 2010 (Ha)	Luas Tahun 2011 (Ha)
PT Sentra Karya Manunggal	-	396,23	397,02
PT Buana Tunas Sejahtera	1670,51	3870,51	6470,51
Total Luas (Ha)	1670,51	4266,74	6867,53

[Sumber : PT Sentra Karya Manunggal dan PT Buana Tunas Sejahtera]



Foto 4.2 Perkebunan Kelapa Sawit PT Sentra Karya Manunggal

[Sumber : Dokumentasi Survey Lapang 2012, Nike]



Foto 4.3 Bibit Kelapa Sawit PT Sentra Karya Manunggal

[Sumber : Dokumentasi Survey Lapang 2012, Nike]



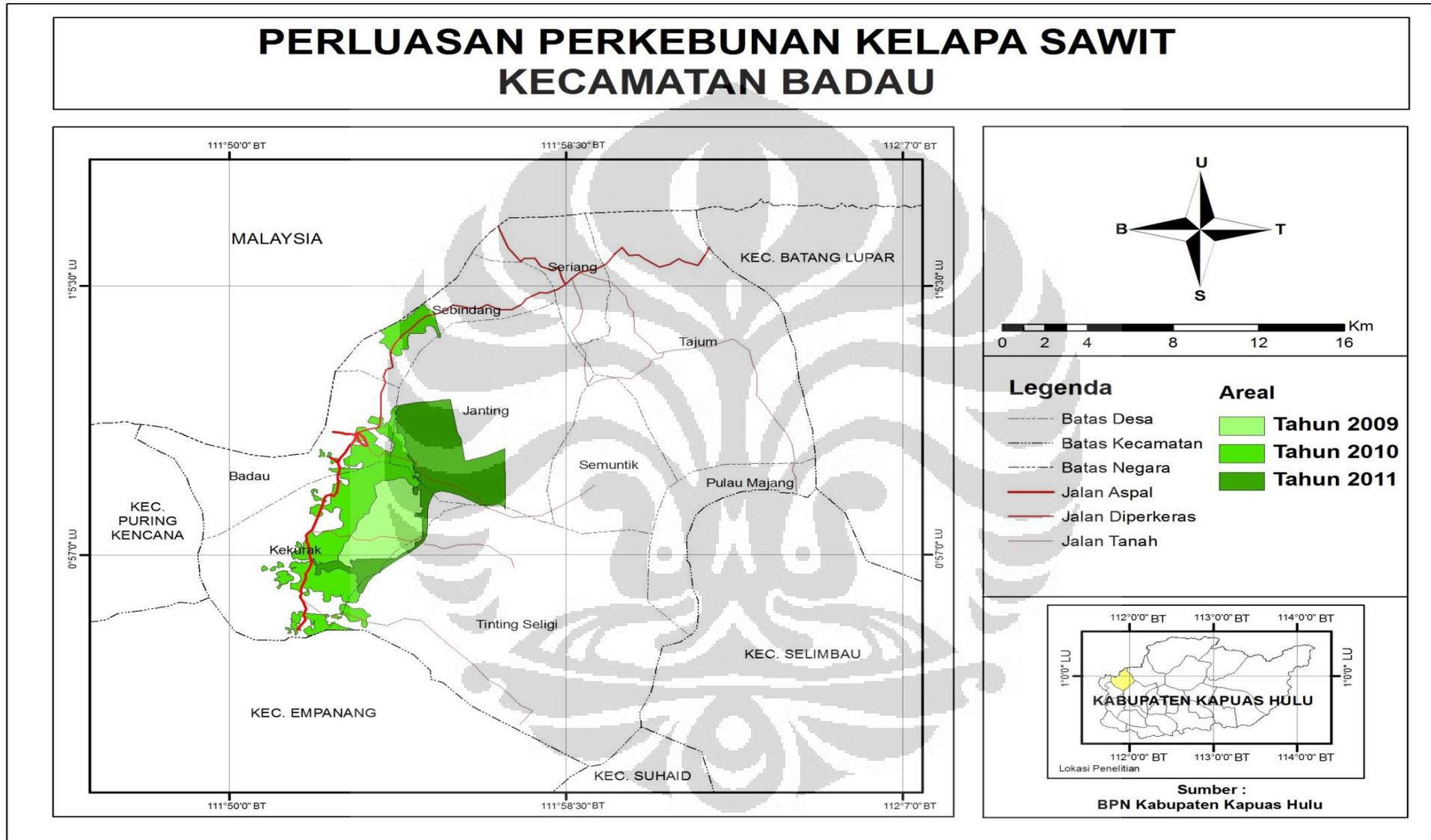
Foto 4.4 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Buana Tunas Sejahtera yang Dibuat Seperti Terasering

[Sumber: Dokumentasi Survey Lapang 2012, Nike]



Foto 4.5 Bibit Kelapa Sawit PT. Buana Tunas Sejahtera

[Sumber : Dokumentasi Survey Lapang 2012, Nike]



Gambar 4.4 Peta Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau

4.6 Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melalui transportasi. Aksesibilitas dapat dilihat dari banyaknya sistem jaringan pada daerah tersebut. Semakin banyak sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut maka semakin mudah aksesibilitas yang didapat begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat aksesibilitas yang tersedia maka semakin sulit daerah itu dijangkau dari daerah lainnya (Bintarto, 1989). Dalam wilayah penelitian ini terdapat dua sistem jaringan yang biasa digunakan masyarakat dalam beraktivitas ataupun melakukan mobilitas yaitu jaringan darat (jalan) dan jaringan air (sungai/ danau).

Status jalan yang terdapat di Kecamatan Badau termasuk dalam status jalan desa. Status jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antarpermukiman didalam desa serta jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. (Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004). Jalan desa di Kecamatan Badau memiliki tiga klasifikasi, yaitu :

1. Jalan Aspal dengan panjang jalan 16443 meter.
2. Jalan Diperkeras dengan panjang jalan 30366 meter.
3. Jalan Tanah dengan panjang jalan 62520 meter.

Kecamatan Badau memiliki satu terminal bus yang berada di Ibukota Kecamatan yaitu Desa Badau, di terminal ini pun hanya terdapat dua bus sebagai alat transportasi umum dengan tujuan Badau –Putussibau untuk mobilitas antar desa mereka banyak menggunakan kendaraan pribadi sedangkan untuk jaringan sungai, penggunaannya banyak dilakukan di sekitar Danau Sentarum yang menghubungkan Kecamatan Badau dengan Kecamatan-Kecamatan lain. Transportasi melalui sungai atau danau ini menggunakan sarana transportasi kapal motor dan perahu motor tempel. Transportasi melalui danau untuk menghubungkan Kecamatan Badau dengan kecamatan lain yang berada disekitar danau, karena jika melalui jalur darat akan membutuhkan

waktu yang lebih lama. Dapat dilihat pada Gambar 4.5 mengenai jaringan jalan dan jaringan sungai yang terdapat di Kecamatan Badau.



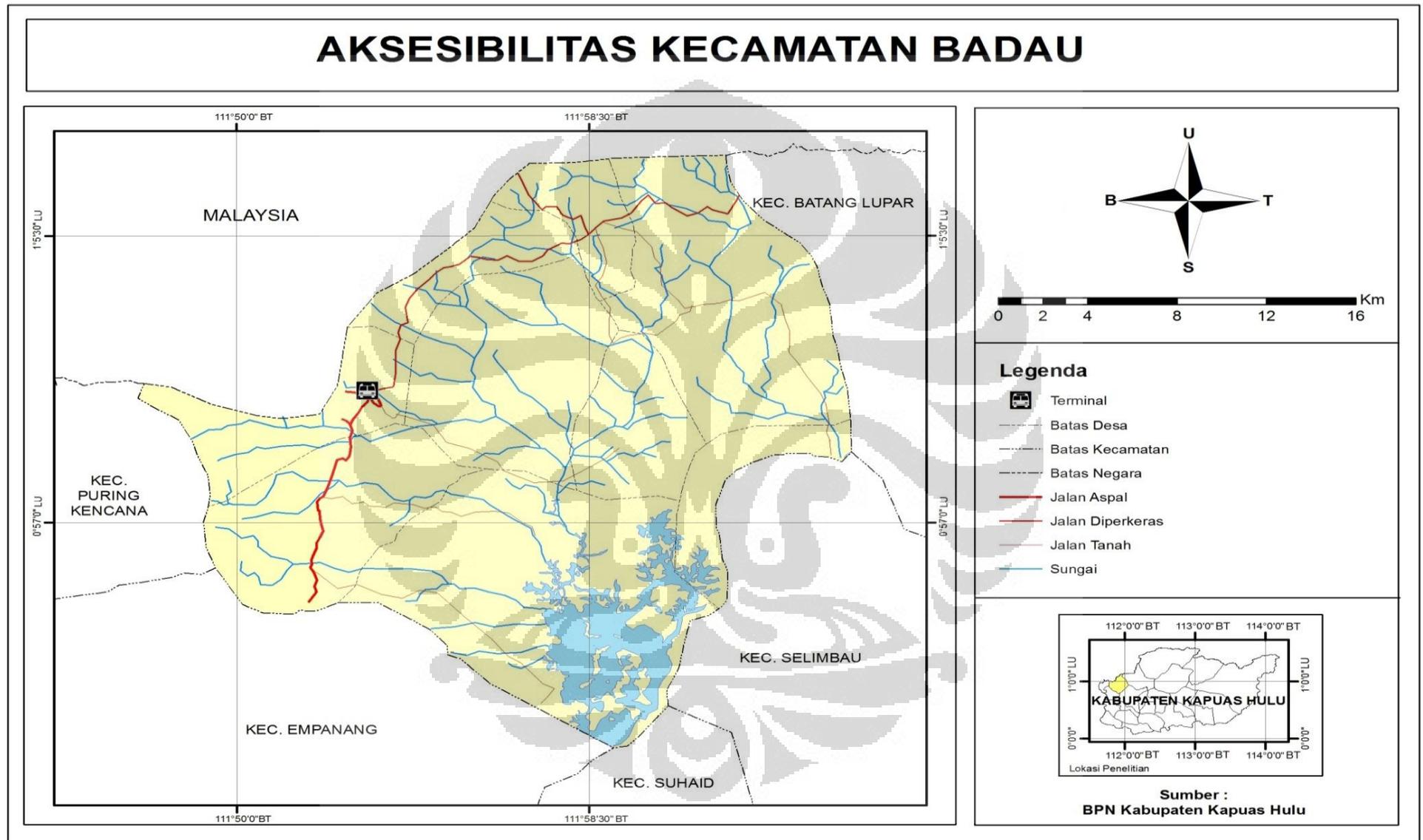
Foto 4.6 Terminal Kecamatan Badau
[Sumber: Dokumentasi Survey Lapang 2012, Nike]



Foto 4.7 Alat Transportasi Umum Darat di Kecamatan Badau
[Sumber : Dokumentasi Survey Lapang 2012, Ade]



Foto 4.8 Alat Transportasi Umum di Danau Sentarum
[Sumber: Dokumentasi Survey Lapang 2012, Ade]



Gambar 4.5 Peta Aksesibilitas Kecamatan Badau

4.7 Perekonomian

Struktur perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2010 tidak banyak mengalami perubahan dari tahun 2009, dimana sektor pertanian masih sangat mendominasi dalam menyokong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 34,45 % sektor lain yang berkontribusi terbesar kedua terhadap total PDRB adalah sektor bangunan dengan kontribusi mencapai 22,74 % sedangkan terbesar ketiga ditempati sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 16,17 % pada tahun 2010. Dimana Kecamatan Badau memberikan kontribusi PDRB sebesar 1,29 % dengan laju pertumbuhan 4,15 % yang juga menduduki laju pertumbuhan terbesar kesepuluh dari 23 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dapat dilihat pada Tabel 4.11 mengenai PDRB Kecamatan Badau atas dasar harga konstan 2000. Dalam tabel tersebut terlihat bagaimana sektor pertanian sangat mendominasi sebesar 39,59% dari total PDRB Kecamatan Badau Tahun 2010 dan subsektor perkebunan berkontribusi sebesar 28,78 % pada PDRB sektor pertanian, memang subsektor perkebunan belum terlalu mendominasi dibandingkan subsektor tanaman bahan makanan dan kehutanan tetapi dari indeks perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kecamatan Badau tahun 2010 pada Tabel 4.10, subsektor perkebunan menunjukkan perkembangan yang relatif meningkat dari tahun 2007 hingga tahun 2010. Walaupun terjadi penurunan pada tahun 2009 tetapi kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2010.

Tabel 4.10 Indeks Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

Kecamatan Badau (2000= 100)

No	Lapangan Usaha	2007	2008	2009*	2010**
1.	Pertanian	78,92	86,97	85,24	86,61
	a. Tanaman Bahan Makan	70,08	86,51	86,96	89,62
	b. Tanaman Perkebunan	149,74	188,03	164,70	168,29
	c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	132,64	137,64	146,68	157,15
	d. Kehutanan	62,07	52,51	45,30	40,99
	e. Perikanan	99,53	94,43	112,06	118,52
2.	Pertambangan dan Penggalian	444,93	439,04	442,69	474,34
3.	Industri Pengolahan	38,13	35,21	28,45	21,68
4.	Listrik dan Air Bersih	264,83	263,58	304,65	335,56
5.	Bangunan	73,22	78,48	49,21	46,10
6.	Perdagangan dan Hotel	124,78	118,59	123,71	131,26
7.	Transportasi dan Komunikasi	139,65	163,16	169,56	181,20
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	143,03	157,87	162,68	173,55
9.	Jasa- Jasa	150,63	152,43	162,13	171,72
	PDRB	103,85	109,45	11,09	115,71

[Sumber : PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kapuas Hulu 2007 - 2010]

* = angka sementara

** = angka sangat sementara

Tabel 4.11 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Jutaan Rupiah)

Kecamatan Badau

No	Lapangan Usaha	2007	2008	2009*	2010**
1.	Pertanian	5.802,35	6.320,53	6.266,98	6357,63
	a. Tanaman Bahan Makan	2.500,46	3.050,77	3.102,68	3.197,61
	b. Tanaman Perkebunan	818,81	1.028,17	900,58	920,20
	c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	254,28	263,87	281,19	301,27
	d. Kehutanan	1.330,08	1.125,07	970,73	878,40
	e. Perikanan	898,71	852,66	1.011,79	1.070,15
2.	Pertambangan dan Penggalian	191,89	189,35	190,93	204,58
3.	Industri Pengolahan	154,88	143,05	115,58	88,08
4.	Listrik dan Air Bersih	156,66	155,92	180,21	198,50
5.	Bangunan	247,59	265,37	166,40	156,89
6.	Perdagangan dan Hotel	3.235,01	3.074,47	3.207,18	3.402,82
7.	Transportasi dan Komunikasi	1.755,85	2.051,55	2.132,04	2.278,33
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.135,15	1.252,95	1.291,15	1377,43
9.	Jasa- Jasa	2.114,70	2.139,94	2.276,08	2.410,65
	PDRB	14.794,09	15.593,12	15.826,54	16.483,91

*= angka sementara

**= angka sangat sementara

[Sumber : PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kapuas Hulu 2007 - 2010]

Berdasarkan hasil PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kecamatan Badau seperti terlihat pada Tabel 4.11 diatas, dapat dihitung PDRB Per kapita Kecamatan Badau tahun 2009 dan 2011 dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 dengan jumlah penduduk Kecamatan Badau untuk tiap tahunnya. PDRB Per kapita digunakan untuk melihat rata-rata pendapatan penduduk suatu wilayah. Perhitungan tahun 2009, 2010, dan 2011 dikarenakan tahun ini merupakan tahun yang diteliti dan juga tahun dimana subsektor perkebunan kelapa sawit mulai masuk.

- PDRB Per kapita Tahun 2009

PDRB Per kapita tahun 2009 dapat dihitung dengan membagi PDRB tahun 2009 dengan jumlah penduduk tahun 2009.

$$\text{PDRB Per kapita} = \frac{\text{Rp } 15.826.540.000}{5203} = \text{Rp } 3.041.811$$

Dari hasil PDRB Per kapita tersebut berarti rata-rata pendapatan penduduk Kecamatan Badau tahun 2009 sebesar Rp 3.041.811
- PDRB Per kapita Tahun 2010

PDRB Per kapita tahun 2010 dapat dihitung dengan membagi PDRB tahun 2010 dengan jumlah penduduk tahun 2010.

$$\text{PDRB Per kapita} = \frac{\text{Rp } 16.483.910.000}{6270} = \text{Rp } 2.629.013$$

Dari hasil PDRB Per kapita tersebut berarti rata-rata pendapatan penduduk Kecamatan Badau tahun 2010 sebesar Rp 2.629.013.
- PDRB Per kapita Tahun 2011

PDRB Per kapita tahun 2011 dapat dihitung dengan membagi PDRB tahun 2011 dengan jumlah penduduk tahun 2011. PDRB tahun 2011 didapat dengan menghitung kenaikan rata-rata PDRB dari tahun 2007 – 2010, didapat rata-rata kenaikan sebesar 3,8 %, maka PDRB tahun 2011 adalah sebesar Rp 17.093.820.000

$$\text{PDRB Per kapita} = \frac{\text{Rp } 17.093.820.000}{7390} = \text{Rp } 2.313.102$$

Dari hasil PDRB Per kapita tersebut berarti rata-rata pendapatan penduduk Kecamatan Badau tahun 2011 sebesar Rp 2.313.102

Pendapatan rata-rata penduduk Kecamatan Badau berdasarkan harga konstan dari tahun 2009 sampai tahun 2011 mengalami penurunan, hal ini disebabkan persentase peningkatan PDRB dari tahun 2009 sampai tahun 2011 lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2009 sampai tahun 2011 sebesar 20,5 % peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2010 dan 17,8 % peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2010 ke tahun 2011. Hal ini mengakibatkan rata-rata pendapatan penduduk Kecamatan Badau.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit

Tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau adalah penduduk Kecamatan Badau usia produktif 15- 64 tahun yang bekerja di perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Kecamatan Badau. Penduduk Kecamatan Badau yang bekerja di perkebunan kelapa sawit terdiri dari dua jenis pekerjaan, yaitu tenaga kerja lapangan dan tenaga kerja kantor. Tenaga kerja kantor mulai bekerja pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2008 ketika perusahaan perkebunan kelapa sawit melakukan sosialisasi dan pembukaan lahan, belum ada penduduk Kecamatan Badau yang bekerja sebagai tenaga kerja kantor karena belum dibukanya kesempatan kerja sebagai staf kantor. Sedangkan tenaga kerja lapangan mulai bekerja ketika masa penanaman dan pemeliharaan tanaman yang juga pada tahun 2009.

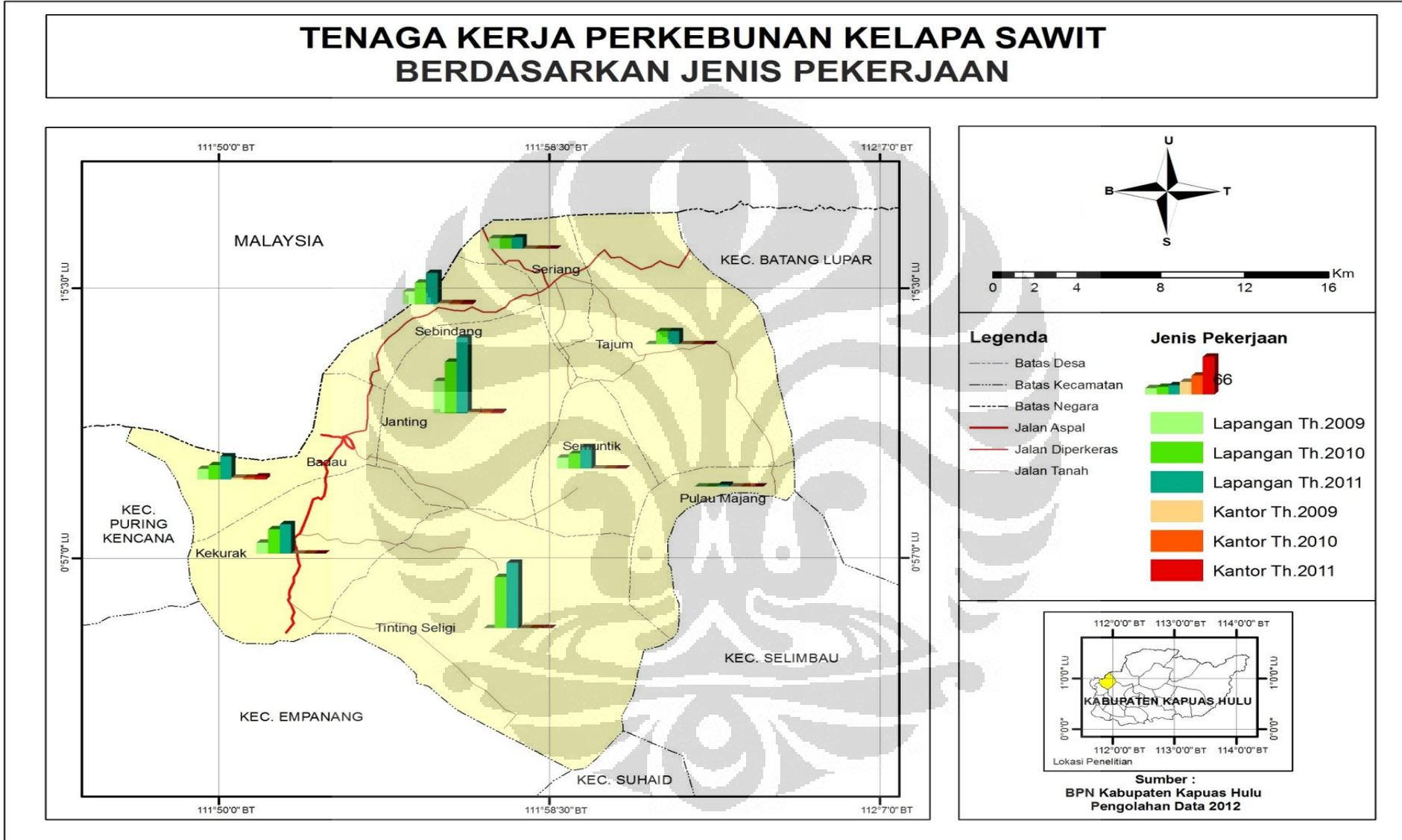
Berikut adalah Tabel 5.1 mengenai jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit mulai tahun 2009 sampai tahun 2011 berdasarkan jenis pekerjaan. Untuk jenis pekerjaan tenaga kerja kantor dari tahun 2009 sampai tahun 2011 hanya diserap dari penduduk Desa Badau, Desa Janting, dan Desa Sebindang hal ini dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan desa tersebut cukup baik dibandingkan desa lainnya serta lokasi desa tersebut yang cukup dekat dengan kantor perkebunan kelapa sawit. Selain itu Desa Janting juga merupakan desa dengan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit terbanyak dari tahun 2009 hingga tahun 2011 yaitu sebesar 58 tenaga kerja pada tahun 2009, 92 tenaga kerja pada tahun 2010, dan 134 tenaga kerja pada tahun 2011. Lokasi Desa Janting yang cukup dekat dengan perkebunan juga menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya tenaga kerja yang terserap di desa ini.

Tabel 5.1 Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit

Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kecamatan Badau

Desa	Jumlah Tenaga Kerja					
	Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011	
	Lapangan	Kantor	Lapangan	Kantor	Lapangan	Kantor
Badau	18	3	25	3	40	5
Janting	56	2	90	2	132	2
Kekurak	19	0	42	0	51	0
Pulau Majang	0	0	0	0	3	0
Sebindang	23	2	38	2	55	2
Semuntik	19	0	26	0	37	0
Seriang	18	0	18	0	20	0
Tajum	15	0	23	0	23	0
Tinting Seligi	0	0	89	0	114	0
Total Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	168	7	351	7	475	9
Total	175		358		484	

[Sumber : Data Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Badau, 2011]



Gambar 5.1 Peta Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kecamatan Badau

5.1.1 Tenaga Kerja Kantor

Tenaga kerja yang dibutuhkan sebagai tenaga kerja di kantor adalah sebanyak 14 tenaga kerja untuk setiap divisi yang terdiri dari kepala divisi, asisten divisi, kasie, *payroll*, pembukuan, administrasi tanaman, kepala gudang, sopir, dan satpam. PT Buana Tunas Sejahtera memiliki empat divisi sehingga dibutuhkan sekitar 56 tenaga kerja di kantor. Sedangkan untuk PT Sentra Karya Manunggal memiliki satu divisi. Sehingga total tenaga kerja yang dibutuhkan di kantor adalah sebanyak 70 tenaga kerja. Pada Tabel 5.2 dapat dilihat mengenai permintaan dan penyerapan tenaga kerja kantor yang disediakan angkatan kerja Kecamatan Badau di perkebunan kelapa sawit di wilayah ini.

Tabel 5.2 Tenaga Kerja Kantor Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Badau

Tahun	PT Buana Tunas Sejahtera		PT Sentra Karya Manunggal	
	Permintaan Tenaga Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja	Permintaan Tenaga Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja
2009	56	7	0	0
2010	56	7	14	0
2011	56	9	14	0

[Sumber : Data Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Badau, 2011]

Tenaga kerja yang diminta oleh PT Buana Tunas Sejahtera dari tahun 2009 sampai tahun 2011 adalah tetap berjumlah 56 tenaga kerja karena jumlah divisi tidak bertambah yaitu tetap empat divisi, sama halnya dengan permintaan tenaga kerja PT Sentra Karya Manunggal yang berjumlah tetap dari tahun 2010 yaitu 14 tenaga kerja, tidak ada tenaga kerja yang diminta PT Sentra Karya Manunggal pada tahun 2009 dikarenakan pada tahun ini belum dilakukan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Tenaga kerja kantor yang mampu disediakan oleh angkatan kerja Kecamatan Badau hanya berjumlah tujuh tenaga kerja pada tahun 2009 dan 2010 dan sembilan tenaga kerja pada tahun 2011.

5.1.2 Tenaga Kerja Lapangan

Tenaga kerja lapangan adalah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit yang bekerja di lokasi perkebunannya (lapangan) bukan di kantor perkebunan kelapa sawit. Angkatan kerja Kecamatan Badau yang bekerja di perkebunan kelapa sawit baru mulai bekerja pada masa pemeliharaan perkebunan kelapa sawit. Dalam menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan dilakukan melalui analisis kebutuhan tenaga kerja yang salah satu metodenya yaitu menggunakan Indeks Tenaga Kerja (ITK). Nilai ITK dapat mencerminkan apakah jumlah tenaga kerja pada suatu perusahaan efisien atau tidak. Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau memiliki ITK sebesar 0,2 orang/ ha. Di bawah ini adalah rumus perhitungan ITK :

$$\text{ITK} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}{\text{Luas Areal Dipelihara}}$$

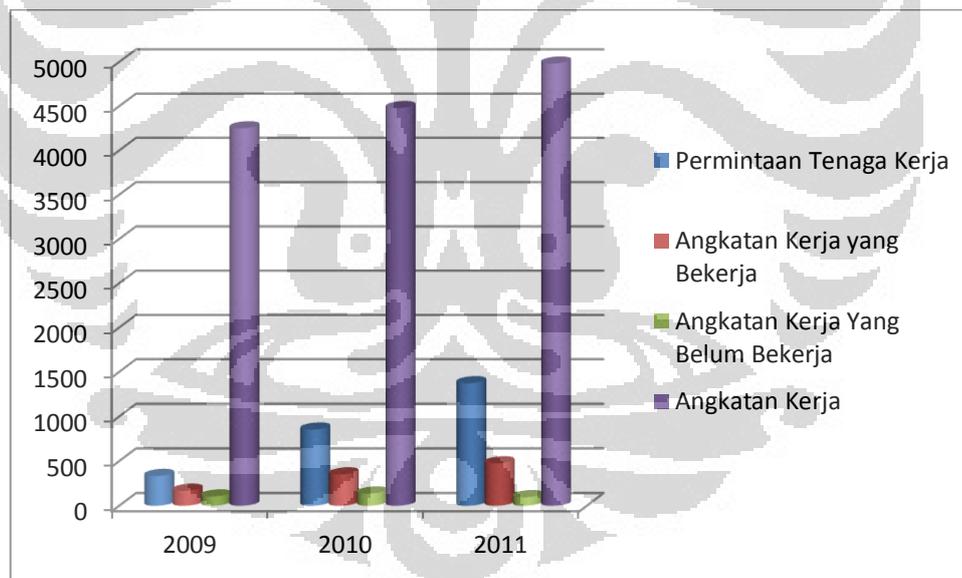
[Sumber : ITK Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit]

Dengan rumus tersebut, jika ITK suatu perusahaan telah diketahui maka akan didapat jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada areal yang dipelihara. Berikut adalah Tabel 5.3 mengenai jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada areal perkebunan kelapa sawit dari tahun 2009 sampai tahun 2011 berdasarkan Indeks Tenaga Kerja (ITK) perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau.

Tabel 5.3 Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Lapangan dan
Penyerapan Tenaga Kerja di Kecamatan Badau

Tahun	Luas (Ha)	Pemintaan Tenaga Kerja (Jiwa)	Angkatan Kerja Kecamatan Badau Yang Bekerja (Jiwa)	Persentase Penduduk Kecamatan Badau Yang Bekerja (%)	Angkatan Kerja yang Belum Bekerja	Angkatan Kerja Kecamatan Badau
2009	1670,51	334	168	4,12	105	4251
2010	4266,74	854	351	7,99	137	4479
2011	6867,53	1373	475	9,71	96	5184

[Sumber : Pengolahan Data 2012]



Gambar 5.2 Diagram Permintaan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit,
Angkatan Kerja Kecamatan Badau Yang Bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit,
Angkatan Kerja yang Belum Bekerja dan Angkatan Kerja Kecamatan Badau

[Sumber: Pengolahan Data 2012]

Dari Gambar 5.2 tersebut terlihat jelas bahwa semakin luas perkebunan kelapa sawit maka permintaan tenaga kerjanya semakin banyak dan angkatan kerja Kecamatan Badau yang bekerja juga semakin bertambah dari tahun 2009 sampai tahun 2011, tetapi semakin bertambahnya angkatan kerja Kecamatan Badau belum semua terserap di perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi permintaan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit, sehingga perkebunan kelapa sawit mendatangkan tenaga kerja yang berasal dari daerah lain seperti dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Tenaga kerja yang didatangkan dari luar Kecamatan Badau disebut dengan Angkatan Kerja Antar daerah (AKAD).



Foto 5.1 Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Penduduk Badau

[Sumber : Dokumentasi Survey Lapang 2012, Nike]



Foto 5.2 Tenaga Kerja Pendatang

[Sumber : Dokumentasi Survey Lapang 2012, Nike]

5.2 Hubungan Aksesibilitas Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Perbedaan jumlah tenaga kerja tiap desa yang bekerja di perkebunan kelapa sawit Kecamatan Badau tentu berkaitan dengan faktor geografis seperti aksesibilitas seperti jaringan jalan dan jarak tempat tinggal pekerja dengan lokasi perkebunan kelapa sawit, karena aksesibilitas merupakan faktor mobilitas bagi manusia, barang, dan jasa. Dengan adanya aksesibilitas yang baik maka kemampuan seseorang untuk mendapatkan kesempatan kerja juga semakin besar. Perbedaan aksesibilitas tiap desa di Kecamatan Badau tentu memberikan dampak bagi penduduk dalam mendapatkan kesempatan kerja.



Foto 5.3 Transportasi Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit

[Sumber : Dokumentasi Survey Lapang 2012, Nike]

5.2.1 Jaringan Jalan

Jaringan jalan sebagai salah satu faktor penentu baik buruknya aksesibilitas suatu wilayah dapat memberikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Badau dalam melakukan mobilisasi ke lokasi perkebunan kelapa sawit. Dapat terlihat dalam Tabel 5.4 bagaimana kondisi jalan yang baik banyak dilalui oleh tenaga kerja perkebunan kelapa sawit menuju lokasi tempat bekerja, tetapi pada tahun 2010 dan tahun 2011 tenaga kerja yang melalui jalan tanah dengan kondisi kualitas yang lebih buruk dari jalan aspal dan jalan diperkeras jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang melalui jalan diperkeras ataupun jalan aspal. Hal ini disebabkan adanya perluasan perkebunan kelapa sawit yang mendekati mendekati permukiman di Desa Tinting Seligi dimana kondisi jalan di Desa Tinting Seligi berupa jalan tanah, semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit.

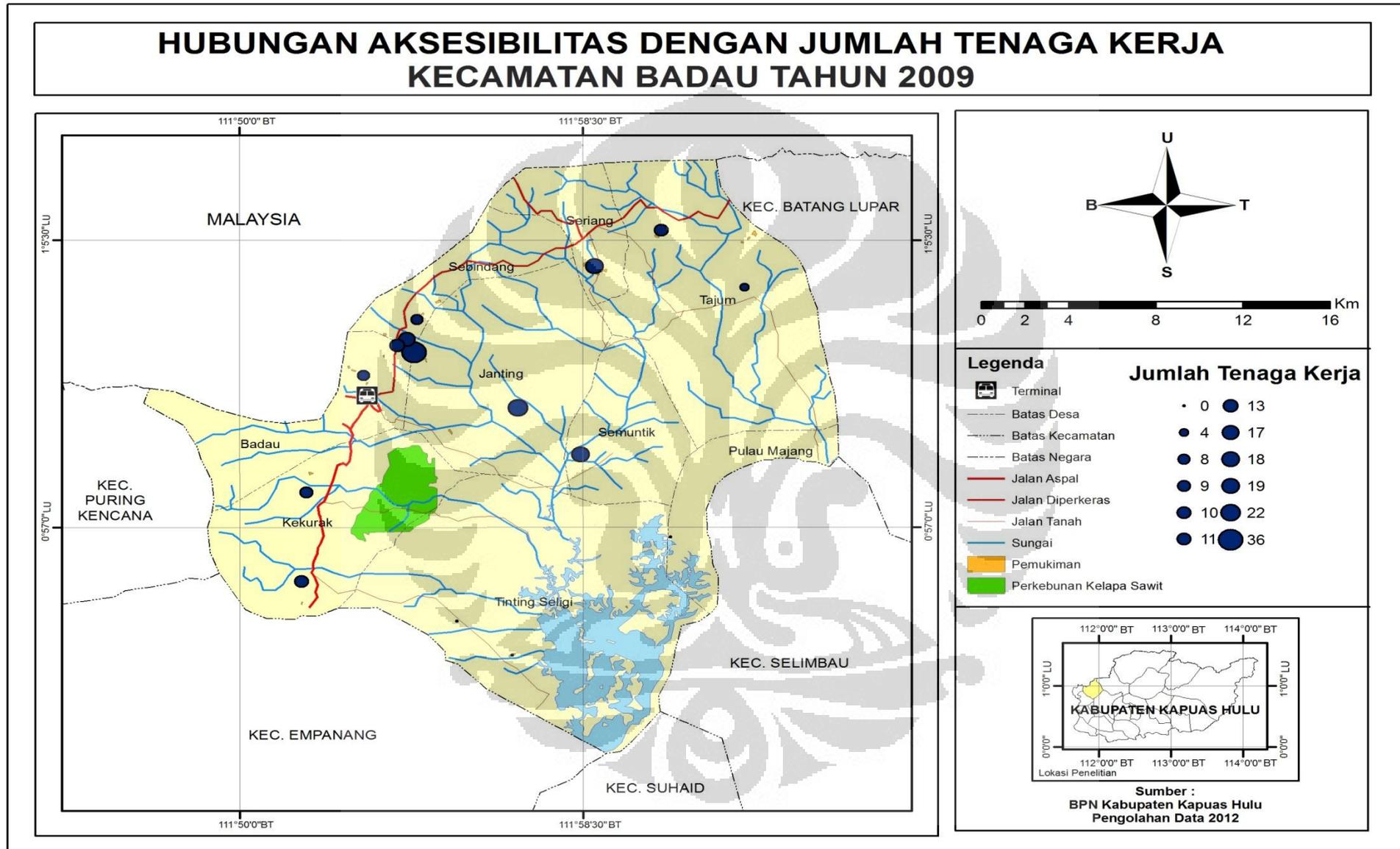
Jaringan jalan yang dimaksud adalah kondisi jalan yang menjadi akses para pekerja melakukan mobilisasi ke lokasi tempat kerjanya (perkebunan kelapa sawit), terdapat tiga kelas kondisi jalan di Kecamatan Badau yang menjadi akses mobilisasi para pekerja yaitu melewati jalan aspal, jalan diperkeras, dan jalan tanah. Dapat dilihat pada Tabel 5.4 mengenai jumlah tenaga kerja dalam menggunakan jaringan jalan menuju lokasi tempat kerja (perkebunan kelapa sawit) dan pada Lampiran 2 terlihat bagaimana kondisi jalan yang harus dilalui tenaga kerja menuju perkebunan kelapa sawit.

Tabel 5.4 Hubungan Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jaringan Jalan Yang Dilalui

Kondisi Jalan	Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)		
	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Jalan Tanah	93	220	307
Jalan Diperkeras	115	156	192
Jalan Aspal	134	195	206

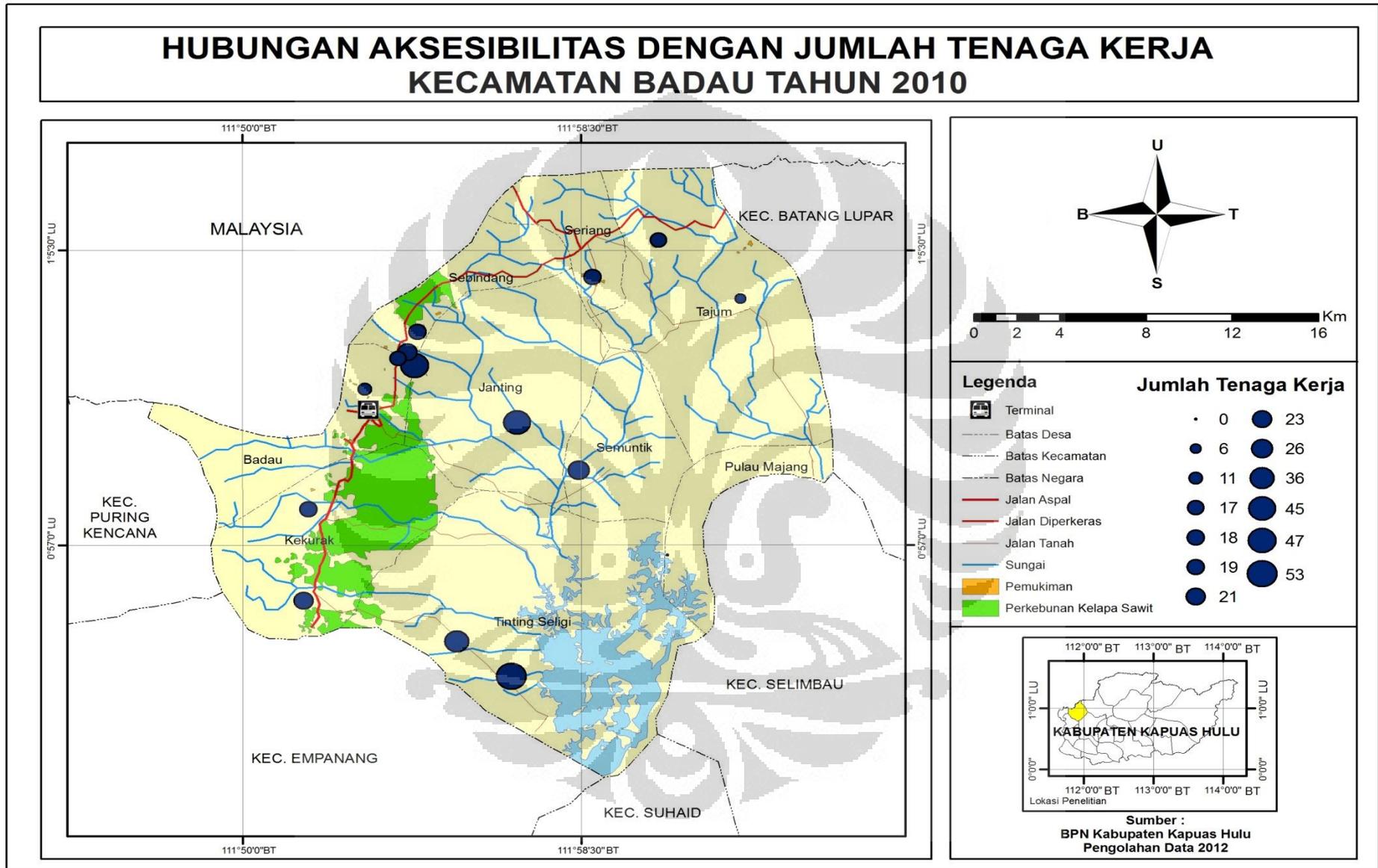
[Sumber : Pengolahan Data, 2012]

Pada tahun 2009 dimana luas perkebunan kelapa sawit masih sekitar 1670,51 hektar dan hanya berada di Desa Kekurak, seperti terlihat pada Gambar 5.3 dimana tenaga kerjanya berasal dari Desa Kekurak, Desa Badau, Desa Sebindang, Desa Janting, Desa Semuntik, Desa Seriang, dan Desa Tajum. Desa Seriang dan Desa Tajum adalah desa yang cukup jauh dari lokasi perkebunan kelapa sawit tetapi memiliki kondisi jalan yang cukup baik berupa jalan diperkeras dan jalan aspal, jalan tanah hanya terdapat di Desa Tajum tetapi didukung juga oleh jalan diperkeras, sehingga memudahkan para pekerja melakukan mobilisasi ke lokasi perkebunan kelapa sawit. Hanya empat tenaga kerja dari sebelas tenaga kerja di Desa Tajum yang harus melalui jalan tanah. Desa Tinting Seligi dan Pulau Majang yang aksesnya berupa jalan tanah dan jarak yang cukup jauh dari lokasi perkebunan kelapa sawit yaitu sekitar 14-17 km jarak permukiman di Desa Tinting Seligi dengan lokasi perkebunan kelapa sawit sedangkan Desa Pulau Majang sekitar 15,7 km belum bisa memenuhi permintaan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit pada tahun 2009. Pada Tabel 5.4 dapat diketahui hubungan kondisi jalan dengan jumlah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang menggunakan jalan aspal dengan kondisi jalan lebih baik daripada jalan tanah lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja yang melalui jalan tanah.



Gambar 5.3 Peta Hubungan Aksesibilitas Dengan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2009

Pada tahun 2010, luas perkebunan kelapa sawit semakin bertambah kearah Selatan menuju Desa Tinting Seligi dan juga membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sebindang dapat dilihat pada Gambar 5.4 maka jumlah tenaga kerja semakin bertambah. pada tahun 2010 ini terdapat 89 tenaga kerja yang berasal dari Desa Tinting Seligi yang semula pada tahun 2009 tidak ada penduduk dari desa ini yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 5.1 , hal ini dapat disebabkan karena jarak yang semakin dekat walaupun kondisi jalannya masih berupa jalan tanah. Dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan Gambar 5.4, hal ini ternyata disebabkan adanya faktor jarak yang juga mempengaruhi, yaitu Desa Tinting Seligi yang menyumbang jumlah tenaga kerja cukup besar pada tahun 2010 ini memiliki lokasi yang tidak terlalu jauh dengan perkebunan kelapa sawit yaitu sekitar 7- 10 km padahal kondisi jalannya berupa jalan tanah yang harus dilalui tenaga kerja di desa ini. Hal ini ternyata tidak mempengaruhi tenaga kerja di Desa Tinting Seligi untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit.



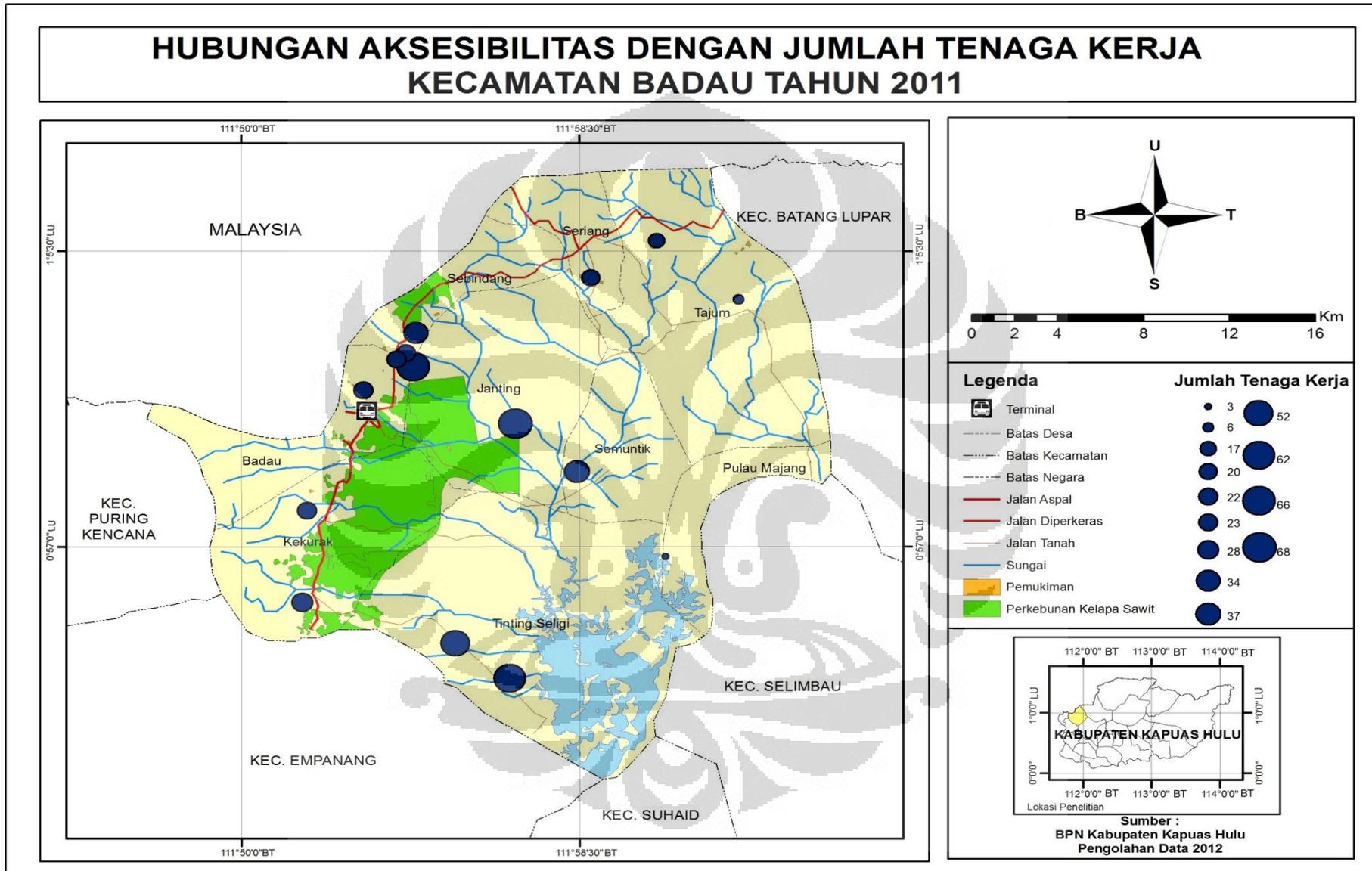
Gambar 5.4 Peta Hubungan Aksesibilitas Dengan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2010

Sama halnya dengan tahun 2010, pada tahun 2011 kondisi jalan yang tidak terlalu baik tidak mempengaruhi tenaga kerja untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit, bagi mereka jarak perkebunan kelapa sawit yang tidak terlalu jauh dari pemukiman mereka cukup membuat mereka nyaman untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Lokasi perkebunan kelapa sawit pada tahun 2011 ini meluas hingga Desa Janting, walaupun kondisi jalan di Desa Janting masih berupa jalan tanah seperti terlihat pada Gambar 5.5 tetapi jarak yang dekat membuat jumlah tenaga kerja semakin bertambah. Karena rata-rata pemukiman yang dekat dengan lokasi perkebunan kelapa sawit memiliki jaringan jalan yang tidak begitu baik yaitu berupa jalan tanah tetapi menyumbang tenaga kerja yang cukup banyak.



Foto 5.4 Kondisi Jalan Tanah Menuju Desa Janting

[Sumber : Dokumentasi Survey Lapang 2012, Nike]



Gambar 5.5 Peta Hubungan Aksesibilitas Dengan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2011



Foto 5.5 Kondisi Jalan Aspal



Foto 5.6 Kondisi Jalan Diperkeras

Foto 5.7 Kondisi Jalan Tanah
Kecamatan Badau

[Sumber : Dokumentasi Survey Lapang 2012, Nike]

Berdasarkan jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di tiap desa dari tahun 2009 hingga tahun 2011 yang melalui jaringan jalan menuju lokasi perkebunan kelapa sawit, jumlah tenaga kerja yang melalui jalan tanah jauh lebih banyak daripada yang melalui jalan aspal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kondisi jalan atau baik buruknya jalan tidak mempengaruhi tenaga kerja untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Misalnya Desa Badau, Desa Kekurak, dan Desa Sebindang yang memiliki

kondisi jalan yang cukup baik berupa jalan aspal dan jalan diperkeras justru tenaga kerja perkebunan kelapa sawitnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Desa Janting dan Desa Tinting Seligi dimana kondisi jalan di desa ini berupa jalan tanah tetapi menyumbang tenaga kerja paling banyak di perkebunan kelapa sawit.

5.2.2 Jarak

Selain faktor jaringan jalan faktor lain dari aksesibilitas yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit adalah faktor jarak, jarak permukiman yang semakin dekat dengan perkebunan kelapa sawit akan menyerap tenaga kerja yang banyak dan semakin jauh permukiman dari lokasi perkebunan kelapa sawit jumlah tenaganya pun semakin sedikit. Dapat dilihat pada Tabel 5.5, Tabel 5.7, dan Tabel 5.9 mengenai hubungan kelas jarak perkebunan kelapa sawit terhadap jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Kelas jarak adalah jarak lokasi perkebunan kelapa sawit dengan lokasi permukiman tenaga kerja dengan menarik garis lurus, maka akan didapat jarak yang terdekat dan terjauh yang kemudian dibagi tiga kelas. Karena tingkat aksesibilitas di Kecamatan Badau cukup rendah sangat berbeda dengan kondisi jaringan jalan di daerah perkotaan yang memiliki tingkat aksesibilitas yang cukup baik sehingga dalam menghitung jarak cukup dengan menarik garis lurus, karena jarak tempuh yang dilalui hampir sama atau rata-rata sama dikarenakan banyaknya jalan yang dapat dilalui sehingga dapat melewati jalan mana saja yang ada maka dalam menghitung jarak cukup dengan mengukur jarak lurus. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi aksesibilitas di Kecamatan Badau yang cukup rendah, maka dibuatlah perhitungan jarak dengan menggunakan jarak riil atau jarak yang dilalui tenaga kerja melalui jaringan jalan dan jaringan sungai yang dilewati sampai menuju lokasi perkebunan kelapa sawit tempat mereka bekerja. Hubungan antara jarak dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit akan dijelaskan mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2011, sebagai berikut :

a. Tahun 2009

Pada tahun 2009 dimana luas areal perkebunan kelapa sawit masih seluas 1670,51 ha dan berada di Desa Kekurak. Jarak lokasi perkebunan kelapa sawit dengan permukiman penduduk berkisar antara 3,4 km sampai 36,4 km. Dari *range* jarak tersebut dibagi menjadi tiga kelas dengan interval kelas 11 km maka dapat dilihat pada Tabel 5.5 kelas jarak perkebunan kelapa sawit dengan jumlah tenaga kerja tahun 2009. Kelas jarak dekat berada pada buffer jarak < 9 km, kelas jarak sedang berada pada buffer jarak 9- 15 km, dan kelas jarak jauh berada pada buffer jarak > 15 km.

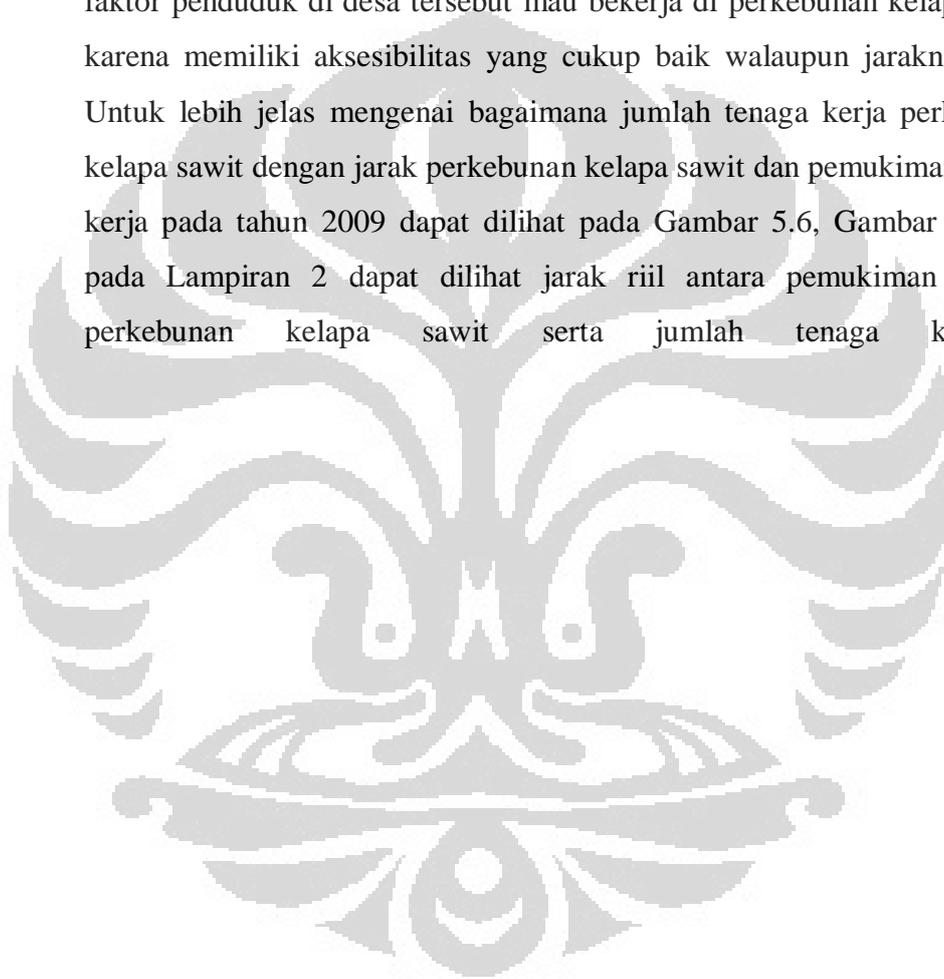
Tabel 5.5 Hubungan Kelas Jarak (Perkebunan Kelapa Sawit dan Permukiman) dengan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2009

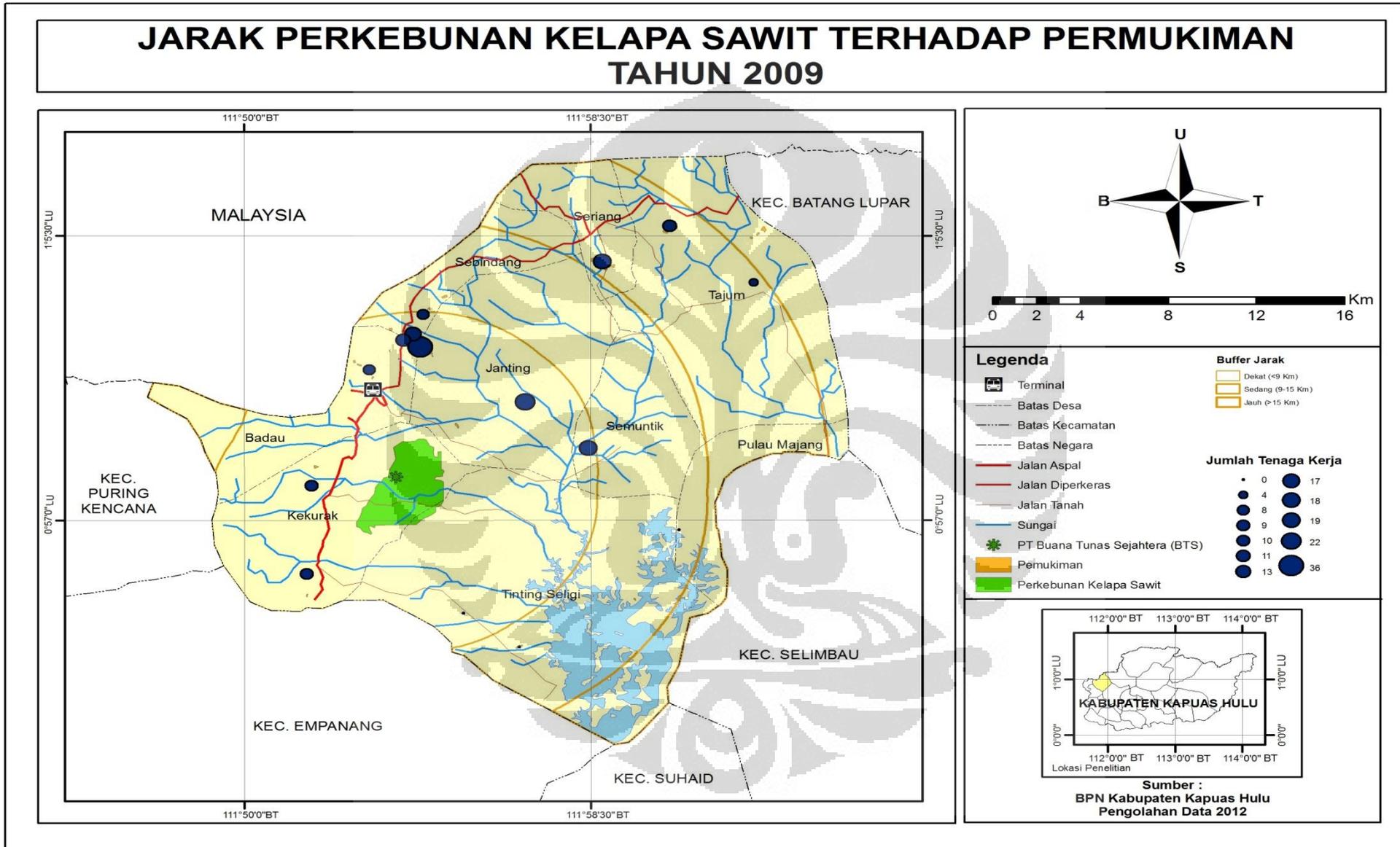
Kelas Jarak (Km)	Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)
Dekat	142
Sedang	0
Jauh	33
Total	175

[Sumber : Pengolahan Data 2012

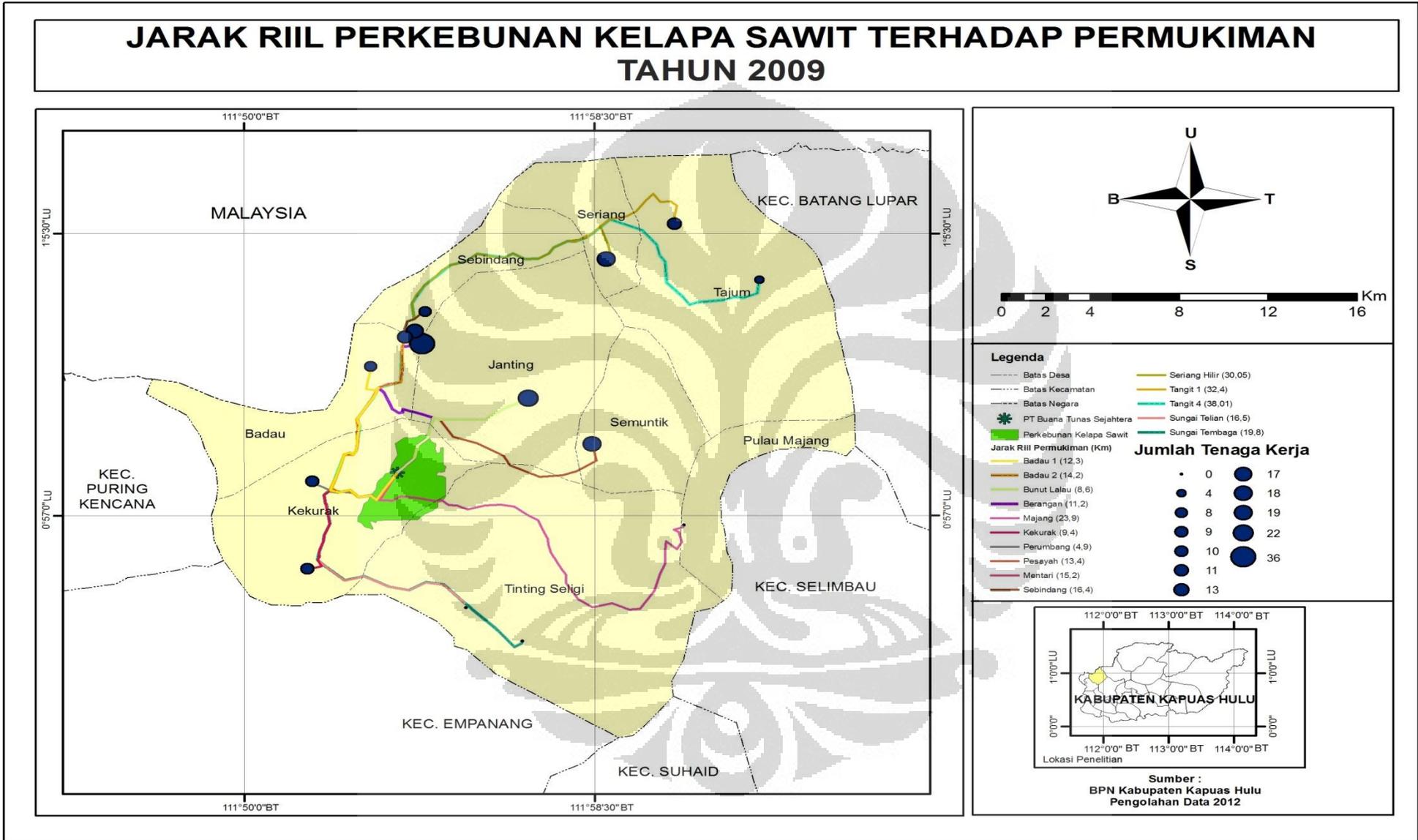
Pada Tabel 5.5 terlihat kelas jarak terdiri dari tiga kelas yaitu dekat, sedang, dan jauh. Bagaimana jarak yang jauh dari perkebunan kelapa sawit maka semakin sedikit jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawitnya. Pada kelas jarak dekat terdiri dari Desa Badau yang berada pada jarak riil antara 12,1 km - 14,2 km, Desa Janting yang berada pada jarak 8,6 km – 11,2 km, Desa Sebindang yang berada pada jarak 15,2- 16,4 km, dan Desa Semuntik yang berada pada jarak riil 13,4 km menyumbang total tenaga kerja sebanyak 142 tenaga kerja perkebunan kelapa sawit. Untuk kelas jarak sedang terdiri dari Desa Pulau Majang dengan jarak riil sejauh 23,9 km dan Desa Tinting Seligi dengan jarak riil 16,5 – 19,8 km belum ada penduduk dari desa ini yang berkerja di perkebunan kelapa sawit karena jarak perkebunan dengan pemukiman di desa tersebut yang cukup

jauh dan kondisi jalan yang kurang baik menjadi salah satu faktor belum adanya penduduk di desa ini yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Pada kelas jarak jauh terdiri dari Desa Seriang dengan jarak riil antara pemukiman dengan lokasi perkebunan kelapa sawit sejauh 30,05 km dan Desa Tajum dengan jarak riil sejauh 32,4 km – 38,01 km memiliki 33 tenaga kerja perkebunan kelapa sawit, kondisi jalan pada desa ini yang cukup baik untuk menuju perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu faktor penduduk di desa tersebut mau bekerja di perkebunan kelapa sawit karena memiliki aksesibilitas yang cukup baik walaupun jaraknya jauh. Untuk lebih jelas mengenai bagaimana jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit dengan jarak perkebunan kelapa sawit dan pemukiman tenaga kerja pada tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 5.6, Gambar 5.7 dan pada Lampiran 2 dapat dilihat jarak riil antara pemukiman dengan perkebunan kelapa sawit serta jumlah tenaganya.





Gambar 5.6 Peta Jarak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Permukiman Tahun 2009



Gambar 5.7 Peta Jarak Riil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Permukiman Tahun 2009

b. Tahun 2010

Pada tahun 2010 juga mengalami hal yang sama seperti tahun 2009 dimana dengan keadaan perkebunan kelapa sawit semakin meluas, maka jarak terhadap permukiman pun semakin dekat sehingga banyak dari penduduk Kecamatan Badau semakin tertarik bekerja di perkebunan kelapa sawit karena semakin mudah aksesibilitas menuju ke perkebunan kelapa sawit. Jumlah tenaga kerja yang semakin bertambah dari tahun 2009 ke tahun 2010 karena permintaan tenaga kerja semakin bertambah dan aksesibilitas yang mudah maka semakin membuat penduduk Kecamatan Badau ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit. Pada Tabel 5.6 terlihat bagaimana kelas jarak perkebunan kelapa sawit yang dekat dari permukiman, maka jumlah tenaga kerja dari permukiman desa tersebut semakin banyak. Kelas jarak dekat berada pada buffer jarak < 8 km, kelas jarak sedang berada pada buffer jarak 8- 16 km, dan kelas jarak jauh berada pada buffer jarak > 16 km. Dapat dilihat juga pada dan Gambar 5.8 dan Gambar 5.9 mengenai jarak permukiman tiap desa terhadap perkebunan kelapa sawit.

Tabel 5.6 Hubungan Kelas Jarak (Perkebunan Kelapa Sawit dan Permukiman) dengan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2010

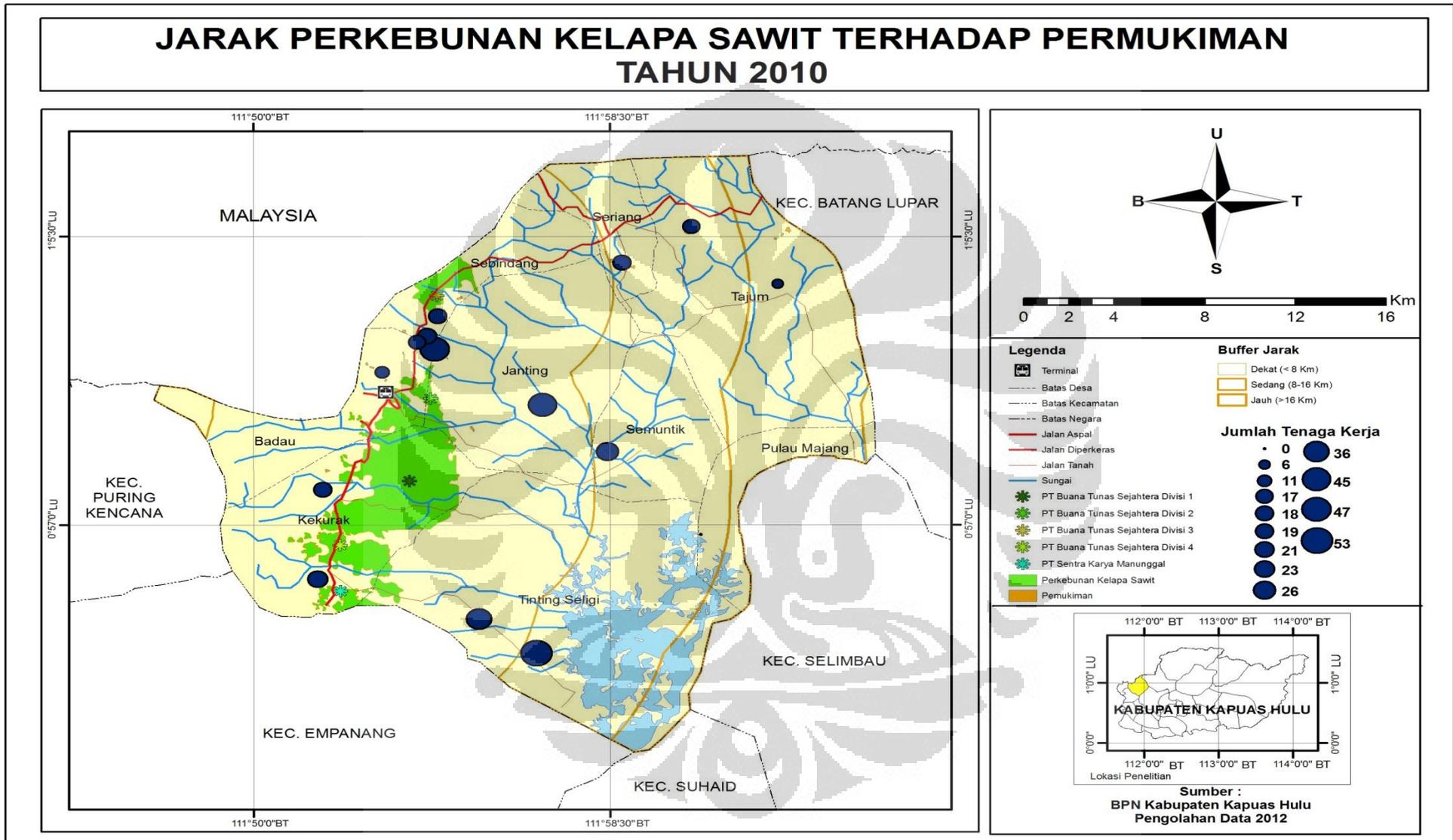
Jarak (Km)	Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)
Dekat	238
Sedang	114
Jauh	6
Total	358

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

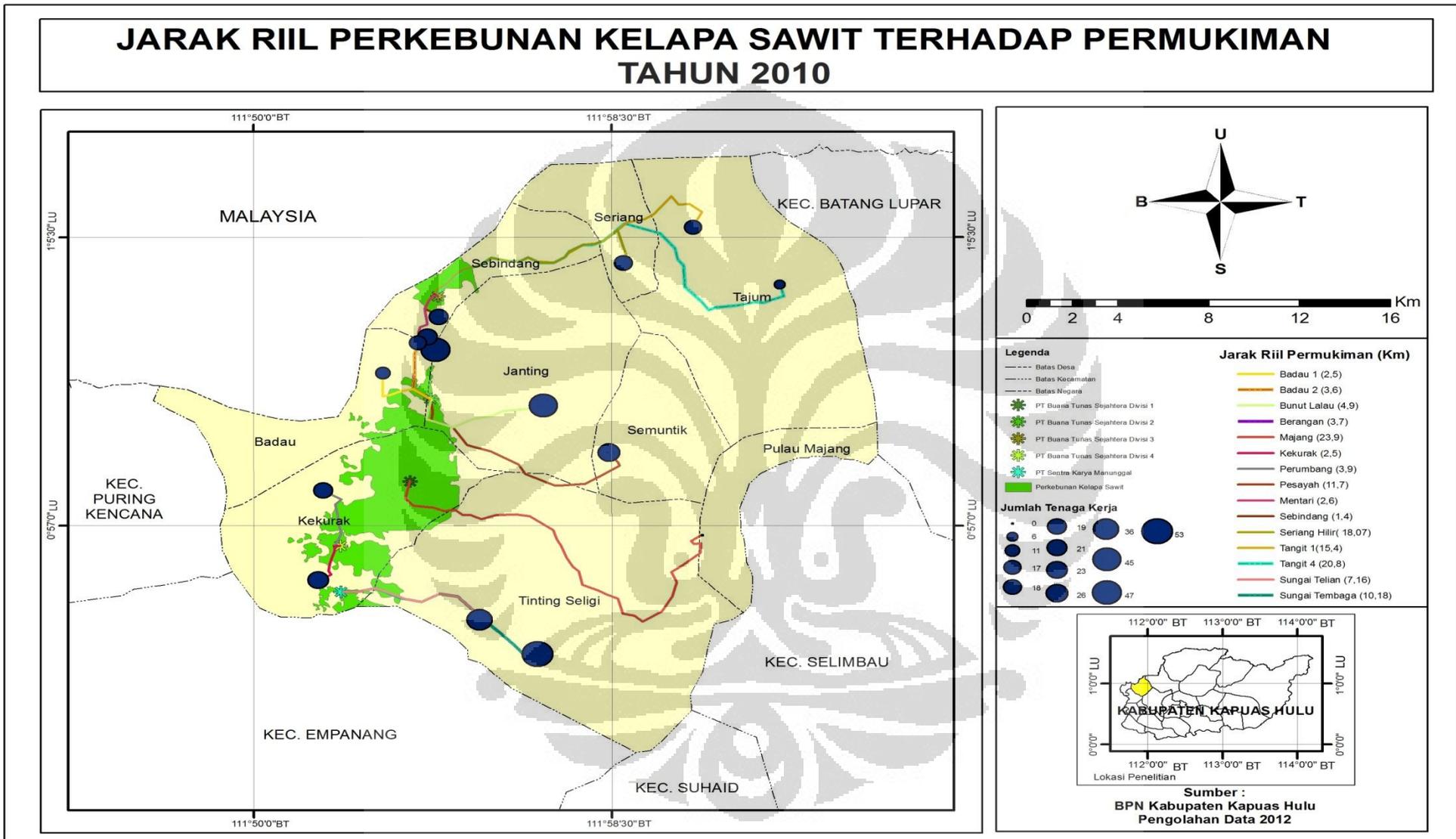
Berdasarkan Tabel 5.6 dengan kelas jarak dekat terdiri dari Desa Badau dengan jarak riil antara perkebunan kelapa sawit dengan permukiman di Desa Badau sekitar 2,5 km - 3,6 km, Desa Janting dengan jarak riil sekitar 3,7 km – 4,9 km, Desa Sebindang dengan jarak riil sekitar 1,4 km – 2,6 km, Desa Kekurak dengan jarak riil 2,5 km – 3,9 km, dan

satu dusun Desa Tinting Seligi yang berjarak 7,16 km menyerap sebanyak 238 tenaga kerja perkebunan kelapa sawit. Sedangkan untuk kelas jarak sedang yaitu Desa Semuntik dengan jarak riil 11,7 km, Desa Seriang yang berjarak riil sekitar 18,07 km, satu dusun di Desa Tajum yang berjarak riil 21,5 km dan satu dusun di Desa Tinting Seligi dengan jarak riil sekitar 10,18 km menyerap tenaga kerja sebanyak 114 tenaga kerja pada kelas jarak sedang. Pada kelas jarak jauh hanya terdiri dari 6 tenaga kerja yang berasal dari satu dusun di Desa Tajum dengan jarak riil sekitar 27,3 km. Dapat dilihat pada Lampiran 3 mengenai jarak riil perkebunan kelapa sawit dengan permukiman-permukiman penduduk Kecamatan Badau tahun 2010.





Gambar 5.8 Peta Jarak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Permukiman Tahun 2010



Gambar 5.9 Peta Jarak Riil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Permukiman Tahun 2010

c. Tahun 2011

Pada tahun 2011 luas perkebunan kelapa sawit pun semakin bertambah lagi, maka jumlah tenaga kerja akan bertambah yang pada tahun 2009 berjumlah 175 jiwa bertambah menjadi 358 jiwa pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 484 jiwa penduduk Kecamatan Badau yang bekerja di perkebunan kelapa sawit faktor jarak tetap berpengaruh di tahun ini.

Interval jarak pada tahun 2011 didapat dari jarak terjauh- jarak terdekat dibagi 3 kelas maka didapat kelas jarak rendah dengan Kelas jarak dekat berada pada buffer jarak < 8 km, kelas jarak sedang berada pada buffer jarak 8- 16 km, dan kelas jarak jauh berada pada buffer jarak > 16 km. Dapat dilihat pada Tabel 5.7 mengenai hubungan kelas jarak perkebunan kelapa sawit dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada tahun 2011.

Tabel 5.7 Hubungan Kelas Jarak (Perkebunan Kelapa Sawit dan Permukiman) dengan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2011

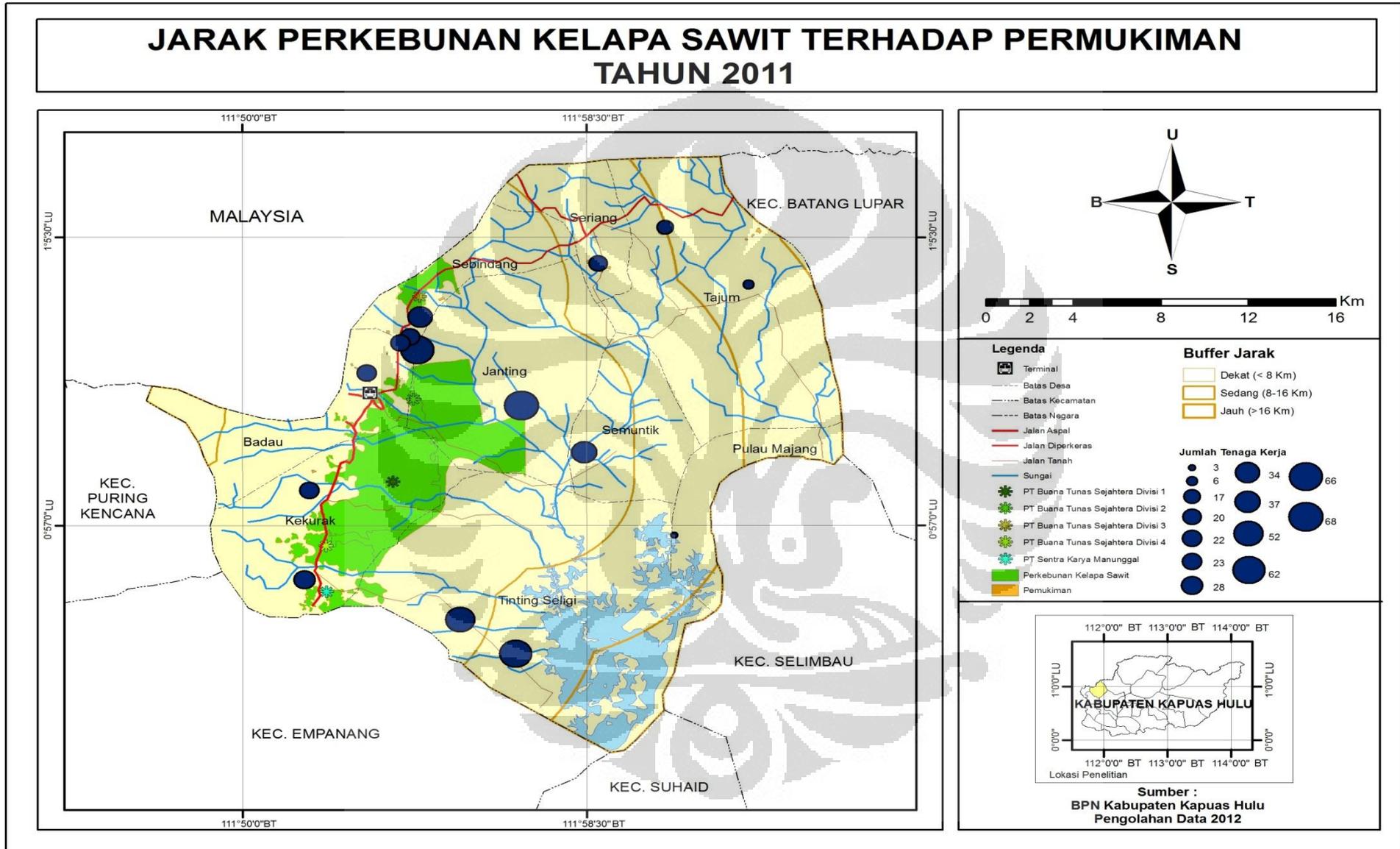
Jarak (Km)	Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)
Dekat	376
Sedang	102
Jauh	6
Total	484

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

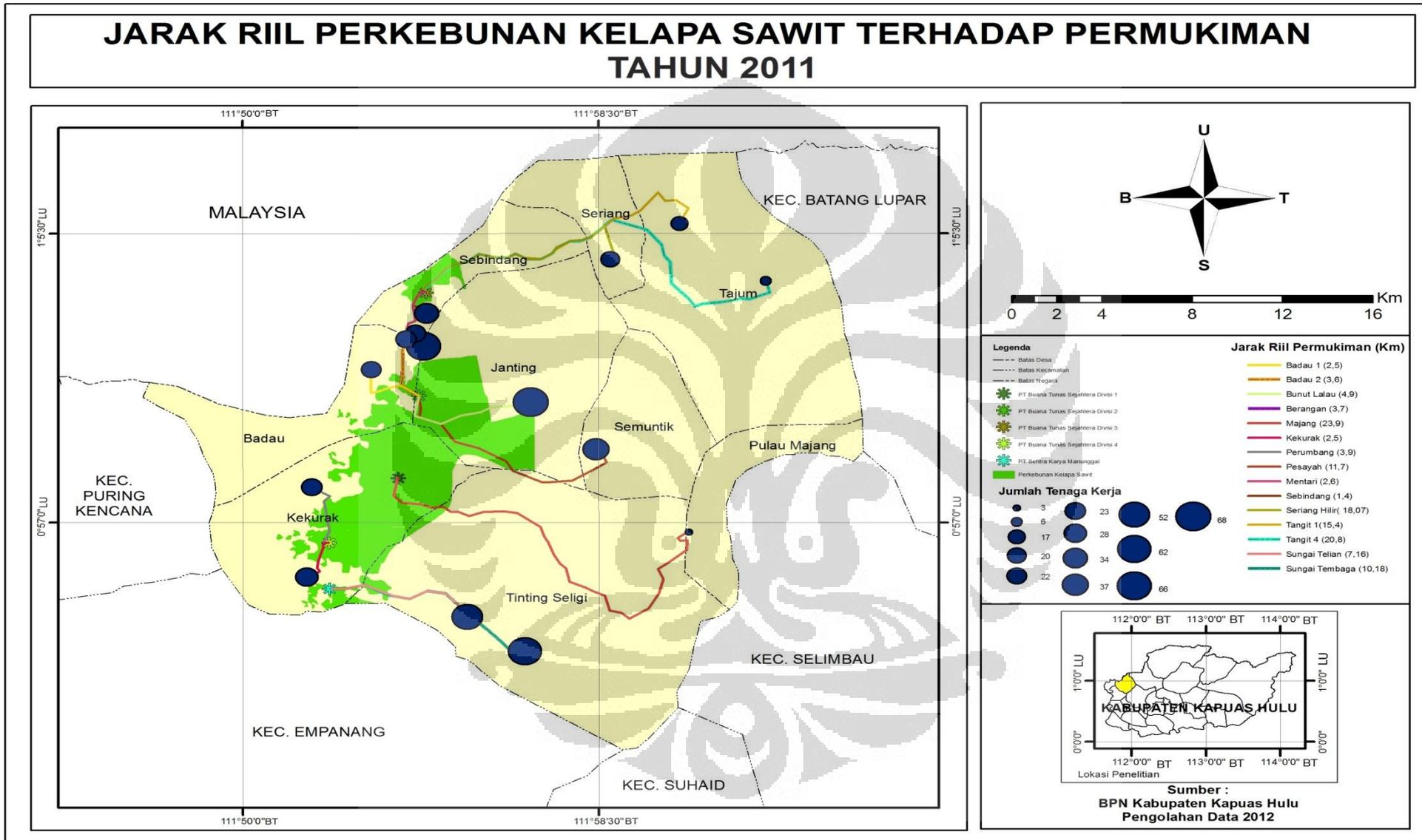
Dimana pada kelas jarak yang dekat dengan jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu 376 tenaga kerja berasal dari Desa Badau dengan jarak riil sekitar 2,5 km – 3,6 km, Desa Janting sekitar 3,7 km – 4,9 km, Desa Kekurak dengan jarak riil sekitar 2,5 km – 3,9 km, Desa Sebindang 1,4 km – 2,6 km, Desa Semuntik dengan jarak riil sekitar 11,7 km, dan satu dusun di Desa Tinting Seligi dengan jaak riil sekitar 7,16 km. Pada kelas jarak sedang dengan jumlah tenaga kerja terbanyak kedua sebanyak 102 tenaga kerja berasal dari Desa Seriang dengan jarak riil 18,07 km , Desa Pulau Majang dengan jarak riil 23,9

km, satu dusun di desa Tinting Seligi dan satu dusun di Desa Tajum yang berjarak riil 10,18 km dan 21,5 km. Pada kelas jarak jauh hanya terdiri dari 6 tenaga kerja yang berasal dari dusun di Desa Tajum dengan jarak sekitar 27,3 km. Dapat dilihat pada Lampiran 4 mengenai jarak riil perkebunan kelapa sawit dengan permukiman-permukiman penduduk Kecamatan Badau tahun 2011. Untuk lebih jelas mengenai bagaimana jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit dengan jarak perkebunan kelapa sawit dan permukiman tenaga kerja pada tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 5.10 dan Gambar 5.11.

Hasil dari tahun 2009 sampai tahun 2011 mengenai hubungan antara jarak antara perkebunan kelapa sawit dan permukiman dengan jumlah tenaga kerja memberikan kesimpulan yang sama yaitu semakin jauh jarak antara perkebunan kelapa sawit dan permukiman maka semakin sedikit jumlah tenaga perkebunan kelapa sawit dari desa tersebut dan sebaliknya semakin dekat jarak antara perkebunan kelapa sawit dan permukiman maka semakin banyak jumlah tenaga kerjanya.



Gambar 5.10 Peta Jarak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Permukiman Tahun 2011



Gambar 5.11 Peta Jarak Riil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Permukiman Tahun 2011

5.3 Hubungan Antara Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pendapatan Desa

Kegiatan perekonomian di setiap daerah tumbuh karena bermacam aktifitas atau kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut. Untuk mengamati dan menganalisis ekonomi suatu daerah, kegiatan perekonomiannya dikelompokkan kedalam sembilan sektor atau lapangan usaha. Salah satu dari sembilan sektor salah satunya adalah pertanian dengan subsektor perkebunan. Berdasarkan indeks perkembangan PDRB Kecamatan Badau subsektor perkebunan mengalami perkembangan yang cukup meningkat dari tahun 2007 hingga 2010 dari 200,03 pada tahun 2007 mencapai 273,28 pada tahun 2010. Dari pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit jika dijumlah dengan penduduk yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di desa tersebut akan menghasilkan pendapatan desa. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pendapatan desa dari subsektor perkebunan kelapa sawit dengan melibatkan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada subsektor tersebut karena akan berpengaruh pada besar kecilnya pendapatan desa. Pendapatan desa didapat dari penjumlahan pendapatan personal tenaga kerja perkebunan kelapa sawit, setelah didapat pendapatan desa maka dapat dihitung pendapatan rata-rata tenaga kerja subsektor perkebunan kelapa sawit yaitu dengan cara membagi pendapatan desa dengan jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit. Pendapatan desa yang akan dipakai dalam perhitungan indeks ketimpangan ini bukanlah pendapatan desa secara nominal tetapi pendapatan desa berdasarkan harga konstan. Harga konstan adalah harga yang dianggap tidak berubah. Dalam penelitian ini, digunakan harga beras sebagai harga konstan.

Pada Tabel 5.8, Tabel 5.9, dan Tabel 5.10 terlihat bagaimana tenaga kerja subsektor perkebunan kelapa sawit berpengaruh pada pendapatan desa di desa tersebut dari mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Tenaga kerja dibagi menjadi dua jenis pekerjaan yaitu tenaga kerja lapangan dan tenaga kerja kantor. Pendapatan personal tenaga kerja lapangan adalah Rp 1.325.000,00/ bulan dengan rincian gaji perbulan Rp 950.000,00/ bulan dan

uang transport , makan, pengobatan, dll Rp 375.000,00/bulan sedangkan pendapatan personal tenaga kerja kantor adalah Rp 1.775.000,00/ bulan dengan rincian gaji Rp 1.125.000,00/ bulan dan uang transport, makan, pengobatan, dll Rp 650.000,00/ bulan. Pendapatan personal tersebut kemudian dikalikan dengan 12 bulan untuk mendapatkan pendapatan desa selama satu tahun didapat Rp 15.900.000,00/ tahun untuk pendapatan dari tenaga kerja lapangan dan Rp 21.300.000,00/ tahun untuk pendapatan dari tenaga kerja kantor.

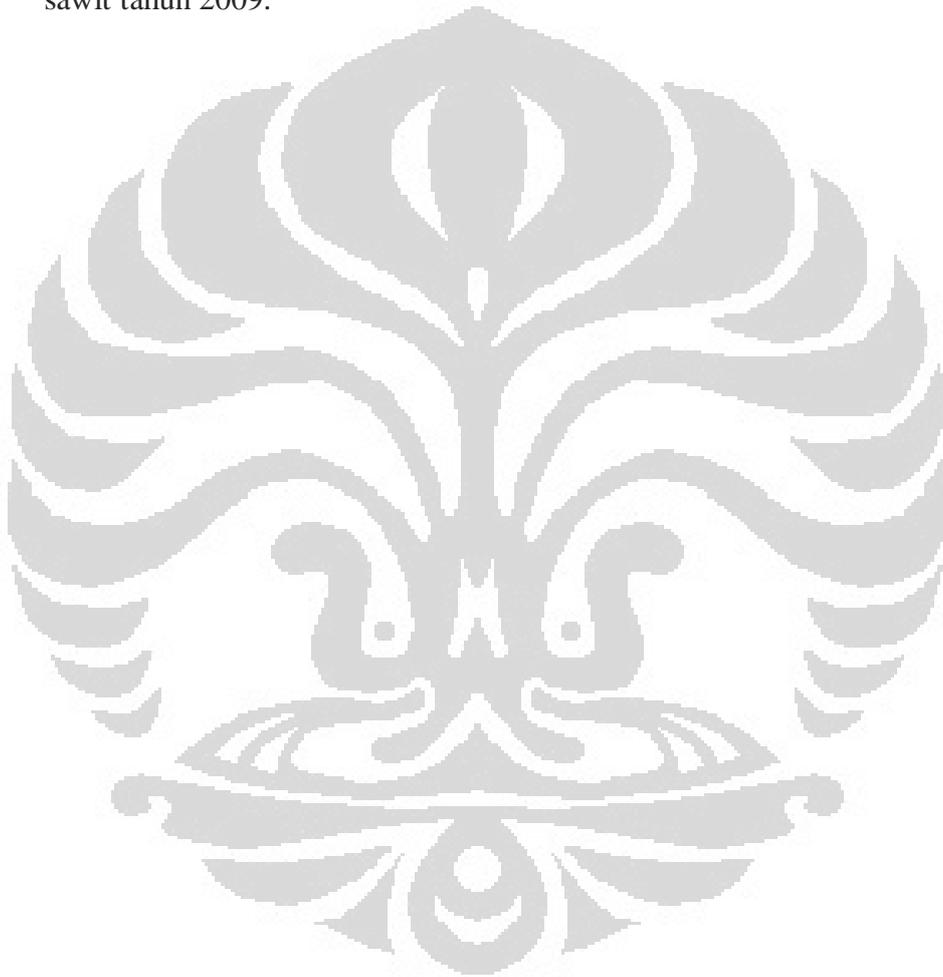
Tabel 5.8 Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit
Kecamatan Badau Tahun 2009

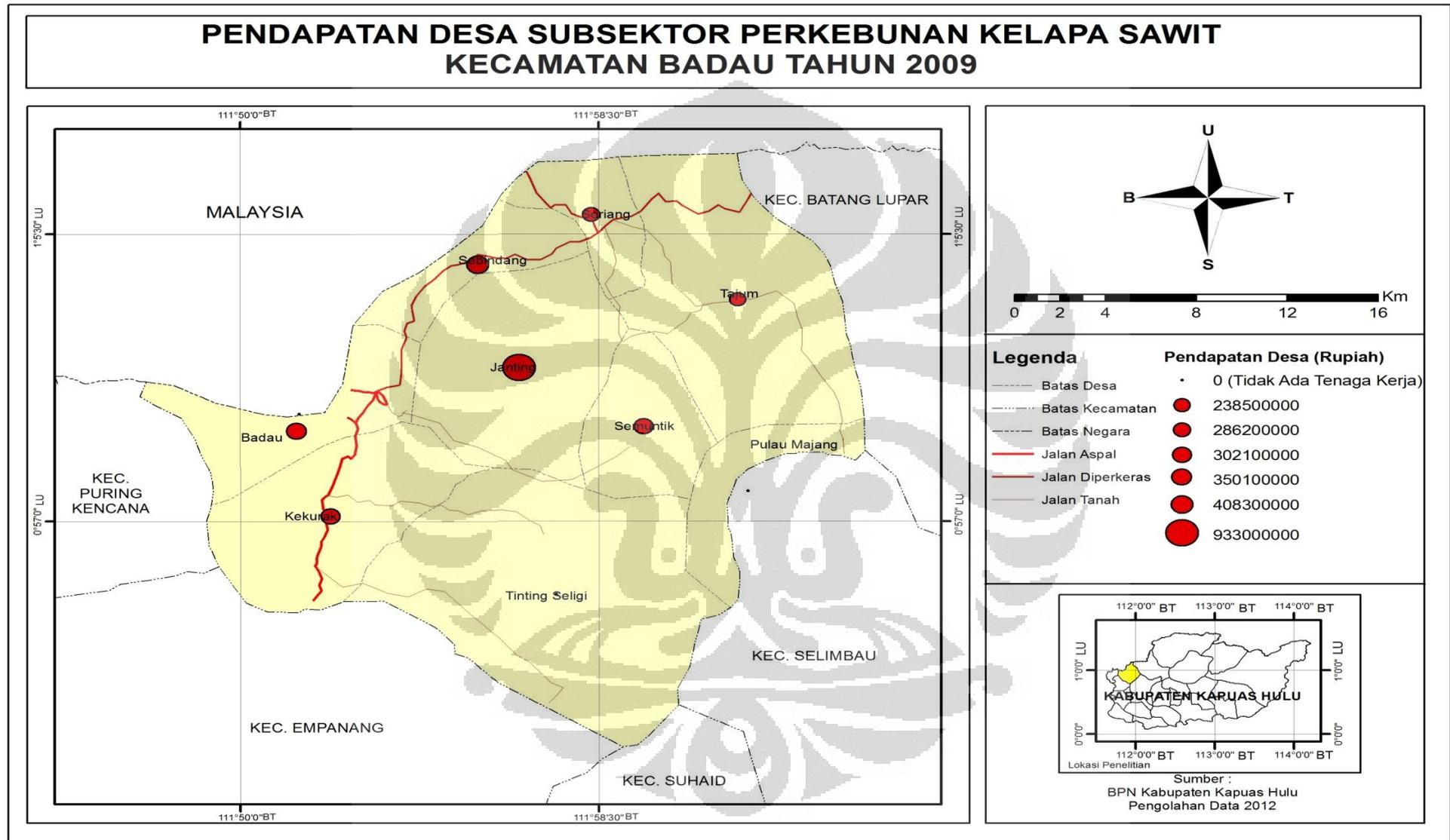
Desa	Tenaga Kerja (Jiwa)		Pendapatan (dalam Ribu Rupiah)		Total Pendapatan Desa (Ribu Rupiah)
	Lapangan	Kantor	Lapangan	Kantor	
Badau	18	3	286.200	63.900	350.100
Janting	56	2	890.400	42.600	933.000
Kekurak	19	0	302.100	0	302.100
Pulau Majang	0	0	0	0	0
Sebindang	23	2	365.700	42.600	408.300
Semuntik	19	0	302.100	0	302.100
Seriang	18	0	286.200	0	286.200
Tajum	15	0	238.500	0	238.500
Tinting Seligi	0	0	0	0	0
Total	168	7	2.671.200	149.100	2.820.300

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Dapat terlihat jelas pada Tabel 5.8 Desa Janting yang memiliki jumlah tenaga kerja terbesar dan jaraknya cukup dekat dengan lokasi perkebunan kelapa sawit mempunyai pendapatan desa yang paling besar dibandingkan desa lain dan sedangkan pendapatan Desa Pulau Majang dan Desa Tinting

Seligi dari subsektor ini 0 karena tidak adanya penduduk desa ini yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Desa Seriang dan Desa Tajum yang memiliki jarak paling jauh dengan perkebunan kelapa sawit memiliki pendapatan desa terendah ketiga dan keempat karena jumlah penduduk yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dari desa ini cukup sedikit, sehingga pendapatan desa dari subsektor perkebunan kelapasawit kecil. Dapat dilihat pada Gambar 5.12 mengenai pendapatan desa subsektor perkebunan kelapa sawit tahun 2009.





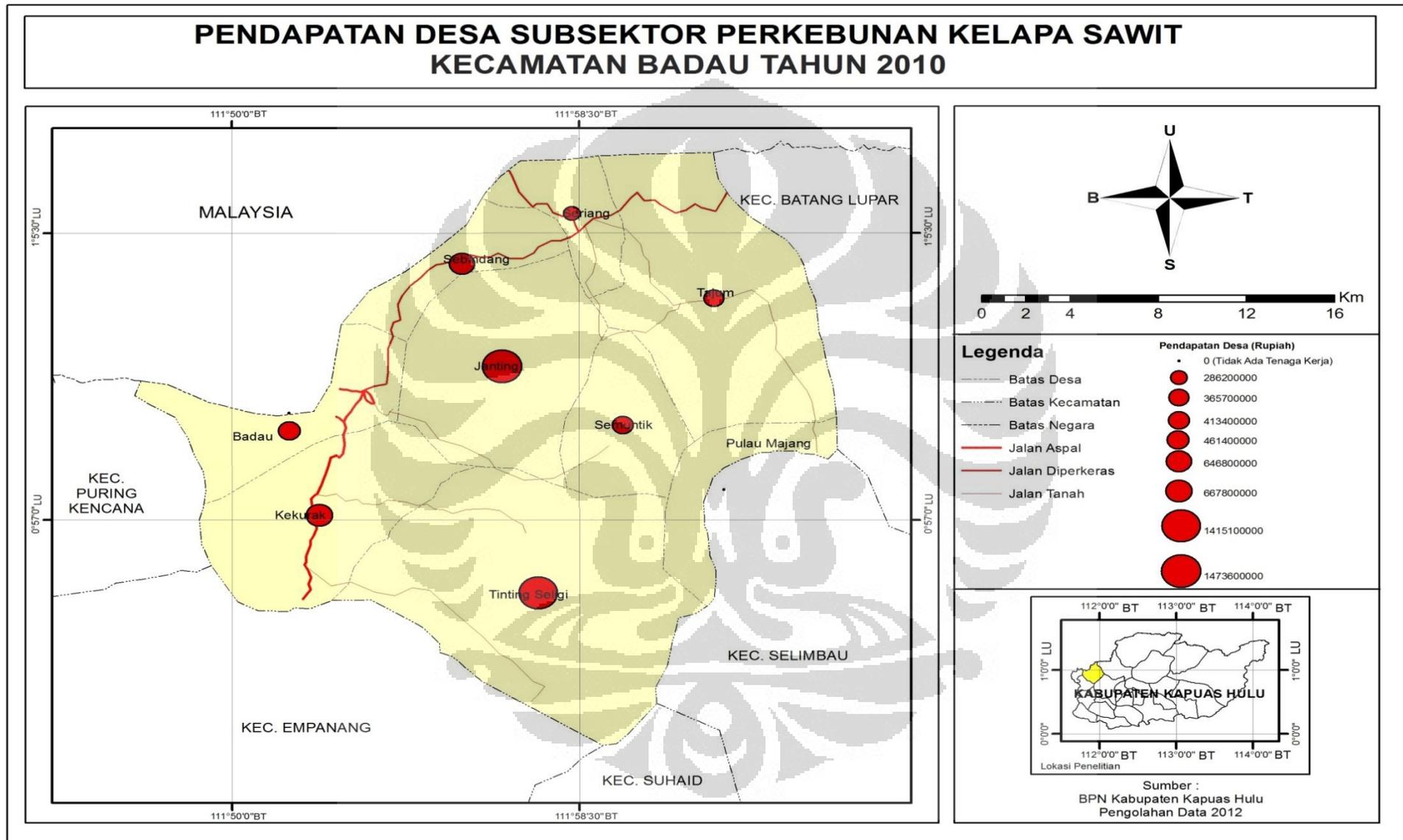
Gambar 5.12 Peta Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2009

Tabel 5.9 Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit
Kecamatan Badau Tahun 2010

Desa	Tenaga Kerja (Jiwa)		Pendapatan (dalam Ribu Rupiah)		Total Pendapatan Desa (dalam Ribu Rupiah)
	Lapangan	Kantor	Lapangan	Kantor	
Badau	25	3	397.500	63.900	461.400
Janting	90	2	1.431.000	42.600	1.473.600
Kekurak	42	0	667.800	0	667.800
Pulau Majang	0	0	0	0	0
Sebindang	38	2	604.200	42.600	646.800
Semuntik	26	0	413.400	0	413.400
Seriang	18	0	286.200	0	286.200
Tajum	23	0	365.700	0	365.700
Tinting Seligi	89	0	1.415.100	0	1.415.100
Total	351	7	5.580.900	149.100	5.717.400

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Berdasarkan Tabel 5.9 mengenai pendapatan desa subsektor perkebunan kelapa sawit tahun 2010, masih sama dengan tahun 2009 didominasi oleh Desa Janting dengan jumlah tenaga kerja terbanyak dan pendapatan terbesar dari subsektor perkebunan kelapa sawit yaitu sebesar Rp 1.473.600.000,00. Hal ini disebabkan oleh jarak yang cukup dekat antara Desa Janting dan perkebunan kelapa sawit yaitu sekitar 0,88 – 4,5 km dan Desa Pulau Majang tetap sama seperti tahun 2009 belum ada penduduknya yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, sehingga Desa Pulau Majang tidak memiliki pendapatan desa dari subsektor ini pada tahun 2010, karena jarak yang cukup jauh sekitar 15,7 km dan kondisi jalan yang tidak begitu baik, selain itu di Desa Pulau Majang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan karena lokasi desa ini berada dekat dengan Danau Sentarum. Dapat dilihat pada Gambar 5.13 mengenai pendapatan desa subsektor perkebunan kelapa sawit tahun 2010.



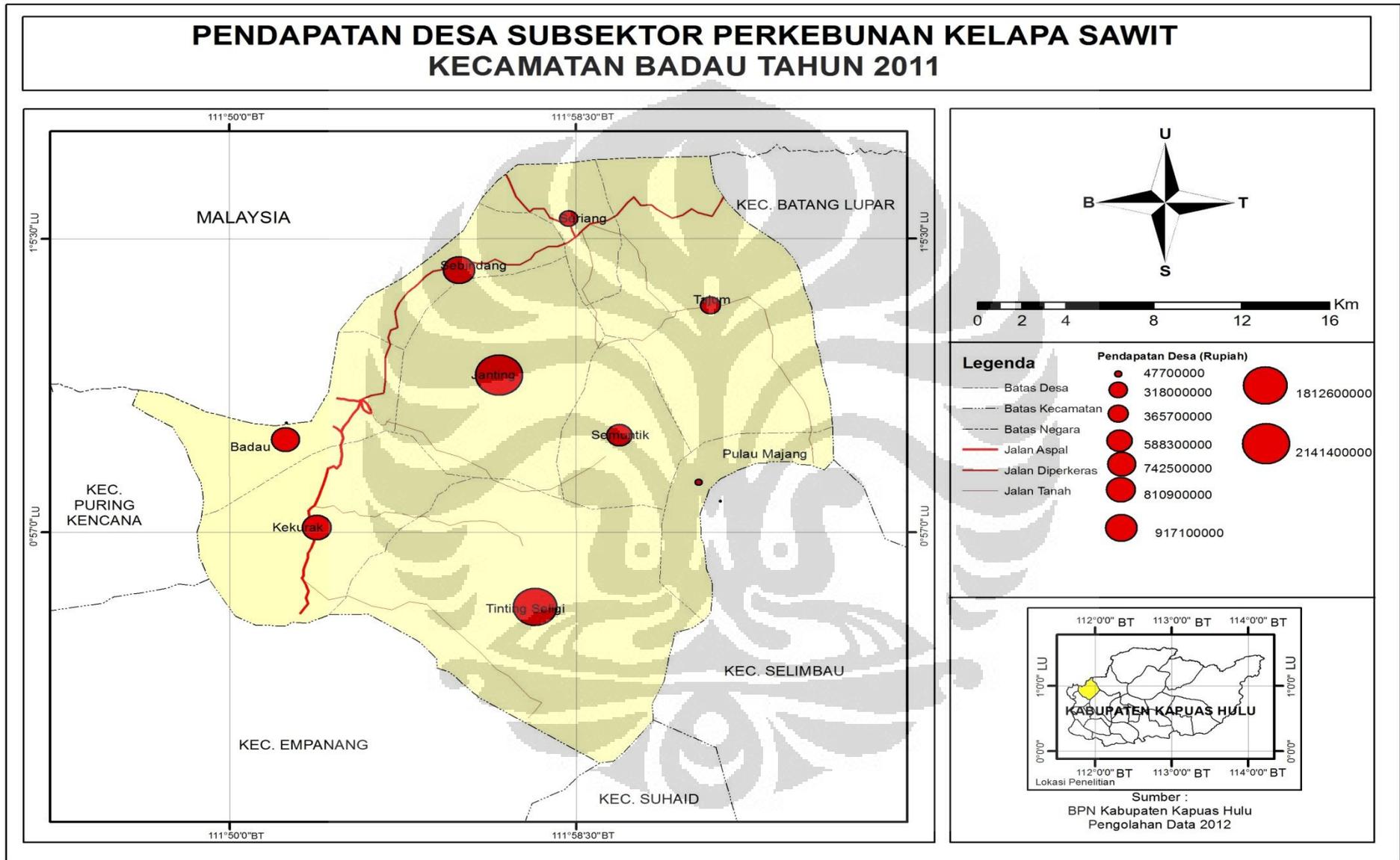
Gambar 5.13 Peta Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2010

Tabel 5.10 Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit
Kecamatan Badau Tahun 2011

Desa	Tenaga Kerja (Jiwa)		Pendapatan (dalam Ribu Rupiah)		Total Pendapatan Desa (dalam Ribu Rupiah)
	Lapangan	Kantor	Lapangan	Kantor	
Badau	40	5	636.000	106.500	742.500
Janting	132	2	2.098.800	42.600	2.141.400
Kekurak	51	0	810.900	0	810.900
Pulau Majang	3	0	47.700	0	47.700
Sebindang	55	2	874.500	42.600	917.100
Semuntik	37	0	588.300	0	588.300
Seriang	20	0	318.000	0	318.000
Tajum	23	0	365.700	0	365.700
Tinting Seligi	114	0	1.812.600	0	1.812.600
Total	475	9	7.552.500	191.700	7.744.200

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Pendapatan desa dari subsektor perkebunan kelapa sawit tahun 2011, sama dengan tahun-tahun sebelumnya masih didominasi oleh Desa Janting dengan pendapatan desa terbesar dan jumlah tenaga kerja terbanyak, dan Desa Pulau Majang juga tetap dengan posisi terendah dengan jumlah pendapatan desa dari subsektor perkebunan kelapa sawit terkecil dan jumlah tenaga kerja paling sedikit, tetapi pada tahun 2011 ini Desa Pulau Majang telah memiliki pendapatan desa dari subsektor perkebunan kelapa sawit dari tiga tenaga kerja penduduk desa ini yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dapat dilihat pada Tabel 5.10.



Gambar 5.14 Peta Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2011

Dari tahun 2009 hingga tahun 2011 terlihat jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit yang semakin bertambah karena luas perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau juga semakin bertambah, semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit maka pendapatan dari subsektor ini juga semakin meningkat. Dapat terlihat pada Gambar 5.15 mengenai jumlah tenaga kerja dari tahun 2009- 2011 dan Gambar 5.16 mengenai pendapatan dari subsektor perkebunan kelapa sawit. Dimana pada tahun 2009 pendapatan dari subsektor ini hanya sebesar Rp 2.820.300.000,00 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 175 kemudian meningkat menjadi Rp 5.717.400.000,00 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 358 tenaga kerja dan pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 7.744.200.000,00 ketika jumlah tenaga kerja mencapai 484 tenaga kerja. Dari tiga tahun yang diteliti, rata-rata dari sembilan desa menunjukkan kenaikan pendapatan desa dari tenaga kerja perkebunan kelapa sawit karena jumlah tenaga kerja tiap desa dari tahun 2009 hingga tahun 2011 selalu meningkat, maka semakin meningkat pula pendapatan desanya. Desa Janting adalah salah satu desa yang dekat dengan perkebunan kelapa sawit sehingga memiliki jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit terbanyak maka Desa Janting memiliki pendapatan desa terbesar selama tiga tahun (tahun 2009, 2010, dan 2011) diantara desa lainnya. Desa Seriang dan Desa Tajum adalah desa yang pada tahun 2010 dan 2011 tidak mengalami peningkatan pendapatan desa dari tenaga kerja perkebunan kelapa sawit karena tidak ada peningkatan jumlah tenaga kerja pada tahun 2010 di Desa Seriang dan pada tahun 2011 di Desa Tajum.



Gambar 5.15 Diagram Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit

[Sumber : Pengolahan Data 2012]



Gambar 5.16 Diagram Pendapatan Desa dari Tenaga Kerja

Perkebunan Kelapa Sawit

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

5.4 Indeks Ketimpangan Pendapatan

Untuk menghitung indeks ketimpangan pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit menurut Indeks Entropi Theil, rumus yang digunakan adalah :

$$I(y) = \sum (y_j / Y) \times \log [(y_j / Y) / (x_j / X)]$$

$I(y)$ = Indeks Entropi Theil

y_j = Pendapatan rata-rata tenaga kerja Perkebunan Kelapa Sawit Desa j

Y = Rata-rata y_j

x_j = Jumlah tenaga kerja subsektor perkebunan kelapa sawit Desa j

X = Jumlah tenaga kerja subsektor perkebunan kelapa sawit Kecamatan

Pendapatan rata-rata tenaga kerja perkebunan kelapa sawit didapat dari pendapatan desa berdasarkan harga konstan dibagi dengan jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di desa tersebut. Pendapatan berdasarkan harga konstan digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran pendapatan yang lebih akurat, karena belum tentu pendapatan yang lebih besar menghasilkan *output* yang lebih besar juga. Misalnya pada tahun 2009 pendapatan suatu desa Rp 500.000,00 dan pada tahun 2010 pendapatan desa Rp 600.000,00. Apakah dapat dikatakan telah terjadi kenaikan pendapatan sebesar 20% ? Nilai pendapatan yang lebih besar tidak berarti jumlah *output* lebih besar. Perekonomian tahun 2010 dikatakan lebih baik dibandingkan tahun 2009, bila *output* yang dihasilkan di tahun 2010 lebih banyak dibandingkan tahun 2009.

Untuk memperoleh pendapatan harga konstan, peneliti menentukan tahun dasar tahun 2000, karena tahun ini di Indonesia merupakan tahun yang biasa digunakan untuk menghitung harga konstan karena tahun 2000 perekonomian di Indonesia dianggap stabil.

$$\text{Pendapatan}_{t \text{ tahun}} = Q_{t \text{ tahun}} \times P_{2000} \quad (\text{dalam Rahardja dan Manurung, 2008})$$

Ket : Q : Quantity (Jumlah)

P : Price (Harga)

Dengan menggunakan harga beras, pada tahun 2009 harga per kilogram beras Rp 6.500,00 maka beras yang dapat dibeli pada tahun 2009 adalah (Rp 500.000,00 : Rp 7.000,00) kg atau sama dengan 76,92 kg. Sedangkan beras yang dapat dibeli pada tahun 2010 adalah (Rp 600.000,00 : Rp 8.000,00) kg atau sama dengan 75 kg. Berdasarkan perhitungan tersebut ternyata walaupun pendapatan tahun 2010 lebih besar tetapi *outputnya* lebih kecil dari tahun 2009. Dengan menggunakan rumus perhitungan berdasarkan harga konstan diatas dan menghilangkan pengaruh inflasi maka pendapatan tahun 2009 berdasarkan harga konstan adalah (76,92 kg x Rp 3.000,00) rupiah atau sama dengan Rp 230.760,00 dan pendapatan tahun 2010 berdasarkan harga konstan adalah (75 kg x Rp 3.000,00) rupiah atau sama dengan Rp 225.000,00. Pendapatan berdasarkan harga konstan tahun 2009 ternyata lebih besar dibandingkan pendapatan berdasarkan harga konstan tahun 2010. Nilai pendapatan tahun 2009 dan 2010 yang sebesar Rp 230.760,00 dan Rp 225.000,00 disebut sebagai pendapatan riil, sedangkan nilai pendapatan tahun 2009 dan tahun 2010 yang sebesar Rp 500.000, 00 dan Rp 600.000,00 disebut sebagai pendapatan nominal.

5.4.1 Indeks Ketimpangan Pendapatan Tahun 2009

a. Pendapatan Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2009

Harga beras tahun 2009 di Kecamatan Badau adalah sebesar Rp 6.500,00/ kg dan harga beras tahun 2000 di Kecamatan Badau yang dijadikan harga konstan adalah sebesar Rp 3.500,00/ kg. Dapat dilihat pada Tabel 5.11 mengenai pendapatan desa berdasarkan harga konstan tahun 2009.

Tabel 5.11 Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit
Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2009

Desa	Pendapatan Desa/ Pendapatan Nominal (dalam Rupiah)	<i>Output</i> Beras (kg)	Pendapatan Desa berdasarkan Harga Konstan (dalam Rupiah)
Badau	350.100.000	53.861,54	188.515.390
Janting	933.000.000	143.538,46	502.384.610
Kekurak	302.100.000	46.476,92	162.669.220
Pulau Majang	0	0	0
Sebindang	408.300.000	62.815,38	219.853.830
Semuntik	302.100.000	46.476,92	162.669.220
Seriang	286.200.000	44.030,77	154.107.695
Tajum	238.500.000	36.692,31	128.423.085
Tinting Seligi	0	0	0
Total	2.820.300.000	433.892,30	1.518.623.050

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Berdasarkan Tabel 5.11 tersebut terlihat bagaimana pendapatan riil (pendapatan berdasarkan harga konstan) tahun 2009 yang jauh lebih rendah dari pendapatan nominalnya di tahun yang sama. Desa Janting yang memiliki pendapatan desa subsektor perkebunan kelapa sawit terbesar ternyata memiliki pendapatan desa subsektor perkebunan kelapa sawit berdasarkan harga konstan terbesar juga, karena Desa Janting mampu membeli *output* beras dengan jumlah paling besar diantara desa lain. Desa Tinting Seligi dan Desa Pulau Majang tidak menghasilkan *output* beras dari pendapatan desa subsektor perkebunan kelapa sawit karena tidak ada penduduk di desa tersebut yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, pendapatan desa berdasarkan harga konstannya 0.

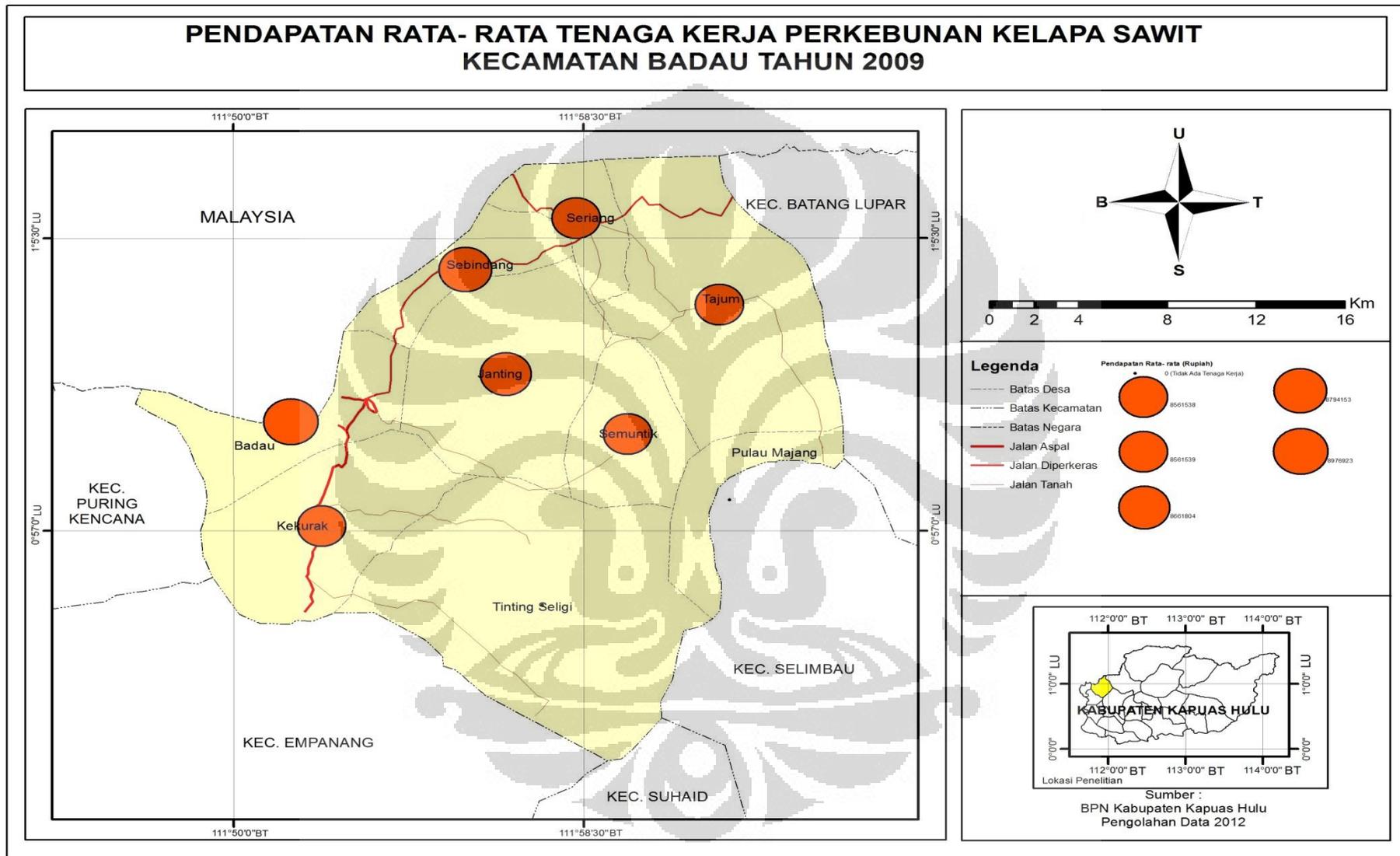
b. Pendapatan rata-rata tenaga kerja Tahun 2009

Pendapatan rata-rata tenaga kerja tahun 2009 didapat dari pendapatan desa berdasarkan harga konstan tahun 2009 dibagi dengan jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit tiap desa tahun 2009, akan menghasilkan rata-rata pendapatan tiap desa tahun 2009. Seperti terlihat pada Tabel 5.12. Pendapatan rata-rata tenaga kerja perkebunan kelapa sawit terbesar yaitu Desa Badau, karena desa ini memiliki jumlah tenaga kerja kantor yang lebih banyak dibanding desa lain yaitu 3 tenaga kerja, kemudian disusul Desa Sebidang dan Desa Janting yang memiliki jumlah tenaga kerja kantor sebanyak 2 tenaga kerja. Tenaga kerja kantor ini memiliki pendapatan personal yang lebih besar dari pendapatan personal tenaga kerja lapangan, sehingga akan mempengaruhi besar pendapatan rata-rata tenaga kerja di desa tersebut. Dapat dilihat pada Gambar 5.17.

Tabel 5.12 Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2009

Desa	Pendapatan berdasarkan harga konstan (dalam Rupiah)	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)	Pendapatan rata-rata tenaga kerja (dalam Rupiah/ Tahun)
Badau	188.515.390	21	8.976.923
Janting	502.384.610	58	8.661.804
Kekurak	162.669.220	19	8.561.538
Pulau Majang	0	0	0
Sebindang	219.853.830	25	8.794.153
Semuntik	162.669.220	19	8.561.538
Seriang	154.107.695	18	8.561.539
Tajum	128.423.085	15	8.561.539
Tinting Seligi	0	0	0
Total	1.518.623.050	175	60.679.034

[Sumber : Pengolahan Data 2012]



Gambar 5.17 Peta Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2009

c. Indeks Entropi Theil Tahun 2009

Dari hasil perhitungan pendapatan rata-rata tenaga kerja perkebunan kelapa sawit dan dengan menggunakan data jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit, dapat dihitung indeks ketimpangan pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau tahun 2009 adalah seperti Tabel 5.13.

Tabel 5.13 Indeks Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja

Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2009

Desa	Pendapatan Rata-rata (dalam Rupiah/ Tahun) {y}	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa) {x}	Indeks Ketimpangan
Badau	8.976.923	21	1,39
Janting	8.661.804	58	0,75
Kekurak	8.561.538	19	1,35
Pulau Majang	-	-	-
Sebindang	8.794.153	25	1,26
Semuntik	8.561.538	19	1,35
Seriang	8.561.539	18	1,39
Tajum	8.561.539	15	1,46
Tinting Seligi	-	-	-
Total	60.679.034	X = 175	8,95
Rata-rata	Y = 6.742.114,84		1,28

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Rata-rata indeks ketimpangan pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau pada tahun 2009 ini adalah sebesar 1,28. Indeks ini didapat dengan merata-rata indeks ketimpangan pendapatan dari tujuh desa, karena terdapat dua desa yang tidak memiliki pendapatan dari subsektor perkebunan kelapa sawit dan tidak adanya penduduk dari desa tersebut yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Indeks ketimpangan pada tahun ini sangat besar dibandingkan tahun 2010 dan 2011 karena tahun 2009 memiliki pendapatan rata-rata yang paling besar dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2011 dan memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2011, sehingga indeks

ketimpangannya menjadi besar dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2011. Dapat dilihat pada Gambar 5.18 mengenai indeks ketimpangan pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit tiap desa tahun 2009.

Untuk menganalisis bagaimana kaitan antara indeks ketimpangan dengan pendapatan dan jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit, maka perlu membagi pendapatan rata-rata tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, dan indeks ketimpangan menjadi beberapa kelas. Dengan rumus :

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Data terbesar} - \text{Data terkecil}}{\text{Kelas yang diinginkan}}$$

Kelas yang diinginkan

Maka didapat interval kelas pendapatan rata-rata tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja pada Lampiran 5. Berdasarkan kelas pendapatan rata-rata tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja, maka didapat hasil kelas untuk tiap desa sebagai berikut :

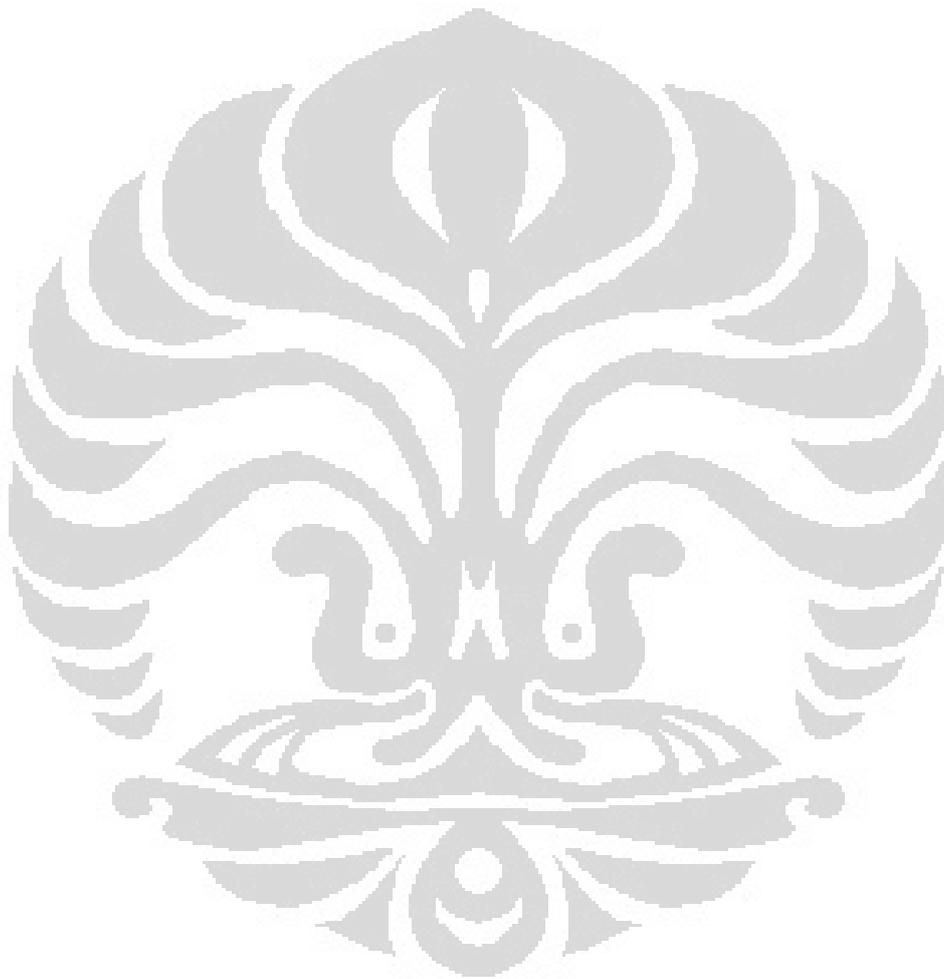
Tabel 5.14 Klasifikasi Kelas Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Indeks Ketimpangan Tahun 2009

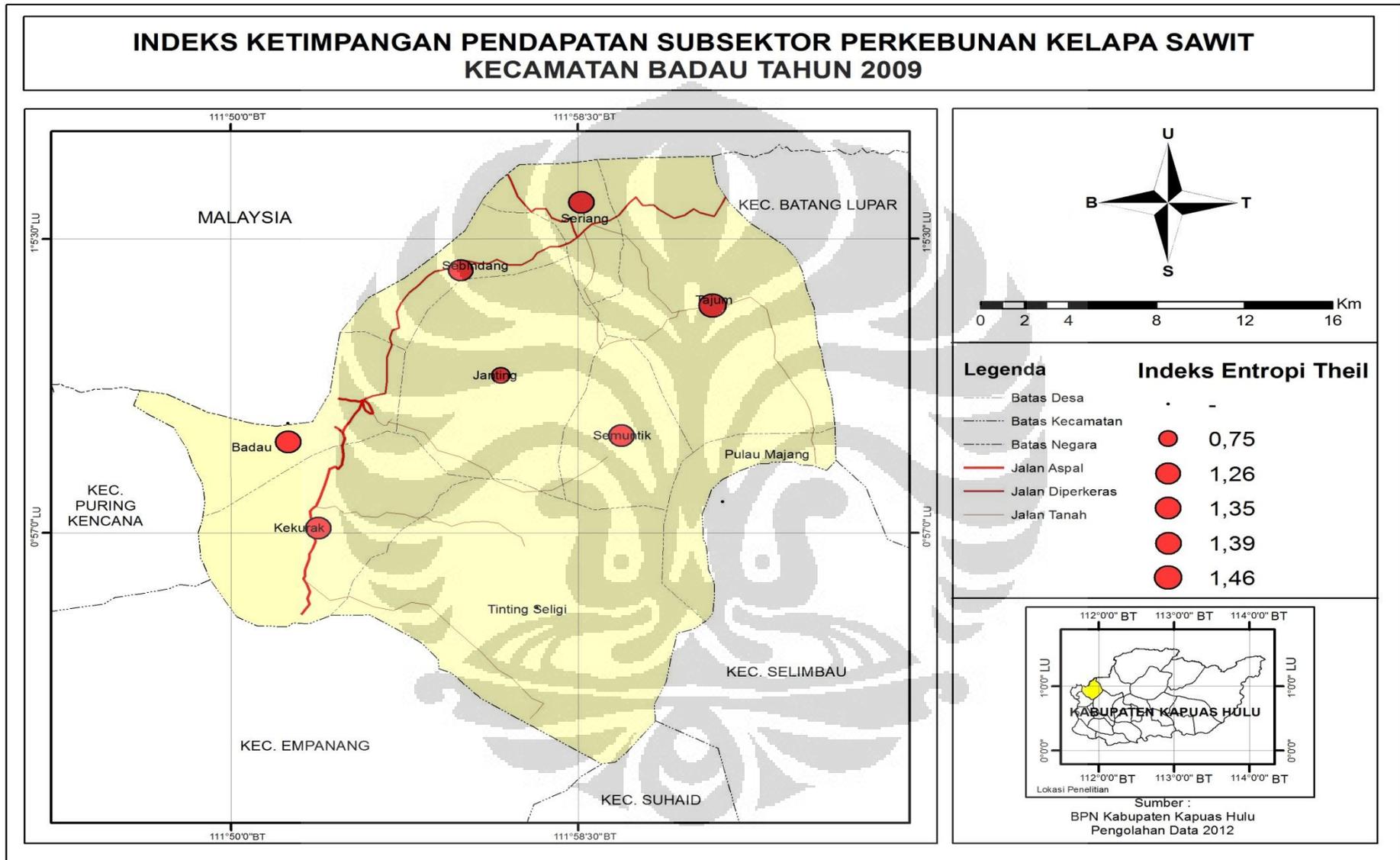
Desa	Pendapatan Rata-rata	Jumlah Tenaga Kerja	Indeks Ketimpangan
Badau	Tinggi	Rendah	Tinggi
Janting	Rendah	Tinggi	Rendah
Kekurak	Rendah	Rendah	Tinggi
Pulau Majang	-	-	-
Sebindang	Sedang	Rendah	Tinggi
Semuntik	Rendah	Rendah	Tinggi
Seriang	Rendah	Rendah	Tinggi
Tajum	Rendah	Rendah	Tinggi
Tinting Seligi	-	-	-

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Berdasarkan Tabel 5.13 dan Tabel 5.14 diatas terlihat bahwa desa dengan ketimpangan tinggi memiliki jumlah tenaga kerja yang rendah yaitu terjadi pada Desa Badau, Desa Kekurak, Desa Semuntik, Desa Seriang, Desa Tajum, dan Desa Sebindang. Sedangkan desa dengan indeks ketimpangan rendah terjadi ketika pendapatan rata-rata tenaga kerja rendah dan jumlah tenaga kerja

tinggi yaitu terjadi pada Desa Janting. Sedangkan desa yang tidak dihitung indeks ketimpangannya adalah desa yang terjadi ketika tidak memiliki pendapatan dari tenaga kerja perkebunan kelapa sawit karena tidak ada penduduk dari desa tersebut yang bekerja di perkebunan kelapa sawit desa tersebut adalah Desa Pulau Majang dan Tinting Seligi.





Gambar 5.18 Peta Indeks Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2009

5.4.2 Indeks Ketimpangan Pendapatan Tahun 2010

a. Pendapatan Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010

Harga beras tahun 2010 yang dijadikan harga konstan untuk menghitung *output* adalah sebesar Rp 8.000,00/ kg dan harga beras tahun 2000 adalah sebesar Rp 3.500,00/ kg. Dapat dilihat pada Tabel 5.15 mengenai pendapatan desa berdasarkan harga konstan tahun 2010.

Tabel 5.15 Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010

Desa	Pendapatan Desa/ Pendapatan Nominal (dalam Rupiah)	<i>Output</i> Beras (kg)	Pendapatan Desa berdasarkan Harga Konstan (dalam Rupiah)
Badau	461.400.000	57.675,00	201.862.500
Janting	1.473.600.000	184.200,00	644.700.000
Kekurak	667.800.000	83.475,00	292.162.500
Pulau Majang	0	0	0
Sebindang	646.800.000	80.850,00	282.975.000
Semuntik	413.400.000	51.675,00	180.862.500
Seriang	286.200.000	35.775,00	125.212.500
Tajum	365.700.000	45.712,50	159.993.750
Tinting Seligi	1.415.100.000	176.887,50	619.106.250
Total	5.717.400.000	716.250,00	2.506.875.000

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

b. Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja Tahun 2010

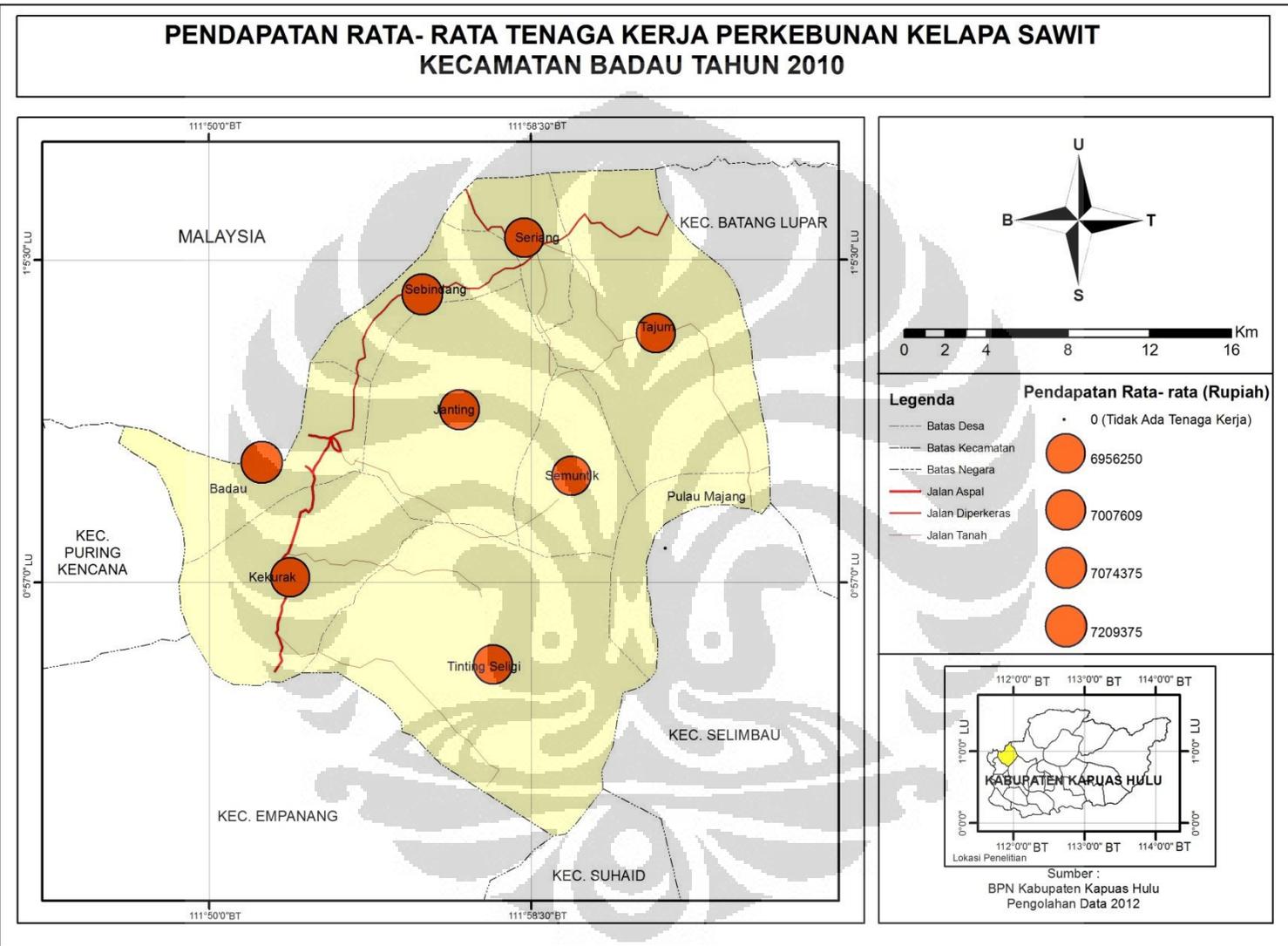
Pendapatan rata-rata tenaga kerja perkebunan kelapa sawit tahun 2010 didapat dari pendapatan desa berdasarkan harga konstan perkebunan kelapa sawit tahun 2010 dibagi dengan jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit tiap desa tahun 2010, akan menghasilkan rata-rata pendapatan tenaga kerja tahun 2010. Seperti terlihat pada Tabel 5.16. Pendapatan rata-rata tenaga

kerja terbesar masih sama seperti tahun 2009 yaitu Desa Badau, karena desa ini memiliki jumlah tenaga kerja kantor yang lebih banyak dibanding desa lain yaitu 3 tenaga kerja, kemudian disusul Desa Sebidang dan Desa Janting yang memiliki jumlah tenaga kerja kantor sebanyak 2 tenaga kerja. Dapat dilihat pada Gambar 5.19. Desa lain seluruh penduduk yang bekerja di perkebunan kelapa sawit bekerja di lapangan sebagai buruh perkebunan, sehingga pendapatan desa yang didapat hanya bergantung dari jumlah tenaga kerja lapangan, yang berarti rata-rata pendapatannya sama dengan pendapatan per tenaga kerjanya. Tenaga kerja kantor ini memiliki pendapatan personal yang lebih besar dari pendapatan personal tenaga kerja lapangan, sehingga akan mempengaruhi besar pendapatan rata-rata tenaga kerja.

Tabel 5.16 Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2010

Desa	Pendapatan berdasarkan harga konstan (dalam Rupiah)	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)	Pendapatan Rata-rata (dalam Rupiah/ Tahun)
Badau	201.862.500	28	7.209.375
Janting	644.700.000	92	7.007.609
Kekurak	292.162.500	42	6.956.250
Pulau Majang	0	0	0
Sebidang	282.975.000	40	7.074.375
Semuntik	180.862.500	26	6.956.250
Seriang	125.212.500	18	6.956.250
Tajum	159.993.750	23	6.956.250
Tinting Seligi	619.106.250	89	6.956.250
Total	2.506.875.000	358	56.072.609

[Sumber : Pengolahan Data 2012]



Gambar 5.19 Peta Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2010

c. Indeks Entropi Theil Tahun 2010

Dari hasil perhitungan pendapatan rata-rata tenaga kerja subsektor perkebunan kelapa sawit dan dengan menggunakan data jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit, dapat dihitung indeks ketimpangan pendapatan tenaga kerja Entropi Theil tahun 2010 adalah seperti Tabel 5.17.

Tabel 5.17 Indeks Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja

Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2010

Desa	Pendapatan Rata-rata (dalam Rupiah/ Tahun) {y}	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa) {x}	Indeks Ketimpangan
Badau	7.209.375	28	1,35
Janting	7.007.609	92	0,71
Kekurak	6.956.250	42	1,08
Pulau Majang	-	-	-
Sebindang	7.074.375	40	1,16
Semuntik	6.956.250	26	1,34
Seriang	6.956.250	18	1,51
Tajum	6.956.250	23	1,42
Tinting Seligi	6.956.250	89	0,73
Total	56.072.609	X = 358	9,3
Rata-rata	Y = 6.230.289,85		1,16

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 5.17 indeks ketimpangan pendapatan Entropi Theil di Kecamatan Badau Tahun 2010 yang disebabkan oleh subsektor perkebunan kelapa sawit adalah sebesar 1,16. Angka indeks ini dari tahun 2009 semakin kecil yang berarti semakin kecil pula ketidakmerataan yang terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh semakin berkurang desa yang tidak terjadi ketimpangan, pada tahun ini Desa Tinting Seligi sudah mulai menunjukkan ketimpangan sebesar 0,73 yang tadinya pada tahun 2009 Desa Tinting Seligi tidak memiliki nilai indeks ketimpangan tetapi pada tahun ini Desa Tinting Seligi menyumbang pendapatan rata-rata dari subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp 6.956.250,00 sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan pada Desa Tinting Seligi. Dapat dilihat

pada Gambar 5.20 mengenai indeks ketimpangan pendapatan tenaga kerja subsektor perkebunan kelapa sawit tahun 2010.

Sama seperti tahun sebelumnya, untuk menganalisis bagaimana kaitan antara indeks ketimpangan dengan pendapatan dan jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit, maka perlu membagi pendapatan rata-rata tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja menjadi beberapa kelas. Dengan rumus :

Interval Kelas = $\frac{\text{Data terbesar} - \text{Data terkecil}}{\text{Kelas yang diinginkan}}$

Maka didapat interval kelas pendapatan rata-rata tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, dan indeks ketimpangan pada Lampiran 6. Berdasarkan kelas pendapatan rata-rata tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja, maka didapat hasil kelas untuk tiap desa sebagai berikut :

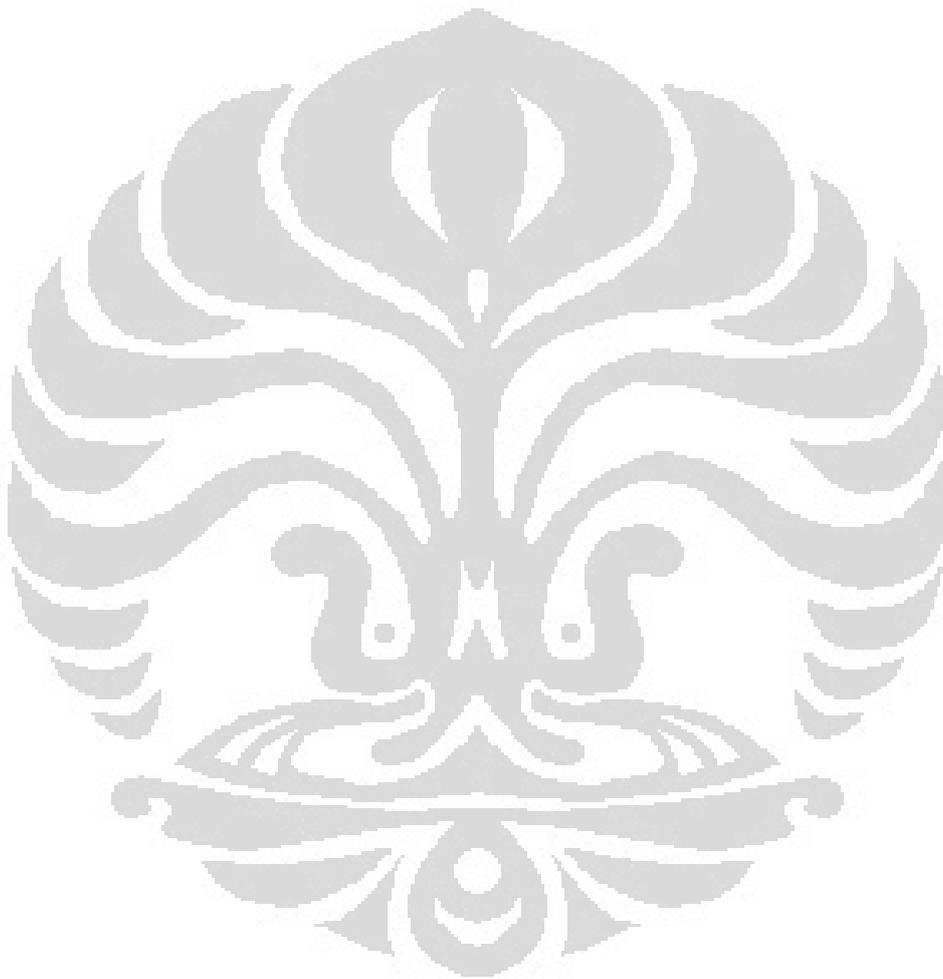
Tabel 5.18 Klasifikasi Kelas Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Indeks Ketimpangan Tahun 2010

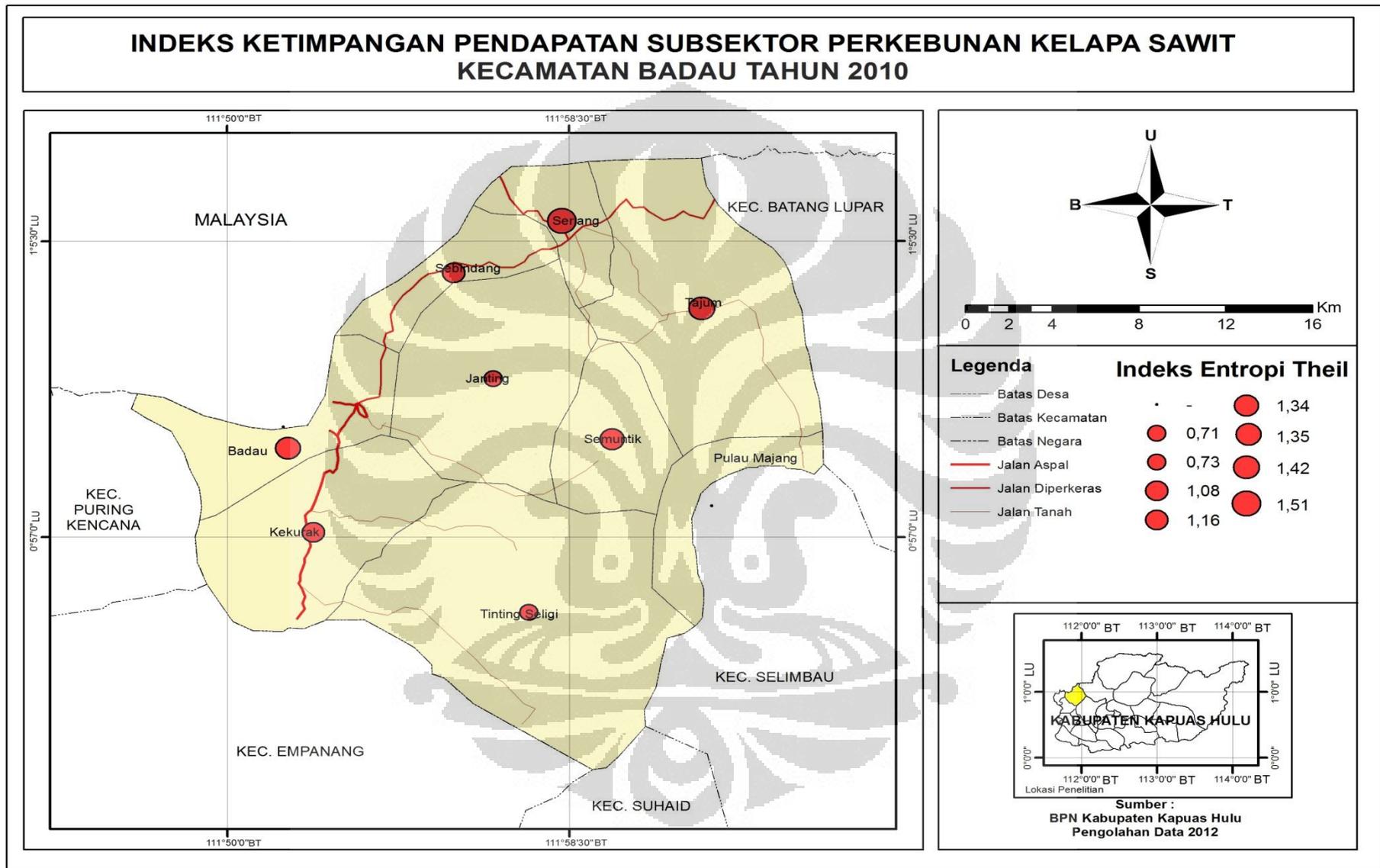
Desa	Pendapatan Rata-rata	Jumlah Tenaga Kerja	Indeks Ketimpangan
Badau	Tinggi	Rendah	Tinggi
Janting	Rendah	Tinggi	Rendah
Kekurak	Rendah	Rendah	Sedang
Pulau Majang	-	-	-
Sebindang	Sedang	Rendah	Sedang
Semuntik	Rendah	Rendah	Tinggi
Seriang	Rendah	Rendah	Tinggi
Tajum	Rendah	Rendah	Tinggi
Tinting Seligi	Rendah	Tinggi	Rendah

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Berdasarkan Tabel 5.17 dan Tabel 5.18 diatas terlihat bahwa desa dengan ketimpangan tinggi memiliki pendapatan rata-rata yang tinggi dan rendah tetapi dengan jumlah tenaga kerja yang rendah yaitu terjadi pada Desa Badau, Desa Semuntik, Desa Seriang, dan Desa Tajum. Sedangkan desa dengan indeks ketimpangan sedang terjadi ketika pendapatan rata-rata tenaga

kerja rendah dan sedang dan jumlah tenaga kerja tinggi yaitu rendah terjadi pada Desa Kekurak dan Desa Sebindang. Sedangkan desa dengan ketimpangan rendah pada tahun ini terjadi pada desa yang memiliki pendapatan dari tenaga kerja perkebunan kelapa sawit rendah tetapi jumlah tenaga kerjanya tinggi terjadi pada Desa Janting dan Tinting Seligi.





Gambar 5.20 Peta Indeks Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2010

5.4.3 Indeks Ketimpangan Pendapatan Tahun 2011

a. Pendapatan Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2011

Harga beras tahun 2011 adalah sebesar Rp 9.500,00/ kg dan harga beras tahun 2000 yang dijadikan harga konstan untuk menghitung *output* adalah sebesar Rp 3.500,00/ kg. Dapat dilihat pada Tabel 5.19 mengenai pendapatan desa berdasarkan harga konstan tahun 2011.

Tabel 5.19 Pendapatan Desa Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2011

Desa	Pendapatan Desa/ Pendapatan Nominal (dalam Rupiah)	<i>Output</i> Beras (kg)	Pendapatan Desa berdasarkan Harga Konstan (dalam Rupiah)
Badau	742.500.000	78.157,89	273.552.615
Janting	2.141.400.000	225.410,53	788.936.855
Kekurak	810.900.000	85.357,89	298.752.615
Pulau Majang	47.700.000	5.021,05	17.573.675
Sebindang	917.100.000	96.536,84	337.878.940
Semuntik	588.300.000	61.926,32	216.742.120
Seriang	318.000.000	33.473,68	117.157.880
Tajum	365.700.000	38.494,74	134.731.590
Tinting Seligi	1.812.600.000	190.800,00	667.800.000
Total	7.744.200.000	815.178,94	2.853.129.290

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

b. Pendapatan Rata-rata Tahun 2011

Pendapatan rata-rata tahun 2011 didapat dari pendapatan desa berdasarkan harga konstan perkebunan kelapa sawit tahun 2011 dibagi dengan jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit tiap desa tahun 2011, akan menghasilkan rata-rata pendapatan tenaga kerja tiap desa tahun 2011. Seperti terlihat pada Tabel 5.20. Pendapatan rata-rata terbesar masih sama

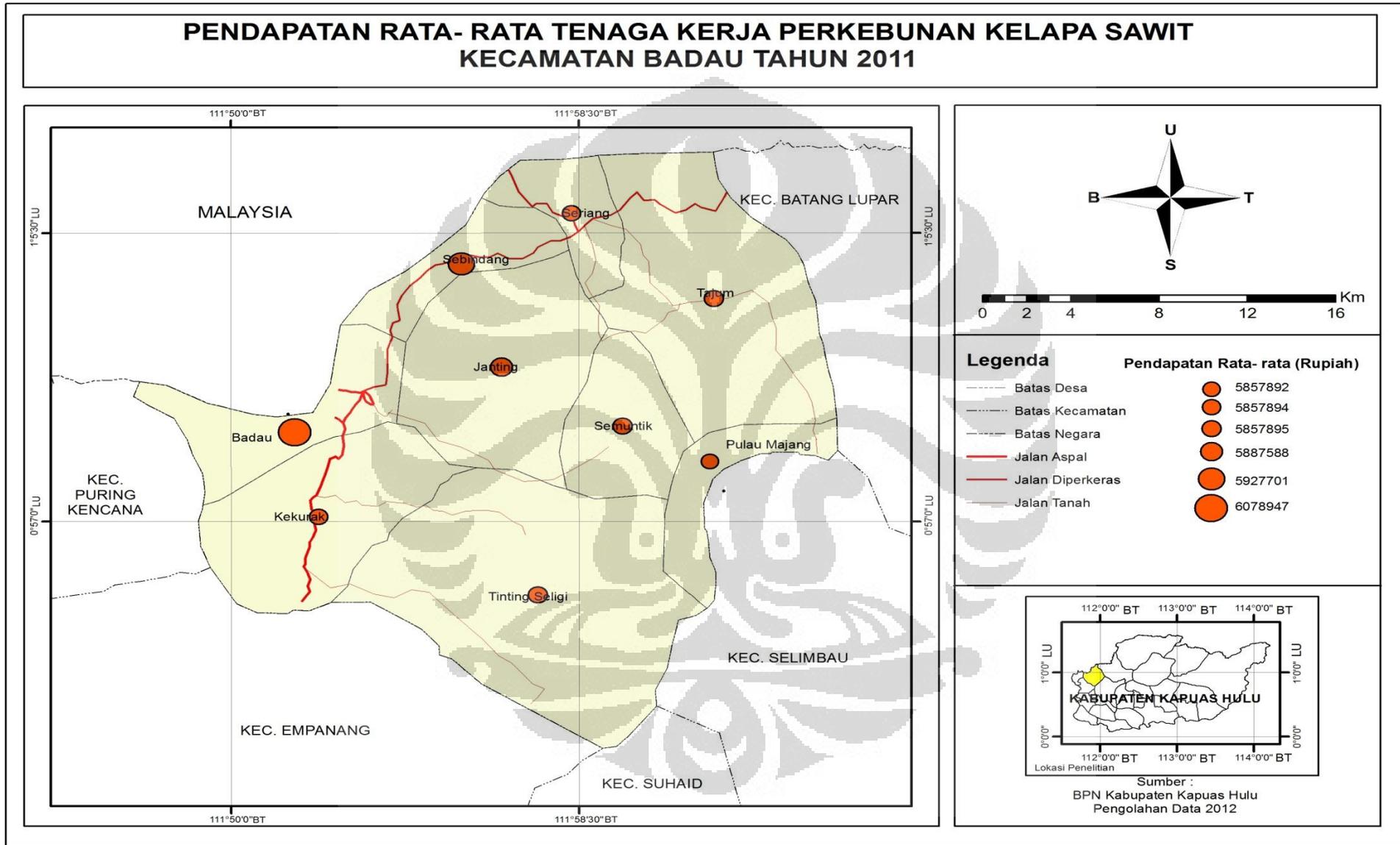
seperti tahun 2009 dan 2010 yaitu Desa Badau kemudian disusul Desa Sebindang dan Desa Janting. Lihat Gambar 5.21.

Tabel 5.20 Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja Subsektor

Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2011

Desa	Pendapatan berdasarkan harga konstan (dalam Rupiah)	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)	Pendapatan Rata-rata (dalam Rupiah/ Tahun)
Badau	273.552.615	45	6.078.947
Janting	788.936.855	134	5.887.588
Kekurak	298.752.615	51	5.857.894
Pulau Majang	17.573.675	3	5.857.892
Sebindang	337.878.940	57	5.927.701
Semuntik	216.742.120	37	5.857.895
Seriang	117.157.880	20	5.857.894
Tajum	134.731.590	23	5.857.895
Tinting Seligi	667.800.000	114	5.857.895
Total	2.853.129.290	484	53.041.601

[Sumber : Pengolahan Data 2012]



Gambar 5.21 Peta Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2011

c. Indeks Entropi Theil Tahun 2011

Dari hasil perhitungan pendapatan rata-rata subsektor perkebunan kelapa sawit dan dengan menggunakan data jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit, dapat dihitung indeks ketimpangan pendapatan Entropi Theil tahun 2011 adalah seperti terlihat pada Tabel 5.21

Tabel 5.21 Indeks Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja
Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2011

Desa	Pendapatan Rata- rata (dalam Rupiah/ Tahun) {y}	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa) {x}	Indeks Ketimpangan
Badau	6.078.947	45	1,09
Janting	5.887.588	134	0,55
Kekurak	5.857.894	51	0,94
Pulau Majang	5.857.892	3	2,18
Sebindang	5.927.701	57	0,93
Semuntik	5.857.895	37	1,10
Seriang	5.857.894	20	1,38
Tajum	5.857.895	23	1,28
Tinting Seligi	5.857.895	114	0,61
Total	53.041.601	X = 484	10,06
Rata-rata	Y = 5.893.511,26		1,12

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 5.21 indeks ketimpangan pendapatan Entropi Theil di Kecamatan Badau Tahun 2011 yang disebabkan oleh subsektor perkebunan kelapa sawit adalah sebesar 1,12. Angka indeks ini dari tahun 2009 semakin lama semakin besar yang berarti semakin besar pula ketidakmerataan yang terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh semakin berkurang desa yang tidak terjadi ketimpangan, pada tahun ini Desa Pulau Majang sudah tidak lagi mengalami pemerataan, Desa Pulau Majang memiliki angka indeks 2,18 ketimpangan sebesar 0,73 yang tadinya pada tahun 2009 Desa Tinting Seligi memiliki nilai indeks 0 atau tidak terjadi ketimpangan tetapi pada tahun ini Desa Tinting Seligi menyumbang pendapatan rata-rata dari subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp 6.956.250,00 sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Dapat dilihat pada Gambar 5.16

mengenai indeks ketimpangan pendapatan tahun 2011. Dapat dilihat pada Gambar 5.22 mengenai indeks ketimpangan ekonomi subsektor perkebunan kelapa sawit tahun 2011.

Untuk menganalisis bagaimana kaitan antara indeks ketimpangan pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit, maka perlu membagi pendapatan rata-rata tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja menjadi beberapa kelas. Dengan rumus :

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Data terbesar} - \text{Data terkecil}}{\text{Kelas yang diinginkan}}$$

Kelas yang diinginkan

Maka didapat interval kelas pendapatan rata-rata tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja pada Lampiran 7. Berdasarkan kelas pendapatan rata-rata tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja, maka didapat hasil kelas untuk tiap desa sebagai berikut :

Tabel 5.22 Klasifikasi Kelas Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Indeks Ketimpangan Tahun 2011

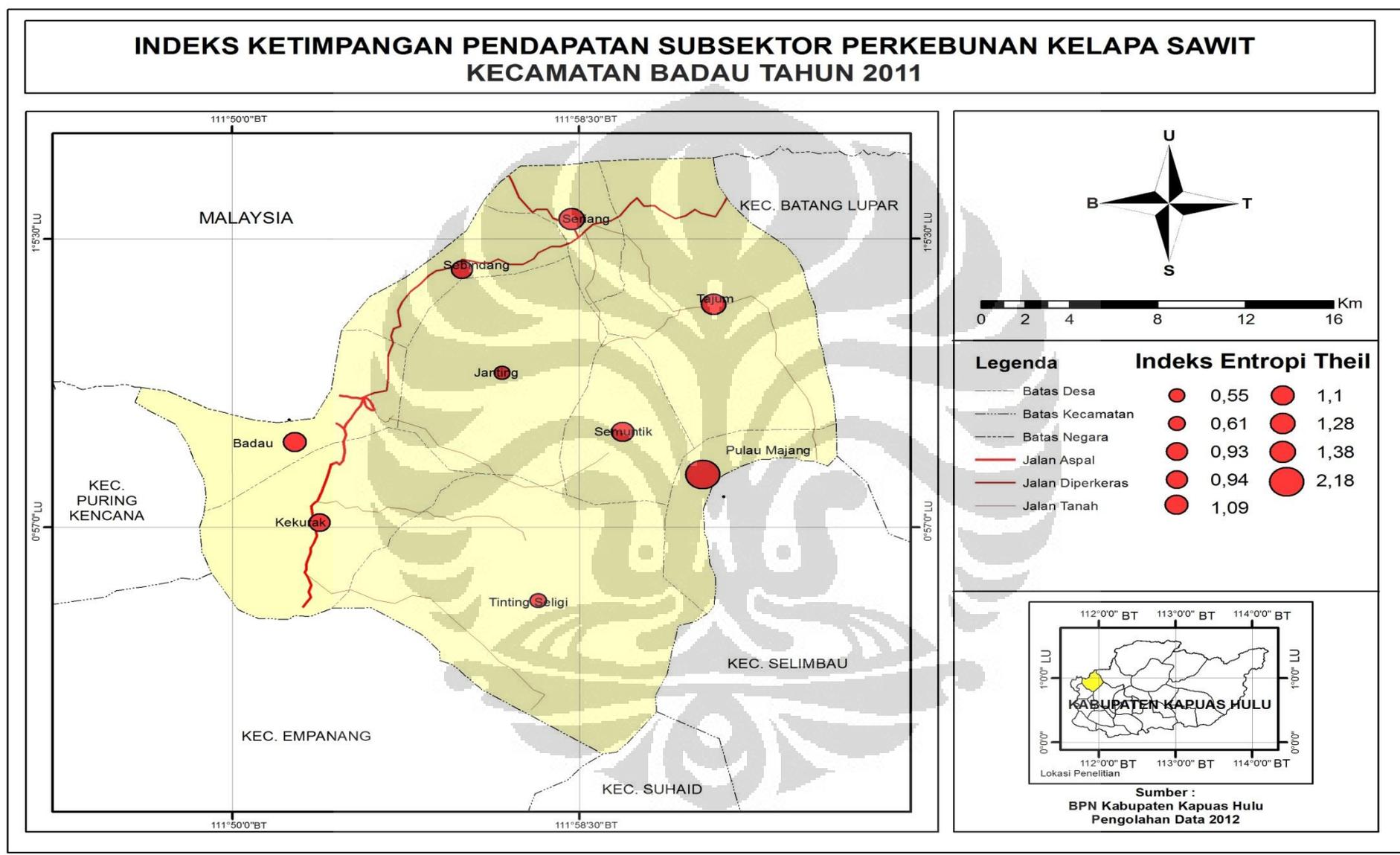
Desa	Pendapatan Rata-rata	Jumlah Tenaga Kerja	Indeks Ketimpangan
Badau	Tinggi	Rendah	Rendah
Janting	Rendah	Tinggi	Rendah
Kekurak	Rendah	Sedang	Rendah
Pulau Majang	Rendah	Rendah	Tinggi
Sebindang	Rendah	Sedang	Rendah
Semuntik	Rendah	Rendah	Sedang
Seriang	Rendah	Rendah	Sedang
Tajum	Rendah	Rendah	Sedang
Tinting Seligi	Rendah	Tinggi	Rendah

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Berdasarkan Tabel 5.21 dan Tabel 5.22 diatas terlihat bahwa desa dengan ketimpangan tinggi memiliki pendapatan rata-rata yang rendah dan jumlah tenaga kerja yang rendah yaitu terjadi pada Desa Pulau Majang. Sedangkan desa dengan indeks ketimpangan sedang terjadi ketika pendapatan rata-rata tenaga kerja rendah dan jumlah tenaga kerja rendah yaitu terjadi pada Desa Semuntik, Desa Seriang, dan Desa Tajum. Sedangkan desa dengan ketimpangan rendah pada tahun ini

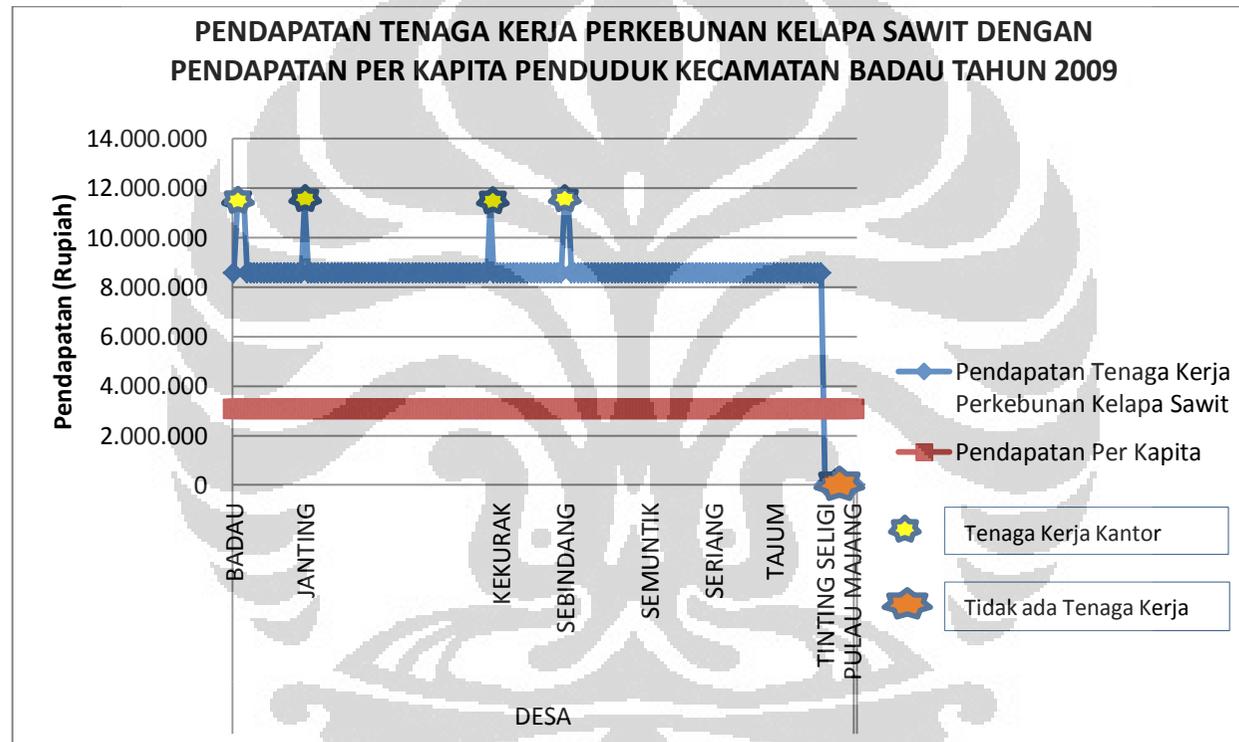
memiliki pendapatan rata-rata tenaga kerja tinggi dan rendah dan memiliki jumlah tenaga kerja yang rendah dan tinggi yang terjadi di Desa Badau, Janting, dan Tinting Seligi.

Indeks ketimpangan dari tahun 2009 hingga tahun 2011 yang terjadi di Kecamatan Badau cenderung menurun seperti yang terjadi pada Desa Badau, Desa Kekurak, Desa Janting, Desa Sebindang, Desa Tajum, dan Desa Semuntik. Karena pendapatan rata-rata tenaga kerja di desa tersebut cenderung menurun tetapi jumlah tenaganya meningkat dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Sedangkan untuk Desa Pulau Majang cenderung naik indeks ketimpangannya karena pendapatan rata-rata di desa ini meningkat karena pada tahun 2009 dan 2010 Desa Pulau Majang tidak memiliki pendapatan dari tenaga kerja sektor perkebunan kelapa sawit, baru pada tahun 2011 Desa Pulau Majang memiliki pendapatan dari sektor perkebunan kelapa sawit. Untuk Desa Tinting seligi dan Desa Seriang adalah desa yang indeks ketimpangan pendapatannya naik dari tahun 2009 ke tahun 2010 tetapi turun dari tahun 2010 ke tahun 2011. Karena pada tahun 2010 Desa Seriang mengalami penurunan pendapatan rata-rata tetapi jumlah tenaganya tetap tidak bertambah ataupun berkurang kemudian indeks ketimpangan di Desa Seriang menurun kembali pada tahun 2011 karena pendapatan rata-rata tenaganya menurun sedangkan jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawitnya meningkat. Sedangkan Desa Tinting Seligi pada tahun 2010 mengalami ketimpangan sebesar 0,73 sebelumnya tahun 2009 tidak terjadi ketimpangan, karena tidak ada pendapatan dari tenaga kerja subsektor perkebunan kelapa sawit perkebunan kelapa sawit baru pada tahun 2010 baru pada tahun 2011 ketika pendapatan rata-rata tenaga kerja menurun sedangkan jumlah tenaga kerja meningkat maka mengakibatkan indeks ketimpangan turun.

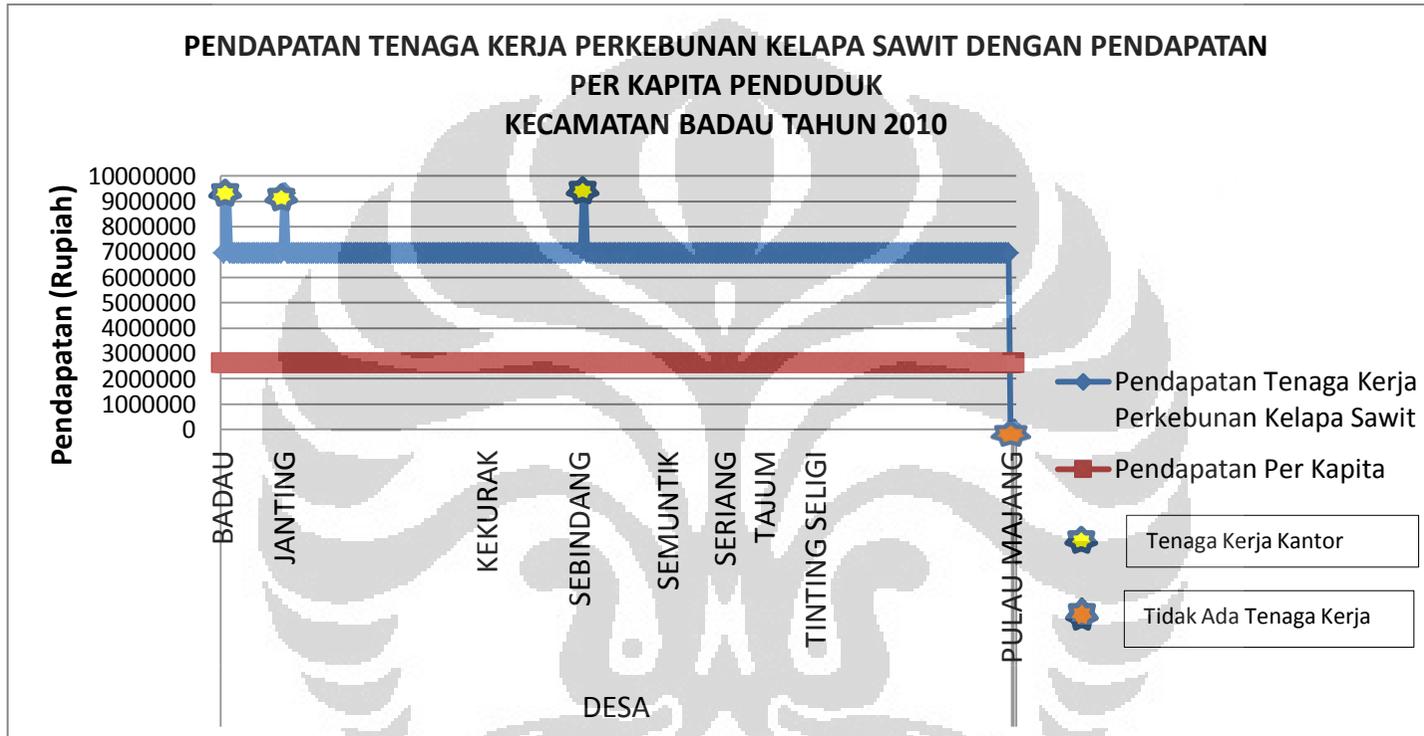


Gambar 5.22 Peta Indeks Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Badau Tahun 2011

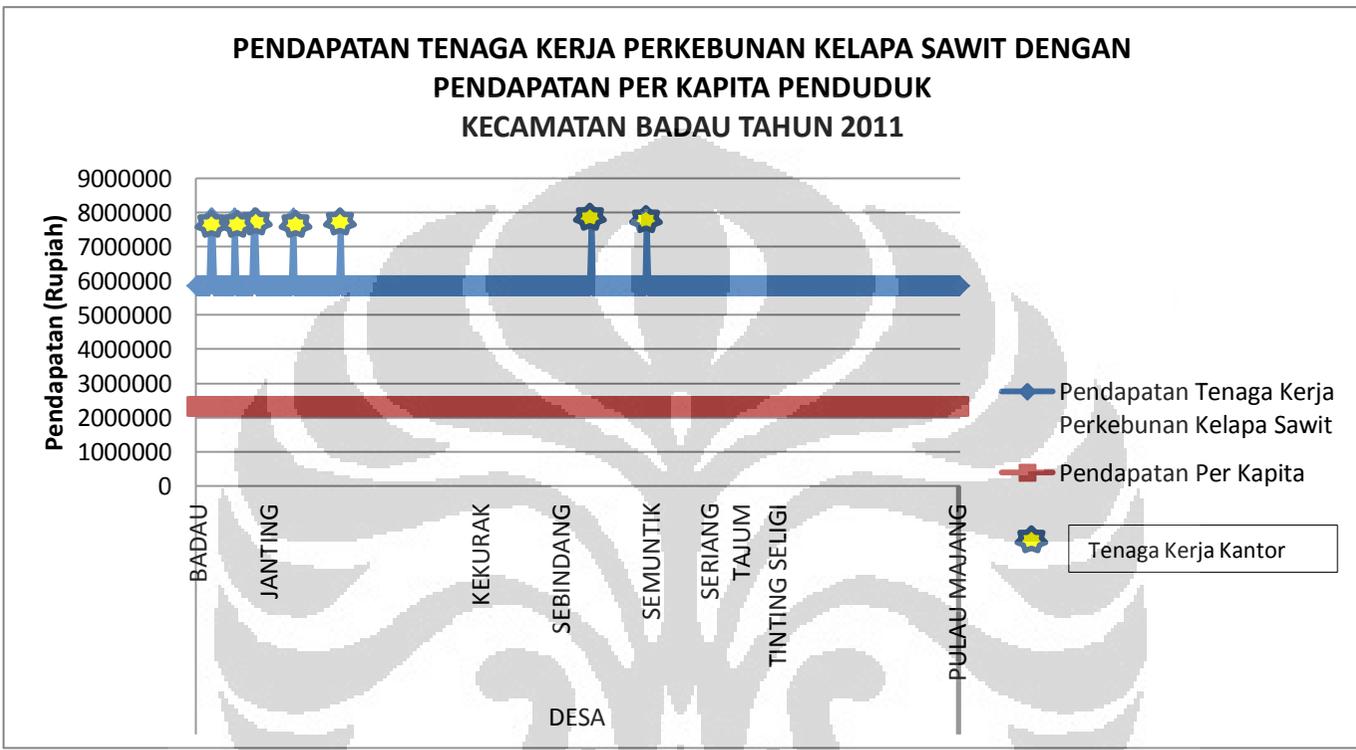
5.5 Perbandingan Pendapatan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pendapatan Per kapita Penduduk Kecamatan Badau



Gambar 5.23 Grafik Pendapatan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pendapatan Per kapita Penduduk Kecamatan Badau Tahun 2009



Gambar 5.24 Grafik Pendapatan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pendapatan Per kapita Penduduk Kecamatan Badau Tahun 2010



Gambar 5.25 Grafik Pendapatan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pendapatan Per kapita Penduduk Kecamatan Badau Tahun 2011

Berdasarkan Gambar 5.17, 5.18, dan 5.19 terlihat bahwa pendapatan per kapita penduduk Kecamatan Badau selalu lebih rendah dari pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit dari tahun 2009 hingga 2011. Pada tahun 2009, ketika pendapatan per kapita Kecamatan Badau sebesar Rp 3.041.811,00/ tahun, pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit berada jauh diatas pendapatan per kapita penduduk Kecamatan Badau yaitu sebesar Rp 8.561.525,00/ tahun – Rp 11.469.220,00/ tahun walaupun pada Desa Tinting Seligi dan Desa Pulau Majang pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawitnya 0 karena tidak ada pendapatan desa yang masuk dari tenaga kerja perkebunan kelapa sawit pada tahun 2009.

Pada tahun 2010, pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit maupun pendapatan per kapita penduduk Kecamatan Badau menurun sebesar 18,75 % dan 13,57 % dari tahun 2009 menjadi Rp 6.956.250,00 – Rp 9.318.750,00/ tahun untuk pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit, tetapi pendapatan Desa Tinting Seligi justru meningkat karena pada tahun ini sudah ada tenaga kerja perkebunan kelapa sawit yang berasal dari Desa Tinting Seligi dan Rp 2.629.013,00/ tahun untuk pendapatan per kapita penduduk Kecamatan Badau. Sama halnya dengan tahun 2011, pendapatan di Kecamatan Badau semakin menurun dari tahun 2010 sebesar 18,75 % menjadi Rp 5.857.880,00/ tahun – Rp 7.847.385,00/ tahun untuk pendapatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit dan menurun sebesar 13,65% menjadi Rp 2.313.102,00/ tahun untuk pendapatan per kapita penduduk Kecamatan Badau.

Penurunan pendapatan per kapita penduduk Kecamatan Badau dikarenakan persentase peningkatan jumlah penduduk jauh lebih besar dibandingkan peningkatan PDRB berdasarkan harga konstan yang terjadi.

BAB VI

KESIMPULAN

Permintaan akan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit semakin meningkat dari tahun 2009 hingga tahun 2011, dikarenakan semakin bertambah luas perkebunan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Badau. Dengan semakin meningkat permintaan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit maka penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Badau semakin meningkat, walaupun angkatan kerja di Kecamatan Badau belum semua terserap tenaga kerja perkebunan kelapa sawit, karena cukup banyak tenaga kerja yang didatangkan dari luar Kecamatan Badau. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi dipengaruhi oleh jarak saja, semakin dekat jarak pemukiman dengan perkebunan kelapa sawit maka semakin banyak jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dan sebaliknya. Kondisi jalan tidak menjadi pengaruh bagi tenaga kerja perkebunan kelapa sawit untuk melakukan mobilisasi ke lokasi kerja (perkebunan kelapa sawit).

Ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh subsektor perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau semakin lama semakin menunjukkan penurunan ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Badau. Dimana dari ketiga tahun yang diteliti rata-rata indeks ketimpangan pendapatan tiap desa semakin menurun, karena pendapatan rata-ratanya semakin menurun sedangkan jumlah tenaga kerja bertambah. Desa-desa yang mengalami penurunan indeks ketimpangan dari tahun 2009- 2011 adalah Desa Badau, Desa Janting, Desa Kekurak, Desa Sebindang, dan Desa Tajum. Sedangkan desa yang cenderung meningkat indeks ketimpangannya adalah Desa Pulau Majang, Desa Seriang dan Desa Tinting Seligi. Pendapatan per kapita yang turun mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang turun dari tahun 2009 hingga tahun 2011 meskipun daya serap naik dari tahun 2009 hingga tahun 2011.

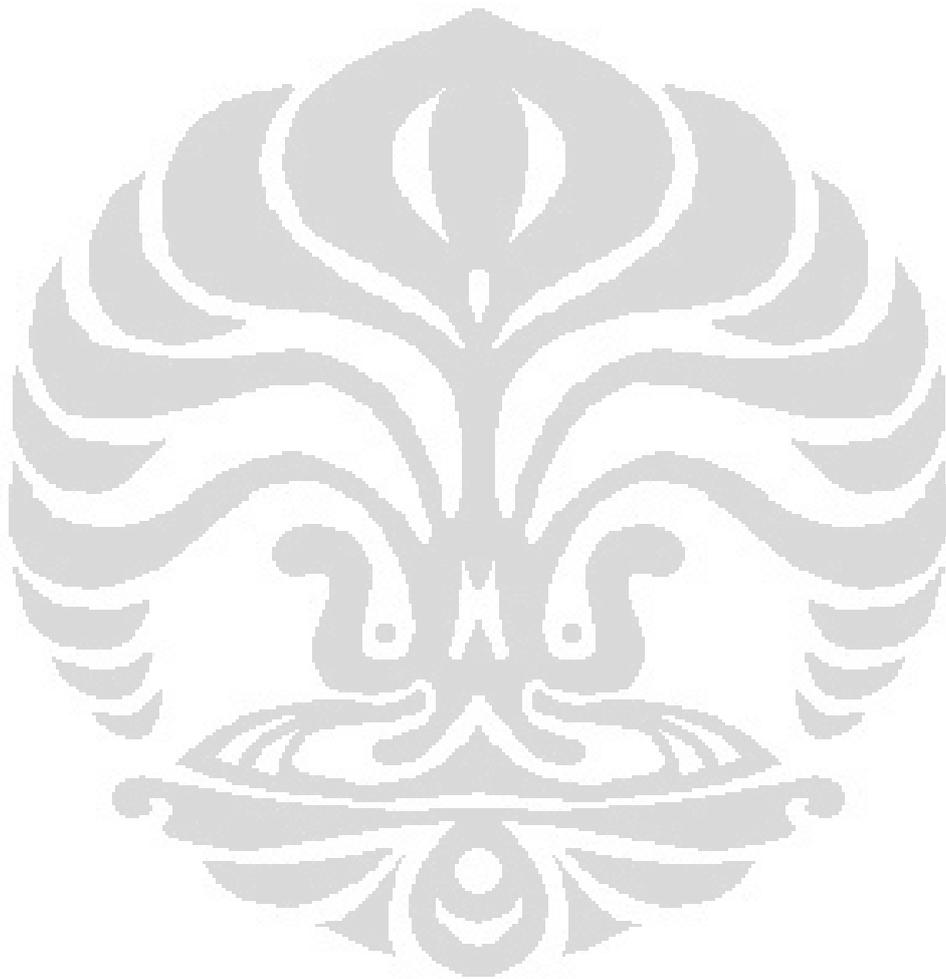
DAFTAR PUSTAKA

- Akita, Takahiro dkk. (1999). *Inequality in The Distribution of Household Expenditures in Indonesia : A Theil Decomposition Analysis*. The Developing Economies, XXXVII-2.
- Ardani, A. (1992). *Analysis of Regional Growth and Disparity: The Impact Analysis of the Inpres Project on Indonesian Development, Disertation*. The Faculty of The University of Pennsylvania.
- Balai Informasi Pertanian. (1990). *Pedoman Budidaya Kelapa Sawit*. Medan : Departemen Pertanian.
- Bintarto, R. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Boediono. (1988). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE
- BPS. (2010). *Kecamatan Badau Dalam Angka 2010*. Kapuas Hulu : Badan Pusat Statistik
- Carlino, GA. (1998). *Trends in Metropolitan Employment Growth*. Federal Reserve Bank of Philadelphia.
- Case, K.E and Ray C.F.(1996). *Principle of Economics*, 4th ed. New Jersey : Prentice- Hall International dalam Rahardja, Prathama dan M, Manurung. (2002). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Chrisyanto, C. (2006). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Perekonomian Antar Daerah Di Indonesia*. Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE UI.
- Data Monografi. (2011). *Data Monografi Kecamatan Badau Tahun 2011*.
- Departemen Pertanian. (1986). *Vandemekum Perkebunan*. Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta :Departemen Pertanian.
- _____. (1992). *Pedoman Pelaksanaan Alat dan Mesin Perkebunan Rakyat*. Jakarta : Departemen Pertanian.
- _____. (1997). *Petunjuk Teknis Budidaya Kelapa Sawit*. Jakarta : Departemen pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan.

- Departemen Tenaga Kerja RI. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
- Dinas Perkebunan Jawa Timur. (2011). *Perkembangan Perkebunan*. Surabaya : Dinas Perkebunan Jawa Timur
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2008). *Statistika Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian.
- Garrison, C.B & A.S. Paulson. (1973). *An Entropy Measure of the Geographic Concentration of Economic Activity*. *Economic Geography*, 49(3): 319-24.
- Hadi, S. (2007). *Program Pembangunan Kawasan Perbatasan*. Jakarta : BAPPENAS
- Jhingan, M.L. (1999). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kucoro, M. (2004). *Adakah Perubahan Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur di Indonesia, 1976-2001 ?*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM
- _____. (2007). *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta : Erlangga.
- Kusumantoro. (2009). *Disparitas dan Spesialisasi Industri Manufaktur Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah*. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Lembaga Demografi FE UI. (2004). *Dasar- Dasar Demografi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi UI.
- Lembaga Ketahanan Republik Indonesia. (2004). *Percepatan Pembagunan Wilayah Perbatasan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Memperkokoh NKRI*. Jakarta : Lemhanas RI.
- Lincoln, A. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : YKPN.
- Majid, R.A. (1997). *Pembukaan Areal Baru Perkebunan Kelapa Sawit dengan Teknik dan Tanpa Bakar (zero burning)*. Medan : Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
- Mangoensoekarjo, S dan H. Semangun. (2005). *Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit*. Ugm Press : Yogyakarta.

- Onrizal. (2005). *Pembukaan Lahan dengan dan Tanpa Bakar*. Medan : Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.
- Pandiadi, dkk. (2002). *Menempatkan Transmigran di Kota Terpadu Mandiri*. Jakarta : Leuser Cita Pustaka
- Rahardja, P dan M. Manurung. (2002). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- _____. (2008). *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Suharto. (2002). Disparitas dan Pola Spasialisasi Tenaga Kerja Industri Regional 1993-1996 dan Prospek Pelaksanaan Otonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.7 No.1, 2002.
- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LPFE UI.
- Sutarno dan M. Kuncoro. (2003). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.8 No.2, 2003.
- Sudarmono, M. (2006). *Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah*. Tesis S2 Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Van Noordwijk, M., P.M Susswein, T.P. Tomick, C.Diaw, dan S.Vosti. (2001). *Landuse practise in the humid tropics and introduction to ASB benchmark areas*. Bogor :International Centre for Research in Agroforestry- Southest Asian regional Research Programe.
- Van Noordwijk, M., dkk. (1995). *Alternative to slash-and- burn in Indonesia, Summary report of phase 1*. Bogor : ASB- Indonesia report No.4. ASB- Indonesia and ICRAF-S.E.

Ying, L.G. (2000). "China's Changing Regional Disparities during the Reform Period", *Economic Geography*, Vol. XXIV No. 7. 59-70.



The image features a large, light gray watermark of the Universitas Indonesia logo, which is a stylized, symmetrical emblem with intricate patterns. The word "LAMPIRAN" is superimposed in the center of this watermark in a bold, black, serif font.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja dengan Kondisi Jalan Yang Dilalui

Desa	Kondisi Jalan	Jumlah Tenaga Kerja		
		Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Badau	Jalan diperkeras	0	7	24
	Jalan diperkeras dan jalan aspal	21	21	21
Janting	Jalan tanah	22	45	87
	Jalan diperkeras dan jalan aspal	36	36	36
	Jalan diperkeras	0	11	11
Kekurak	Jalan aspal		23	28
	Jalan aspal dan jalan tanah	19	19	23
Pulau Majang	Jalan tanah	0	0	3
Sebindang	Jalan diperkeras dan jalan aspal	25	25	25
	Jalan diperkeras		15	32
Semuntik	Jalan tanah	19	26	37
Seriang	Jalan tanah, jalan diperkeras dan jalan aspal	18	18	20
Tajum	Jalan tanah, jalan diperkeras, dan jalan aspal	15	15	15
	Jalan tanah dan jalan diperkeras	0	8	8
Tinting Seligi	Jalan tanah	0	51	76
	Jalan tanah dan jalan aspal	0	38	38
Total		175	358	484

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Lampiran 2. Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Jarak Perkebunan Kelapa Sawit dengan Permukiman Tahun 2009

Desa	Dusun (Pemukiman)	Jarak Riil (Km)	Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)
Badau	Badau 1	12,1	8
	Badau 2	14,2	13
Janting	Berangan	11,2	36
	Bunut Lalau	8,6	22
Kekurak	Perumbang	4,9	9
	Kekurak	9,4	10
Pulau Majang	Majang	23,9	0
Sebindang	Mentari	15,2	17
	Sebindang	16,4	8
Semuntik	Pesayah	13,4	19
Seriang	Seriang Hilir	30,5	18
Tajum	Tangit 1	32,4	11
	Tangit 4	38,01	4
Tinting Seligi	Sungai Telian	16,5	0
	Sungai Tembaga	19,8	0

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Lampiran 3. Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Jarak Perkebunan Kelapa Sawit dengan Permukiman Tahun 2010

Desa	Dusun (Pemukiman)	Jarak Riil (Km)	Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)
Badau	Badau 1	2,5	11
	Badau 2	3,6	17
Janting	Berangan	3,7	47
	Bunut Lalau	4,9	45
Kekurak	Perumbang	3,9	19
	Kekurak	2,5	23
Pulau Majang	Majang	23,9	0
Sebindang	Mentari	2,6	21
	Sebindang	1,4	19
Semuntik	Pesayah	11,7	26
Seriang	Seriang Hilir	18,07	18
Tajum	Tangit 1	21,5	17
	Tangit 4	27,3	6
Tinting Seligi	Sungai Telian	7,16	36
	Sungai Tembaga	10,18	53

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Lampiran 4. Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Jarak Perkebunan Kelapa Sawit dengan Permukiman Tahun 2011

Desa	Dusun (Pemukiman)	Jarak Riil (Km)	Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)
Badau	Badau 1	2,5	22
	Badau 2	3,6	23
Janting	Berangan	3,7	66
	Bunut Lalau	4,9	68
Kekurak	Perumbang	3,9	23
	Kekurak	2,5	28
Pulau Majang	Majang	23,9	3
Sebindang	Mentari	2,6	23
	Sebindang	1,4	34
Semuntik	Pesayah	11,7	37
Seriang	Seriang Hilir	18,07	20
Tajum	Tangit 1	21,5	17
	Tangit 4	27,3	6
Tinting Seligi	Sungai Telian	7,16	52
	Sungai Tembaga	10,18	62

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Lampiran 5. Interval Kelas Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Indeks Ketimpangan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2009

Kelas	Pendapatan rata-rata tenaga kerja (Rupiah)	Jumlah tenaga kerja (Jiwa)	Indeks Ketimpangan
Rendah	8.561.538 – 8.699.999	15- 29	0,75 – 0,98
Sedang	8.700.000 – 8.838.461	30- 45	0,99- 1,22
Tinggi	8.838.462 – 8.976.923	46- 60	1,23 – 1,46

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Lampiran 6. Interval Kelas Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Indeks Ketimpangan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2010

Kelas	Pendapatan rata-rata tenaga kerja (Rupiah)	Jumlah tenaga kerja (Jiwa)	Indeks Ketimpangan
Rendah	6.956.250 – 7.040.624	18- 42	0, 71- 0,97
Sedang	7.040.625 – 7.124.999	43- 67	0,98 – 1,24
Tinggi	7.125.000- 7.209.375	68- 92	1,25 – 1,51

[Sumber : Pengolahan Data 2012]

Lampiran 7. Interval Kelas Pendapatan Rata-rata Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Indeks Ketimpangan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2011

Kelas	Pendapatan rata-rata tenaga kerja (Rupiah)	Jumlah tenaga kerja (Jiwa)	Indeks Ketimpangan
Rendah	5.857.891,667 – 5.931.577,667	3- 46	0,55 – 1,09
Sedang	5.931.577,668 – 6.005.263,667	47- 90	1,10- 1,64
Tinggi	6.005.263,668 – 6.078.949,667	91- 134	1,65- 2,19

[Sumber : Pengolahan Data 2012]